



WALIKOTA BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR:188.45/669 /700 /X /2023

TENTANG

PENETAPAN REGISTER RISIKO, PETA RISIKO DAN RENCANA TINDAK  
PENGENDALIAN SASARAN STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN 2024-2026

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Bima, diperlukan penyusunan register risiko, peta risiko dan rencana tindak pengendalian yang digunakan sebagai acuan dalam pencapaian target kinerja Pemerintah Kota Bima;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Register Risiko, Peta Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Sasaran Strategis Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Bima Tahun 2024-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 247);
12. Peraturan Walikota Bima Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 656);
13. Peraturan Walikota Bima Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Organisasi di Pemerintah Daerah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 657);
14. Peraturan Walikota Bima Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 727);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN REGISTER RISIKO, PETA RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SASARAN STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN 2024-2026.
- KESATU : Menetapkan Register Risiko, Peta Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Sasaran Strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Bima Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Register Risiko, Peta Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pencapaian target kinerja Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Bima 2024-2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Bima Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 3 Oktober 2023

Pj. WALIKOTA BIMA,



MOHAMMAD RUM

Tembusan:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Bima di Raba-Bima;  
2. Peringgal.

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA**  
**NOMOR : 188.45/669/1700/1 X /2023**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN REGISTER RISIKO, PETA RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN**  
**SASARAN STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024-2026**

**Daftar Risiko Prioritas**

<b>Nama Pemda : Kota Bima</b>						
<b>Tahun Penilaian : 2023</b>						
<b>Tujuan Strategis I : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing</b>						
<b>Sasaran Strategis I : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat</b>						
<b>Urusan Pemerintah :</b>						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
<b>I DINAS KESEHATAN</b>						
1	Jumlah Kematian yang tinggi dibawah UHH yang ditetapkan	RSP.23.02.01.05.01	19	Walikota	Kejadian Luar biasa (Wabah)	Kematian akibat wabah meningkat
2	Jumlah Kematian yang tinggi dibawah UHH yang ditetapkan	RSP.23.02.01.05.02	24	Walikota	banyaknya kematian ibu dan Bayi	UHH tidak mencapai target
3	angka kesakitan masyarakat yang tinggi	RSP.23.02.01.05.03	19	Walikota	Penyakit menular dan Tidak menular	UHH tidak mencapai target
4	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan yang rendah	RSP.23.02.01.05.04	24	Walikota	Akses dan Kualitas pelayanan yang kurang baik	kinerja pemerintah tidak maksimal
5	Kondisi Lingkungan masyarakat buruk	RSP.23.02.01.05.05	23	Walikota	pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam menjalankan hidup sehat rendah	masyarakat rentan terhadap penyakit
<b>II DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>						
1	Angka Kelahiran Meningkat	RSP.23.12.01.13.01	19	Walikota	Pernikahan Dibawah Umur	Meningkatnya jumlah kelahiran
2	Angka Kelahiran Meningkat	RSP.23.12.01.13.02	7	Walikota	Kegagalan Penggunaan Alat Kontrasepsi	Kelahiran tidak dapat dikendalikan

### Daftar Risiko Prioritas

<b>Nama Pemda : Kota Bima</b> <b>Tahun Penilaian : 2023</b> <b>Tujuan Strategis I : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing</b> <b>Sasaran Strategis II : Meningkatkan Kualitas Pendidikan</b> <b>Urusan Pemerintah :</b>						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
<b>I DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>						
1	Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang kurang memadai	RSP.23.01.02.04.01	17	Walikota	Kualifikasi pendidikan tidak linier	Hasil pembelajaran yang tidak optimal
2	Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang kurang memadai	RSP.23.01.02.04.02	19	Walikota	kurangnya pemahaman dan pengetahuan tenaga pendidik terhadap materi dan	Tidak tercapainya standar minimal kurikulum
3	Angka partisipasi sekolah rendah	RSP.23.01.02.04.03	17	Walikota	Usia peserta didik yang tidak sesuai dengan jenjang pendidikan	Berkurangnya persentase angka partisipasi sekolah untuk setiap jenjang pendidikan
4	Angka partisipasi sekolah rendah	RSP.23.01.02.04.04	17	Walikota	Kesadaran masyarakat yang masih kurang	Banyak anak usia sekolah yang tidak terakomodir disetiap jenjang pendidikan
5	Kurangnya kemampuan literasi dan numerasi	RSP.23.01.02.04.05	13	Walikota	Redistribusi tenaga pendidik belum tepat	Rendahnya pemahaman literasi dan numerasi pada peserta didik
6	Kurangnya kemampuan literasi dan numerasi	RSP.23.01.02.04.06	13	Walikota	Sarana dan prasarana pembelajaran yang belum representatif	Terhambatnya kegiatan pembelajaran
7	Akreditasi pendidikan masih rendah	RSP.23.01.02.04.07	17	Walikota	Kurangnya pendampingan tentang layanan satuan pendidikan	Satuan pendidikan tidak memiliki pemahaman yang cukup terkait indikator akreditasi sekolah
8	Akreditasi pendidikan masih rendah	RSP.23.01.02.04.08	22	Walikota	Proporsi PTK yang spesifik masih kurang	Kurang lancarnya kegiatan belajar mengajar
9	Iklm keamanan sekolah belum kondusif	RSP.23.01.02.04.09	17	Walikota	Rendahnya toleransi pendidikan	Munculnya kasus perundungan di sekolah
10	Iklm keamanan sekolah belum kondusif	RSP.23.01.02.04.10	22	Walikota	Kurangnya pemahaman masyarakat pada peraturan dan keamanan sekolah	Kurangnya kenyamanan di lingkungan sekolah
11	Penanganan peserta didik berkebutuhan khusus masih kurang	RSP.23.01.02.04.11	22	Walikota	Kebijakan tentang sekolah inklusi yang belum optimal	Siswa inklusi tidak tertangani dengan optimal
12	Penanganan peserta didik berkebutuhan khusus masih kurang	RSP.23.01.02.04.12	22	Walikota	Stigma negatif pada peserta didik berkebutuhan khusus	Menurunnya tingkat kepercayaan diri siswa berkebutuhan khusus

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
<b>II DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH</b>						
1	Koleksi Perpustakaan yang belum lengkap	RSP.23.21.02.21.01	19	Walikota	Belanja Buku (judul) yang tidak tepat sasaran	Kurangnya minat pemustaka
2	Perpustakaan yang belum sesuai dengan standar	RSP.23.21.02.21.02	19	Walikota	Kurangnya Pembinaan	Perpustakaan yang tidak sesuai standar
3	Masyarakat yang belum terlibat dalam kegiatan sosialiasi	RSP.23.21.02.21.03	24	Walikota	Kurangnya informasi sosialisasi kepada masyarakat	kurangnya pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat
<b>III DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>						
1	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.02.12.01	10	Walikota	Capaian kartu Identitas anak (KIA) dan KK Belum terpenuhi	Status Kota Bima sebagai Kota Layak Anak tidak meningkat
2	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.02.12.02	23	Walikota	Pengasuhan anak (Stunting)	Status Kota Bima sebagai Kota Layak Anak tidak meningkat
3	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.02.12.03	16	Walikota	Sekolah Ramah anak, Taman bermain anak, Zebra cross dan Halte Bus belum terstandarisasi	Status Kota Bima sebagai Kota Layak Anak tidak meningkat
4	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.02.12.04	10	Walikota	SDM yang memiliki Sertifikasi KHA (Konvensi Hak Anak) belum terstandarisasi nasional	Status Kota Bima sebagai Kota Layak Anak tidak meningkat
5	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.02.12.05	7	Walikota	Inovasi dari OPD	Status Kota Bima sebagai Kota Layak Anak tidak meningkat
6	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.02.12.06	16	Walikota	Ketidakpatuhan terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok	Status Kota Bima sebagai Kota Layak Anak tidak meningkat
7	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.02.12.07	16	Walikota	Pelaksanaan Pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) belum	Status Kota Bima sebagai Kota Layak Anak tidak meningkat
8	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.02.12.08	14	Walikota	Kurangnya kerjasama (MoU) dengan Pihak Pemerhati anak	Status Kota Bima sebagai Kota Layak Anak tidak meningkat
9	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.02.12.09	19	Walikota	Meningkatnya Kasus kekerasan terhadap anak dan Pernikahan Usia Anak	Status Kota Bima sebagai Kota Layak Anak tidak meningkat
10	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.02.12.10	10	Walikota	Kurangnya komitmen/koordinasi antar OPD untuk mendukung Nilai KLA	Status Kota Bima sebagai Kota Layak Anak tidak meningkat
11	Pencabutan Penghargaan terhadap Kota Layak Anak	RSP.23.08.02.12.11	14	Walikota	Penggunaan Joki Cilik tidak memenuhi standar keamanan	Reputasi daerah terhadap perlindungan anak menjadi buruk

## Daftar Risiko Prioritas

<b>Nama Pemda : Kota Bima</b> <b>Tahun Penilaian : 2023</b> <b>Tujuan Strategis I : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing</b> <b>Sasaran Strategis III : Meningkatnya Standar Hidup Masyarakat</b> <b>Urusan Pemerintah :</b>						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
<b>I DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>						
1	Menurunnya Jumlah investasi	RSP.23.27.03.19.01	14	Walikota	daya beli menurun	pertumbuhan ekonomi menurun
2	Menurunnya Jumlah investasi	RSP.23.27.03.19.02	11	Walikota	kebijakan yang belum berpihak pada investasi	terhambatnya investasi
3	Menurunnya Jumlah investasi	RSP.23.27.03.19.03	11	Walikota	Informasi investasi daerah masih kurang	kurangnya minat investor untuk berinvestasi
4	Menurunnya Jumlah investasi	RSP.23.27.03.19.04	7	Walikota	kualitas SDM ketenagakerjaan rendah	kurangnya minat investor untuk berinvestasi
5	Menurunnya Jumlah investasi	RSP.23.27.03.19.05	14	Walikota	Sarana dan prasarana perindustrian dan perdagangan yang belum memadai	kurangnya minat investor untuk berinvestasi
6	Menurunnya Jumlah investasi	RSP.23.27.03.19.06	14	Walikota	Ketersediaan bahan baku yang terbatas	kurangnya minat investor untuk berinvestasi
7	PAD belum maksimal	RSP.23.26.03.19.07	19	Walikota	ketaatan pelaku usaha terhadap kewajiban masih kurang	Target PAD tidak tercapai
8	PAD belum maksimal	RSP.23.26.03.19.08	14	Walikota	tidak optimalnya fungsi pengawasan	Penerimaan daerah berkurang
9	PAD belum maksimal	RSP.23.26.03.19.09	10	Walikota	Fluktuasi jumlah pedagang yang signifikan	Target PAD tidak tercapai
10	Terjadi peningkatan inflasi	RSP.23.26.03.19.10	14	Walikota	Kelangkaan barang dan jasa	Terjadinya kenaikan harga barang dan jasa
11	Terjadi peningkatan inflasi	RSP.23.26.03.19.11	10	Walikota	jumlah permintaan barang dan jasa meningkat	Terjadinya kenaikan harga barang dan jasa
12	Terjadi peningkatan inflasi	RSP.23.26.03.19.12	16	Walikota	Naiknya biaya produksi barang dan jasa	Terjadinya kenaikan harga barang dan jasa
13	Menurunnya Jumlah Modal Koperasi	RSP.23.15.03.19.13	16	Walikota	Jumlah anggota koperasi semakin berkurang	Modal Koperasi semakin menurun

14	Menurunnya Jumlah Modal Koperasi	RSP.23.15.03.19.14	17	Walikota	Minat masyarakat berkoperasi masih kurang	Pertumbuhan koperasi tidak berkembang
15	Menurunnya Jumlah Modal Koperasi	RSP.23.15.03.19.15	14	Walikota	rendahnya kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi	Modal Koperasi tidak berkembang
16	Menurunnya Jumlah Modal Koperasi	RSP.23.15.03.19.16	14	Walikota	Kompetensi pengelola kelembagaan koperasi yang rendah	Koperasi menjadi tidak sehat
17	Menurunnya Jumlah Modal Koperasi	RSP.23.15.03.19.17	17	Walikota	koperasi tidak dikelola secara profesional	Usaha koperasi tidak lancar
<b>II DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN BIMA</b>						
1	Destinasi wisata yang kurang menarik	RSP.23.24.03.23.01	22	Walikota	Kurangnya sarana dan prasarana	kurangnya minat wisatawan
2	Destinasi wisata yang kurang menarik	RSP.23.24.03.23.02	19	Walikota	Kurangnya promosi destinasi wisata	wisatawan kurang mendapat informasi
3	Destinasi wisata yang kurang menarik	RSP.23.24.03.23.03	25	Walikota	jumlah atraksi yang masih kurang	wisatawan tidak memiliki banyak alternatif
4	akses untuk kawasan pengembangan wisata kurang memadai	RSP.23.24.03.23.04	14	Walikota	moda transportasi umum belum ada	wisatawan kesulitan menjangkau lokasi wisata
5	kolaborasi dengan penyedia jasa pariwisata belum terbangun	RSP.23.24.03.23.05	17	Walikota	organisasi pengelola industri pariwisata belum terbentuk	pengelolaan pariwisata belum maksimal
6	Kesiapan penyedia jasa pariwisata yang masih belum memadai	RSP.23.24.03.23.06	17	Walikota	belum tersedianya penyedia jasa pariwisata yang tersertifikasi	Pelayanan kepariwisataan tidak maksimal
7	Pengelolaan Destinasi wisata tidak maksimal	RSP.23.24.03.23.07	14	Walikota	Beban kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terlalu tinggi	kualitas pelayanan kurang maksimal
<b>III DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>						
1	Perikanan Tangka Produksi perikanan Tangkap Semakin Menurun	RSP.23.23.03.22.01	25	Walikota	anomali cuaca	Hasil tangkapan ikan menurun
2	Perikanan Tangka Produksi perikanan Tangkap Semakin Menurun	RSP.23.23.03.22.02	16	Walikota	Ketersediaan Sumber Daya Ikan mulai berkurang	Hasil tangkapan ikan menurun
3	Perikanan Tangka Produksi perikanan Tangkap Semakin Menurun	RSP.23.23.03.22.03	17	Walikota	Sarana dan Prasarana (alat bantu penangkapan ikan) kurang	Hasil tangkapan ikan menurun
4	Perikanan Tangka Produksi perikanan Tangkap Semakin Menurun	RSP.23.23.03.22.04	17	Walikota	Fasilitas pelabuhan pendaratan Ikan belum tersedia	Biaya Operasional Nelayan lebih besar
5	Perikanan Tangka Produksi perikanan Tangkap Semakin Menurun	RSP.23.23.03.22.05	17	Walikota	Kualitas SDM (Nelayan) masih rendah	Hasil tangkapan ikan tidak meningkat



6	Perikanan Budidaya Produksi perikanan Budidaya Semakin Menurun	RSP.23.23.03.22.06	22	Walikota	Sarana budidaya Perikanan kurang	Hasil produksi ikan menurun
7	Perikanan Budidaya Produksi perikanan Budidaya Semakin Menurun	RSP.23.23.03.22.07	16	Walikota	Pelaku Usaha Perikanan kesulitan memperoleh Modal usaha	Hasil produksi ikan menurun
8	Daya dukung lingkungan yang semakin menurun	RSP.23.23.03.22.08	24	Walikota	Pencemaran Lingkungan	Kualitas Hasil Produksi menurun
9	Pemanfaatan teknologi budidaya perikanan yang masih minim	RSP.23.23.03.22.09	14	Walikota	Pengetahuan Masyarakat tentang Pemanfaatan teknologi Budidaya Perikanan	Hasil Produksi tidak maksimal
10	Fluktuasi Harga	RSP.23.23.03.22.10	7	Walikota	Permintaan terhadap Ikan Budidaya yang tidak stabil	Pembudidaya Ikan semakin berkurang
11	Pengolahan Hasil Perikanan yang belum maksimal	RSP.23.23.03.22.11	17	Walikota	Penanganan Ikan Tangkap belum menerapkan Cold Chain System (CCS)	Kualitas Mutu Ikan Menurun
12	Pengolahan Hasil Perikanan yang belum maksimal	RSP.23.23.03.22.12	25	Walikota	Kelangkaan bahan baku	Produksi olahan Ikan Berkurang
13	Pengolahan Hasil Perikanan yang belum maksimal	RSP.23.23.03.22.13	14	Walikota	Akses Pemasaran hasil pengolahan Ikan	Penjualan Hasil Produksi Olahan Ikan tidak mencapai target
14	Pengolahan Hasil Perikanan yang belum maksimal	RSP.23.23.03.22.14	18	Walikota	Modal usaha yang masih kurang	Usaha tidak berkelanjutan
15	Harga Jual Produk Olahan Menurun	RSP.23.23.03.22.15	14	Walikota	Sarana dan Prasarana pengolahan Ikan tidak memenuhi standar SKP (Standar Kelayakan Pengolahan)	Kualitas Mutu Ikan Menurun
<b>IV DINAS TENAGA KERJA</b>						
1	Akses Permodal yang masih kurang	RSP.23.07.03.09.01	16	Walikota	Komitmen pemerintah dan pihak pemberi modal yang masih kurang	Terhambatnya penciptaan wirausaha baru
2	Koordinasi lintas sektor yang belum maksimal	RSP.23.07.03.09.02	19	Walikota	Belum adanya data terpadu peserta pelatihan	Peserta pelatihan yang tidak tepat sasaran
3	Koordinasi lintas sektor yang belum maksimal	RSP.23.07.03.09.03	23	Walikota	Belum adanya koordinasi dalam penciptaan wirausaha baru	Tumpang tindih pelaksanaan pelatihan
4	Tata kelola usaha yang masih belum maksimal	RSP.23.07.03.09.04	24	Walikota	Pemahaman manajemen pengelola usaha yang masih minim	Kegiatan usaha yang terhambat
5	Keterampilan yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar	RSP.23.07.03.09.05	25	Walikota	Pelatihan yang tidak sesuai kebutuhan	Peserta pelatihan tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar

6	Keterampilan yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar	RSP.23.07.03.09.06	24	Walikota	Kualitas keluaran yang masih rendah	Tidak terserapnya tenaga kerja secara maksimal
7	Keterampilan yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar	RSP.23.07.03.09.07	19	Walikota	sarpras yang belum sesuai standar	kompetensi output rendah
8	Keterampilan yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar	RSP.23.07.03.09.08	23	Walikota	Kualitas input yang masih belum memadai	terhambatnya proses pelatihan
9	Keterampilan yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar	RSP.23.07.03.09.09	25	Walikota	Konflik kepentingan	kualitas input yang rendah
<b>V DINAS PERTANIAN</b>						
1	Target pertumbuhan produksi pertanian yang belum tercapai	RSP.23.25.03.24.01	24	Walikota	Ketersediaan sarana dan prasarana pertanian yang belum memadai	Produksi pertanian tidak mencapai target
2	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang belum maksimal	RSP.23.25.03.24.02	25	Walikota	Cakupan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) dan pengendalian Organisme	Penanganan bencana pertanian tidak tertangani secara menyeluruh
3	Cakupan ketersediaan air irigasi tidak seimbang dengan luas lahan	RSP.23.25.03.24.03	25	Walikota	Kurangnya infrastruktur irigasi	Layanan air irigasi tidak merata
4	Terjadinya alih fungsi lahan	RSP.23.25.03.24.04	23	Walikota	Masyarakat belum memahami dan taat terkait peruntukkan lahan	Luasan lahan pertanian semakin berkurang
<b>VI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>						
1	Tidak terpenuhi Indikator Nilai APE	RSP.23.08.03.12.01	16	Walikota	Kurangnya MoU dengan Pihak terkait	Nilai APE tidak Mencapai target
2	Tidak terpenuhi Indikator Nilai APE	RSP.23.08.03.12.02	14	Walikota	Data penunjang PUG belum memadai	Nilai APE tidak Mencapai target
3	Tidak terpenuhi Indikator Nilai APE	RSP.23.08.03.12.03	14	Walikota	Kurangnya SDM Perencana OPD yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan	Nilai APE tidak Mencapai target
4	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.03.12.04	10	Walikota Bima	Capaian kartu Identitas anak (KIA) dan KK Belum terpenuhi	Status Kota Bima sebagai Kota Layak Anak tidak meningkat
5	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.03.12.05	23	Walikota Bima	Pengasuhan anak (Stunting)	Status Kota Bima sebagai Kota Layak Anak tidak meningkat
6	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.03.12.06	16	Walikota Bima	Sekolah Ramah anak, Taman bermain anak, Zebra cross dan Halte Bus belum	Status Kota Bima sebagai Kota Layak Anak tidak meningkat
7	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.03.12.07	10	Walikota Bima	SDM yang memiliki Sertifikasi KHA (Konvensi Hak Anak) belum terstandarisasi nasional	Status Kota Bima sebagai Kota Layak Anak tidak meningkat
8	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.03.12.08	7	Walikota Bima	Inovasi dari OPD	Status Kota Bima sebagai Kota Layak Anak tidak meningkat
9	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.03.12.09	16	Walikota Bima	Ketidakpatuhan terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok	Status Kota Bima sebagai Kota Layak Anak tidak meningkat

10	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.03.12.10	16	Walikota Bima	Pelaksanaan Pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) belum	Status Kota Bima sebagai Kota Layak Anak tidak meningkat
11	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.03.12.11	14	Walikota Bima	Kurangnya kerjasama (MoU) dengan Pihak Pemerhati anak	Status Kota Bima sebagai Kota Layak Anak tidak meningkat
12	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.03.12.12	19	Walikota Bima	Meningkatnya Kasus kekerasan terhadap anak dan Pernikahan Usia Anak	Status Kota Bima sebagai Kota Layak Anak tidak meningkat
13	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.03.12.13	10	Walikota Bima	Kurangnya komitmen/koordinasi antar OPD untuk mendukung Nilai KLA	Status Kota Bima sebagai Kota Layak Anak tidak meningkat

## Daftar Risiko Prioritas

<b>Nama Pemda : Kota Bima</b> <b>Tahun Penilaian : 2023</b> <b>Tujuan Strategis I : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing</b> <b>Sasaran Strategis IV : Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat</b> <b>Urusan Pemerintah :</b>						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
<b>I DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>						
1	PERIKANAN TANGKAP Produksi perikanan Tangkap Semakin Menurun	RSP.23.23.04.22.01	25	Walikota	anomali cuaca	Hasil tangkapan ikan menurun
2	PERIKANAN TANGKAP Produksi perikanan Tangkap Semakin Menurun	RSP.23.23.04.22.02	16	Walikota	Ketersediaan Sumber Daya Ikan mulai berkurang	Hasil tangkapan ikan menurun
3	PERIKANAN TANGKAP Produksi perikanan Tangkap Semakin Menurun	RSP.23.23.04.22.03	17	Walikota	Sarana dan Prasarana (alat bantu penangkapan ikan) kurang	Hasil tangkapan ikan menurun
4	PERIKANAN TANGKAP Produksi perikanan Tangkap Semakin Menurun	RSP.23.23.04.22.04	17	Walikota	Fasilitas pelabuhan pendaratan Ikan belum tersedia	Biaya Operasional Nelayan lebih besar
5	PERIKANAN TANGKAP Produksi perikanan Tangkap Semakin Menurun	RSP.23.23.04.22.05	17	Walikota	Kualitas SDM (Nelayan) masih rendah	Hasil tangkapan ikan tidak meningkat
6	PERIKANAN BUDIDAYA Produksi perikanan Budidaya Semakin Menurun	RSP.23.23.04.22.06	22	Walikota	Sarana budidaya Perikanan kurang	Hasil produksi ikan menurun
7	PERIKANAN BUDIDAYA Produksi perikanan Budidaya Semakin Menurun	RSP.23.23.04.22.07	16	Walikota	Pelaku Usaha Perikanan kesulitan memperoleh Modal usaha	Hasil produksi ikan menurun
8	Daya dukung lingkungan yang semakin menurun	RSP.23.23.04.22.08	24	Walikota	Pencemaran Lingkungan	Kualitas Hasil Produksi menurun
9	Daya dukung lingkungan yang semakin menurun	RSP.23.23.04.22.09	14	Walikota	Pengetahuan Masyarakat tentang Pemanfaatan teknologi Budidaya Perikanan	Hasil Produksi tidak maksimal
10	Fluktuasi Harga	RSP.23.23.04.22.10	7	Walikota	Permintaan terhadap Ikan Budidaya yang tidak stabil	Pembudidaya Ikan semakin berkurang

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
11	PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN yang belum maksimal	RSP.23.23.04.22.11	17	Walikota	Penanganan Ikan Tangkap belum menerapkan Cold Chain System (CCS)	Kualitas Mutu Ikan Menurun
12	PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN yang belum maksimal	RSP.23.23.04.22.12	25	Walikota	Kelangkaan bahan baku	Produksi olahan Ikan Berkurang
13	PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN yang belum maksimal	RSP.23.23.04.22.13	14	Walikota	Akses Pemasaran hasil pengolahan Ikan	Penjualan Hasil Produksi Olahan Ikan tidak mencapai target
14	PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN yang belum maksimal	RSP.23.23.04.22.14	18	Walikota	Modal usaha yang masih kurang	Usaha tidak berkelanjutan
15	Harga Jual Produk Olahan Rendah	RSP.23.23.04.22.15	14	Walikota	Sarana dan Prasarana pengolahan Ikan tidak memenuhi standar SKP (Standar Kelayakan Pengolahan)	Kualitas Mutu Ikan Menurun
16	Minat Konsumsi Ikan Kurang	RSP.23.23.04.22.16	19	Walikota	Pemahaman Masyarakat akan manfaat Ikan kurang	Konsumsi Ikan Masyarakat rendah
17	Minat Konsumsi Ikan Kurang	RSP.23.23.04.22.17	19	Walikota	Daya Beli Ikan rendah	Konsumsi Ikan Masyarakat rendah
<b>II DINAS PERTANIAN</b>						
1	Target pertumbuhan produksi pertanian yang belum tercapai	RSP.23.25.04.24.01	24	Walikota	Ketersediaan sarana dan prasarana pertanian yang belum memadai	Produksi pertanian tidak mencapai target
2	Target pertumbuhan produksi pertanian yang belum tercapai	RSP.23.25.04.24.02	19	Walikota	Rendahnya Kapasitas dan kompetensi SDM Petani dan Penyuluh	Adopsi teknologi kurang maksimal
3	Kebijakan pembiayaan yang belum berpihak kepada petani	RSP.23.25.04.24.03	19	Walikota	Kurangnya akses dan literasi pembiayaan	Modal usaha tani yang kurang
4	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang belum maksimal	RSP.23.25.04.24.04	25	Walikota	Cakupan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) secara terpadu (Luas area) serta Pengendalian penyakit hewan menular yang masih rendah	Penanganan bencana pertanian tidak tertangani secara menyeluruh
5	Cakupan ketersediaan air irigasi tidak seimbang dengan luas lahan	RSP.23.25.04.24.05	25	Walikota	Kurangnya infrastruktur irigasi	Layanan air irigasi tidak merata
6	Terjadinya alih fungsi lahan	RSP.23.25.04.24.06	23	Walikota	Masyarakat belum memahami dan taat terkait peruntukkan lahan	Luasan lahan pertanian semakin berkurang
<b>III DINAS KETAHANAN PANGAN</b>						
1	penganeekaragaman bahan pangan yang belum maksimal	RSP.23.09.04.14.01	19	Walikota	Pola konsumsi masyarakat yang masih belum B2SA	Skor pola pangan harapan kota bima yang tidak ideal

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
2	penganekaragaman bahan pangan yang belum maksimal	RSP.23.09.04.14.02	19	Walikota	Pemahaman masyarakat terhadap pangan yg belum maksimal	Kurangnya pemenuhan kecukupan gizi masyarakat
3	penganekaragaman bahan pangan yang belum maksimal	RSP.23.09.04.14.03	19	Walikota	Komitmen pemerintah msh kurang terkait pangan	Skor pola pangan harapan kota bima yang tidak ideal
4	penganekaragaman bahan pangan yang belum maksimal	RSP.23.09.04.14.04	19	Walikota	Kurangnya peran keterlibatan stakeholder lain dalam mendukung	Skor pola pangan harapan kota bima yang tidak ideal
5	penganekaragaman bahan pangan yang belum maksimal	RSP.23.09.04.14.05	19	Walikota	Ketersediaan bahan pangan diluar beras masih kurang	Skor pola pangan harapan kota bima yang tidak ideal
6	Terjadinya kelangkaan pangan	RSP.23.09.04.14.06	19	Walikota	Ketersediaan pangan	Ketersediaan pangan yang tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat
7	Terjadinya kelangkaan pangan	RSP.23.09.04.14.07	19	Walikota	Distribusi pangan yang belum merata	Belum tercukupinya ketersediaan pangan sebagian masyarakat
8	Terjadinya kelangkaan pangan	RSP.23.09.04.14.08	19	Walikota	Harga pangan yang fluktuatif	Kenaikan harga barang dipasaran/ Inflasi
9	Terjadinya kelangkaan pangan	RSP.23.09.04.14.09	19	Walikota	Lemahnya kerjasama antara daerah surplus pangan dengan daerah defisit pangan	Belum tercukupinya ketersediaan pangan sebagian masyarakat
10	Bertambahnya kasus gizi Kurang atau gizi buruk	RSP.23.09.04.14.10	19	Walikota	Pemahaman/ pengetahuan tentang gizi masyarakat rendah;	Kurangnya nilai gizi pada konsumsi masyarakat
11	Bertambahnya kasus gizi Kurang atau gizi buruk	RSP.23.09.04.14.11	19	Walikota	Sanitasi lingkungan yang masih rendah	Kurangnya sehatnya pangan yang dikonsumsi masyarakat
12	Bertambahnya kasus gizi Kurang atau gizi buruk	RSP.23.09.04.14.12	19	Walikota	Kurangnya persediaan pangan	ketidak mampuan masyarakat dalam membeli bahan pangan
13	Angka kecukupan gizi masyarakat yang masih rendah	RSP.23.09.04.14.13	23	Walikota	Pemahaman masyarakat terhadap perbaikan gizi yang masih rendah	Kurangnya pemenuhan kecukupan gizi masyarakat
14	Angka kecukupan gizi masyarakat yang masih rendah	RSP.23.09.04.14.14	23	Walikota	cara pengolahan pangan yang belum tepat	Kurangnya nilai gizi pada konsumsi masyarakat
15	Angka kecukupan gizi masyarakat yang masih rendah	RSP.23.09.04.14.15	23	Walikota	Daya beli masyarakat yang masih rendah	ketidak mampuan masyarakat dalam membeli bahan pangan
16	Keamanan dan mutu pangan yang masih rendah	RSP.23.09.04.14.16	19	Walikota	Lemahnya pengawasan terhadap keamanan	Tidak terjaminnya keamanan pangan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
17	Keamanan dan mutu pangan yang masih rendah	RSP.23.09.04.14.17	19	Walikota	Belum adanya registrasi, uji mutu, sertifikasi pangan	Beredarnya pangan berbahaya yang tidak memenuhi standar dan mutu
18	Keamanan dan mutu pangan yang masih rendah	RSP.23.09.04.14.18	19	Walikota	Belum terintegrasinya pengawasan dengan pihak lain	Beredarnya pangan yang tidak terjamin mutu dan keamanannya
19	Keamanan dan mutu pangan yang masih rendah	RSP.23.09.04.14.19	19	Walikota	Fasilitas pengolahan pangan belum memenuhi syarat	Tidak terjaminnya kualitas pangan yang beredar di masyarakat
20	Keamanan dan mutu pangan yang masih rendah	RSP.23.09.04.14.20	19	Walikota	Sanitasi tempat pengolahan pangan belum memenuhi sayarat	Tidak terjaminnya kualitas pangan yang beredar di masyarakat
<b>III DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						
1	Bencana Alam	RSP.23.03.04.06.01	25	Walikota	Perubahan Iklim	Kerusakan Sarana dan Prasarana
2	Lahan untuk membangun Infrastruktur tidak tersedia	RSP.23.03.04.06.02	17	Walikota	Ijin lahan sulit diperoleh	Terhambatnya Pembangunan Infrastruktur
3	lembaga pengelola Air Minum dan sanitasi belum efektif	RSP.23.03.04.06.03	19	Walikota	kurangnya pengetahuan SDM pengelola air minum dan sanitasi	tidak Efektifnya Pemanfaatan sarana terbangun
4	Ketersediaan Baku Mutu Air yang belum menjangkau ke seluruh masyarakat	RSP.23.03.04.06.04	24	Walikota	Konflik kepentingan	Terhambatnya Pembangunan Infrastruktur
5	Ketersediaan Baku Mutu Air yang belum menjangkau ke seluruh masyarakat	RSP.23.03.04.06.05	19	Walikota	Kurangnya Kerjasama dengan Pihak lain untuk mendukung Pembiayaan	Terhambatnya Pembangunan Infrastruktur
6	Ketersediaan Baku Mutu Air yang belum menjangkau ke seluruh masyarakat	RSP.23.03.04.06.06	17	Walikota	Kualitas Jaringan Air Eksisting yang tidak layak	Pelayanan tidak optimal
7	Ketersediaan Baku Mutu Air yang belum menjangkau ke seluruh masyarakat	RSP.23.03.04.06.07	16	Walikota	Debit air yang tersedia masih kurang	Masyarakat tidak terlayani air bersih
8	Perencanaan Kebutuhan Penanganan Air Minum dan Sanitasi belum terintegrasi	RSP.23.03.04.06.08	22	Walikota	Database belum tersedia	Perencanaan tidak tepat sasaran
<b>III DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>						
1	Menurunnya Jumlah investasi	RSP.23.27.04.19.01	14	Walikota	Sarana dan prasarana perindustrian dan perdagangan yang belum memadai	kurangnya minat investor untuk berinvestasi
2	Menurunnya Jumlah investasi	RSP.23.27.04.19.02	14	Walikota	Ketersediaan bahan baku yang terbatas	kurangnya minat investor untuk berinvestasi
3	Terjadi peningkatan inflasi	RSP.23.26.04.19.03	14	Walikota	Kelangkaan barang dan jasa	Terjadinya kenaikan harga barang dan jasa
4	Terjadi peningkatan inflasi	RSP.23.26.04.19.04	10	Walikota	jumlah permintaan barang dan jasa meningkat	Terjadinya kenaikan harga barang dan jasa
5	Terjadi peningkatan inflasi	RSP.23.26.04.19.05	16	Walikota	Naiknya biaya produksi barang dan jasa	Terjadinya kenaikan harga barang dan jasa

## Daftar Risiko Prioritas

<b>Nama Pemda : Kota Bima</b> <b>Tahun Penilaian : 2023</b> <b>Tujuan Strategis I : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing</b> <b>Sasaran Strategis V : Meningkatnya Pemberdayaan Gender Dan Pemuda</b> <b>Urusan Pemerintah :</b>						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
<b>I DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>						
1	kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelatihan kepemudaan yang diadakan	RSP.23.17.05.04.01	19	Walikota	kurangnya informasi terkait kegiatan kepemudaan	Kurangnya peserta yang mengikuti event kepemudaan
2	kurangnya pembinaan olahraga berprestasi	RSP.23.17.05.04.02	19	Walikota	jadwal latihannya yang tidak tersusun dengan baik dan berbenturan dengan kegiatan sekolah	Kompetensi atlit dan pemuda masih kurang
3	kurangnya pembinaan olahraga berprestasi	RSP.23.17.05.04.03	17	Walikota	Kurangnya event kejuaraan pada beberapa cabang olahraga	tidak tergalinya potensi/ bakat/ bibit baru
4	kurangnya pembinaan olahraga berprestasi	RSP.23.17.05.04.04	17	Walikota	kurangnya koordinaasi dengan pengampu cabang olahraga	kurang event yang diadakan
5	Kebijakan terkait kepemudaan dan olahraga yang belum berpihak	RSP.23.17.05.04.05	17	Walikota	belum adanya regulasi daerah terkait kepemudaan dan olahraga	data pemuda dan atlit tidak akurat
<b>II DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>						
1	Tidak terpenuhi Indikator Nilai APE	RSP.23.08.05.12.01	14	Walikota	Belum ada tindak lanjut terkait regulasi Pengarustamaan Gender (PUG)	Nilai APE tidak Mencapai target
2	Tidak terpenuhi Indikator Nilai APE	RSP.23.08.05.12.02	11	Walikota	PUG belum tersosialisasikan secara meluas	Nilai APE tidak Mencapai target
3	Tidak terpenuhi Indikator Nilai APE	RSP.23.08.05.12.03	14	Walikota	Kurangnya koordinasi antar OPD untuk mendukung Nilai PUG	Nilai APE tidak Mencapai target
4	Tidak terpenuhi Indikator Nilai APE	RSP.23.08.05.12.04	16	Walikota	Kurangnya MoU dengan Pihak terkait	Nilai APE tidak Mencapai target
5	Tidak terpenuhi Indikator Nilai APE	RSP.23.08.05.12.05	14	Walikota	Data penunjang PUG belum memadai	Nilai APE tidak Mencapai target



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
6	Tidak terpenuhi Indikator Nilai APE	RSP.23.08.05.12.06	14	Walikota	Kurangnya SDM Perencana OPD yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan PPRG (Perencanaan Penganggaran yang responsif gender)	Nilai APE tidak Mencapai target
<b>III DINAS SOSIAL</b>						
1	Kualitas dan kuantitas SDM PSKS yang masih kurang	RSP.23.06.05.08.01	17	Walikota	SDM PSKS yang belum terstandarisasi	Kualitas pelayanan yang belum maksimal
<b>IV DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>						
1	Angka Kelahiran Meningkat	RSP.23.12.05.13.01	19	Walikota	Pernikahan Dibawah Umur	Meningkatnya jumlah kelahiran
2	Angka Kelahiran Meningkat	RSP.23.12.05.13.02	7	Walikota	Kegagalan Penggunaan Alat Kontrasepsi	Kelahiran tidak dapat dikendalikan
3	Unmeet Need Yang Masih Tinggi	RSP.23.12.05.13.03	17	Walikota	Stigma negatif tentang alat kontrasepsi	Meningkatnya jumlah kelahiran yang tidak diinginkan
4	Adanya Dropout Aseptor KB	RSP.23.12.05.13.04	14	Walikota	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alat kontrapsepsi	Meningkatnya jumlah kelahiran
5	Ledakan Jumlah Urbanisasi	RSP.23.12.05.13.05	13	Walikota	Ketersediaan lapangan kerja	Jumlah penduduk yang meningkat
<b>IV DINAS KESEHATAN</b>						
1	Jumlah Kematian yang tinggi dibawah UHH yang ditetapkan	RSP.23.02.05.05.01	24	Walikota	Banyaknya kematian ibu dan Bayi	UHH tidak mencapai target
2	angka kesakitan masyarakat yang tinggi	RSP.23.02.05.05.02	19	Walikota	Penyakit menular dan Tidak menular	UHH tidak mencapai target

## Daftar Risiko Prioritas

<b>Nama Pemda : Kota Bima</b>						
<b>Tahun Penilaian : 2023</b>						
<b>Tujuan Strategis II : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan masyarakat</b>						
<b>Sasaran Strategis VI : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi</b>						
<b>Urusan Pemerintah :</b>						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
<b>I DINAS PERHUBUNGAN</b>						
1	Jalan yang tidak sesuai standar	RSP.23.13.06.17.01	25	Walikota	lebar jalan yang tidak sesuai standar	tingkat kepadatan lalu lintas meningkat
2	Jalan yang tidak sesuai standar	RSP.23.13.06.17.02	25	Walikota	kepemilikan aset yang bukan kewenangan kota	tidak diintervensi
3	Jalan yang tidak sesuai standar	RSP.23.13.06.17.03	24	Walikota	sarana prasarana jalan yang tidak sesuai standar	tingkat kecelakaan yang meningkat
4	Peningkatan sarana infrastruktur jalan yang tidak tepat sasaran	RSP.23.13.06.17.04	25	Walikota	dokumen tata kelola transportasi yang belum tersedia	pelaksanaan tata kelola lalu lintas terhambat
5	Area parkir yang tidak sesuai standar	RSP.23.13.06.17.05	24	Walikota	kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap area parkir yang masih kurang	kepadatan jalan pada titik tertentu
<b>II DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>						
1	Menurunnya Jumlah investasi	RSP.23.27.06.19.01	14	Walikota	daya beli menurun	pertumbuhan ekonomi menurun
2	Menurunnya Jumlah investasi	RSP.23.27.06.19.02	11	Walikota	kebijakan yang belum berpihak pada investasi	terhambatnya investasi
3	Menurunnya Jumlah investasi	RSP.23.27.06.19.03	11	Walikota	Informasi investasi daerah masih kurang	kurangnya minat investor untuk berinvestasi
4	Menurunnya Jumlah investasi	RSP.23.27.06.19.04	7	Walikota	kualitas SDM ketenagakerjaan rendah	kurangnya minat investor untuk berinvestasi
5	Menurunnya Jumlah investasi	RSP.23.27.06.19.05	14	Walikota	Sarana dan prasarana perindustrian dan perdagangan yang belum memadai	kurangnya minat investor untuk berinvestasi

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
6	Menurunnya Jumlah investasi	RSP.23.27.06.19.06	14	Walikota	Ketersediaan bahan baku yang terbatas	kurangnya minat investor untuk berinvestasi
7	PAD belum maksimal	RSP.23.26.06.19.07	19	Walikota	ketaatan pelaku usaha terhadap kewajiban masih kurang	Target PAD tidak tercapai
8	PAD belum maksimal	RSP.23.26.06.19.08	14	Walikota	tidak optimalnya fungsi pengawasan	Penerimaan daerah berkurang
9	PAD belum maksimal	RSP.23.26.06.19.09	10	Walikota	Fluktuasi jumlah pedagang yang signifikan	Target PAD tidak tercapai
10	Terjadi peningkatan inflasi	RSP.23.26.06.19.10	14	Walikota	Kelangkaan barang dan jasa	Terjadinya kenaikan harga barang dan jasa
11	Terjadi peningkatan inflasi	RSP.23.26.06.19.11	10	Walikota	jumlah permintaan barang dan jasa meningkat	Terjadinya kenaikan harga barang dan jasa
12	Terjadi peningkatan inflasi	RSP.23.26.06.19.12	16	Walikota	Naiknya biaya produksi barang dan jasa	Terjadinya kenaikan harga barang dan jasa
13	Menurunnya Jumlah Modal Koperasi	RSP.23.15.06.19.13	16	Walikota	Jumlah anggota koperasi semakin berkurang	Modal Koperasi semakin menurun
14	Menurunnya Jumlah Modal Koperasi	RSP.23.15.06.19.14	17	Walikota	Minat masyarakat berkoperasi masih kurang	Pertumbuhan koperasi tidak berkembang
15	Menurunnya Jumlah Modal Koperasi	RSP.23.15.06.19.15	14	Walikota	rendahnya kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi	Modal Koperasi tidak berkembang
16	Menurunnya Jumlah Modal Koperasi	RSP.23.15.06.19.16	14	Walikota	Kompetensi pengelola kelembagaan koperasi yang rendah	Koperasi menjadi tidak sehat
17	Menurunnya Jumlah Modal Koperasi	RSP.23.15.06.19.17	17	Walikota	koperasi tidak dikelola secara profesional	Usaha koperasi tidak lancar
<b>III</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>					
1	PERIKANAN TANGKAP Produksi perikanan Tangkap Semakin Menurun	RSP.23.23.06.22.01	25	Walikota	anomali cuaca	Hasil tangkapan ikan menurun
2	PERIKANAN TANGKAP Produksi perikanan Tangkap Semakin Menurun	RSP.23.23.06.22.02	16	Walikota	Ketersediaan Sumber Daya Ikan mulai berkurang	Hasil tangkapan ikan menurun
3	PERIKANAN TANGKAP Produksi perikanan Tangkap Semakin Menurun	RSP.23.23.06.22.03	17	Walikota	Sarana dan Prasarana (alat bantu penangkapan ikan) kurang	Hasil tangkapan ikan menurun

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
4	PERIKANAN TANGKAP Produksi perikanan Tangkap Semakin Menurun	RSP.23.23.06.22.04	17	Walikota	Fasilitas pelabuhan pendaratan Ikan belum tersedia	Biaya Operasional Nelayan lebih besar
5	PERIKANAN TANGKAP Produksi perikanan Tangkap Semakin Menurun	RSP.23.23.06.22.05	17	Walikota	Kualitas SDM (Nelayan) masih rendah	Hasil tangkapan ikan tidak meningkat
6	PERIKANAN BUDIDAYA Produksi perikanan Budidaya Semakin Menurun	RSP.23.23.06.22.06	22	Walikota	Sarana budidaya Perikanan kurang	Hasil produksi ikan menurun
7	PERIKANAN BUDIDAYA Produksi perikanan Budidaya Semakin Menurun	RSP.23.23.06.22.07	16	Walikota	Pelaku Usaha Perikanan kesulitan memperoleh Modal usaha	Hasil produksi ikan menurun
8	Daya dukung lingkungan yang semakin menurun	RSP.23.23.06.22.08	24	Walikota	Pencemaran Lingkungan	Kualitas Hasil Produksi menurun
9	Pemanfaatan teknologi budidaya perikanan yang masih minim	RSP.23.23.06.22.09	14	Walikota	Pengetahuan Masyarakat tentang Pemanfaatan teknologi Budidaya Perikanan	Hasil Produksi tidak maksimal
10	Fluktuasi Harga	RSP.23.23.06.22.10	7	Walikota	Permintaan terhadap Ikan Budidaya yang tidak stabil	Pembudidaya Ikan semakin berkurang
11	PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN yang belum maksimal	RSP.23.23.06.22.11	17	Walikota	Penanganan Ikan Tangkap belum menerapkan Cold Chain System (CCS)	Kualitas Mutu Ikan Menurun
12	PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN yang belum maksimal	RSP.23.23.06.22.12	25	Walikota	Kelangkaan bahan baku	Produksi olahan Ikan Berkurang
13	PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN yang belum maksimal	RSP.23.23.06.22.13	14	Walikota	Akses Pemasaran hasil pengolahan Ikan	Penjualan Hasil Produksi Olahan Ikan tidak mencapai target
14	PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN yang belum maksimal	RSP.23.23.06.22.14	18	Walikota	Modal usaha yang masih kurang	Usaha tidak berkelanjutan
15	Harga Jual Produk Olahan Menurun	RSP.23.23.06.22.15	14	Walikota	Sarana dan Prasarana pengolahan Ikan tidak memenuhi standar SKP (Standar Kelayakan Pengolahan)	Kualitas Mutu Ikan Menurun

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
<b>IV DINAS PERTANIAN</b>						
1	Target pertumbuhan produksi pertanian yang belum tercapai	RSP.23.25.06.24.01	24	Walikota	Ketersediaan sarana dan prasarana pertanian yang belum memadai	Produksi pertanian tidak mencapai target
2	Target pertumbuhan produksi pertanian yang belum tercapai	RSP.23.25.06.24.02	19	Walikota	Rendahnya Kapasitas dan kompetensi SDM Petani dan Penyuluh	Adopsi teknologi kurang maksimal
3	Kebijakan pembiayaan yang belum berpihak kepada petani	RSP.23.25.06.24.03	19	Walikota	Kurangnya akses dan literasi pembiayaan	Modal usaha tani yang kurang
4	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang belum maksimal	RSP.23.25.06.24.04	25	Walikota	Cakupan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) secara terpadu (Luas area) serta Pengendalian penyakit hewan menular yang masih rendah	Penanganan bencana pertanian tidak tertangani secara menyeluruh
5	Cakupan ketersediaan air irigasi tidak seimbang dengan luas lahan	RSP.23.25.06.24.05	25	Walikota	Kurangnya infrastruktur irigasi	Layanan air irigasi tidak merata
6	Terjadinya alih fungsi lahan	RSP.23.25.06.24.06	23	Walikota	Masyarakat belum memahami dan taat terkait peruntukkan lahan	Luasan lahan pertanian semakin berkurang
<b>VI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP</b>						
1	Kurangnya minat investor	RSP.23.16.06.20.01	19	Walikota	Kurangnya promosi penanaman modal	Tidak tersampainya peluang investasi pada investor
2	Kurangnya minat investor	RSP.23.16.06.20.02	19	Walikota	Implementasi kebijakan yang belum berpihak pada investasi	terhambatnya investasi
3	Kurangnya minat investor	RSP.23.16.06.20.03	19	Walikota	Faktor keamanan	kerugian investasi tinggi
4	Data kegiatan penanaman modal yang belum diperbaharui dan dilaporkan	RSP.23.16.06.20.04	22	Walikota	Tidak semua pelaku usaha melaporkan LKPM	kurangnya akumulasi nilai realisasi investasi
5	Data kegiatan penanaman modal yang belum diperbaharui dan dilaporkan	RSP.23.16.06.20.05	24	Walikota	Kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha	Investor tidak melaporkan data investasinya
<b>VII DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						
1	Ketersediaan Baku Mutu Air yang belum menjangkau ke seluruh masyarakat	RSP.23.03.06.06.01	24	Walikota	Konflik kepentingan	Terhambatnya Pembangunan Infrastruktur

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
2	Ketersediaan Baku Mutu Air yang belum menjangkau ke seluruh masyarakat	RSP.23.03.06.06.02	19	Walikota	Kurangnya Kerjasama dengan Pihak lain untuk mendukung Pembiayaan	Terhambatnya Pembangunan Infrastruktur
3	Umur Ekonomis Jalan tidak sesuai rencana	RSP.23.03.06.06.03	17	Walikota	Konstruksi yang kurang memadai	Penurunan Kemantapan Jalan
4	Umur Ekonomis Jalan tidak sesuai rencana	RSP.23.03.06.06.04	17	Walikota	SDM Perencana, Pengawas dan Penyedia Jasa belum sesuai standar kompetensi	Kualitas Jalan tidak baik
<b>VII DINAS PRIWISATA DAN KEBUDAYAAN BMA</b>						
1	Destinasi wisata yang kurang menarik	RSP.23.24.06.23.01	22	Walikota	Kurangnya sarana dan prasarana	kurangnya minat wisatawan
2	Destinasi wisata yang kurang menarik	RSP.23.24.06.23.02	19	Walikota	Kurangnya promosi destinasi wisata	wisatawan kurang mendapat informasi
3	Destinasi wisata yang kurang menarik	RSP.23.24.06.23.03	24	Walikota	jumlah atraksi yang masih kurang	wisatawan tidak memiliki banyak alternatif
4	akses untuk kawasan pengembangan wisata kurang memadai	RSP.23.24.06.23.04	14	Walikota	moda transportasi umum belum ada	wisatawan kesulitan menjangkau lokasi wisata
5	kolaborasi dengan penyedia jasa pariwisata belum terbangun	RSP.23.24.06.23.05	24	Walikota	organisasi pengelola industri pariwisata belum terbentuk	pengelolaan pariwisata belum maksimal
6	Kesiapan penyedia jasa pariwisata yang masih belum memadai	RSP.23.24.06.23.06	17	Walikota	belum tersediannya penyedia jasa pariwisata yang tersertifikasi	Pelayanan kepariwisataan tidak maksimal
7	Pengelolaan Destinasi wisata tidak maksimal	RSP.23.24.06.23.07	14	Walikota	Beban kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terlalu tinggi	kualitas pelayanan kurang maksimal
<b>VIII DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>						
1	Kebijakan Peruntukan lahan yang belum berpihak pada meningkatnya kualitas lingkungan hidup	RSP.23.10.06.15.01	25	Walikota	analisis dampak atau kajian sebelum membuat kebijakan yang dilakukan belum dilakukan secara maksimal	Kesalahan peruntukan lahan
2	Kebijakan Peruntukan lahan yang belum berpihak pada meningkatnya kualitas lingkungan hidup	RSP.23.10.06.15.02	24	Walikota	Kurangnya ketaatan terhadap dokumen tata ruang	Alih fungsi lahan
<b>IX SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>						
1	Kejadian yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	RSP.23.05.06.10.01	17	Walikota	Kebijakan ketertiban dan ketentraman masyarakat belum berpihak pada pelaksanaan tugas POL PP	Penegakan PERDA/PERKADA yang tidak optimal

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
2	Kejadian yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	RSP.23.05.06.10.02	19	Walikota	kurangnya kompetensi SDM perangkat daerah	pelaksanaan tugas yang tidak optimal
3	Kejadian yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	RSP.23.05.06.10.03	11	Walikota	kurangnya personil POL PP pada tiap wilayah	jangkauan penanganan yang tidak optimal
4	Kejadian yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	RSP.23.05.06.10.04	16	Walikota	Sarana dan Prasarana Kurang memadai	pelaksanaan tugas yang tidak optimal

### Daftar Risiko Prioritas

<b>Nama Pemda : Kota Bima</b> <b>Tahun Penilaian : 2023</b> <b>Tujuan Strategis II : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan masyarakat</b> <b>Sasaran Strategis VII : Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan</b> <b>Urusan Pemerintah :</b>						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>					
1	Belum terusunnya dokumen ketenagakerjaan yang memadai	RSP.23.07.07.09.01	24	Walikota	Perencanaan teagakerja Belum memiliki dokumen PTKK	Pembangunan ketenagakerjaan yang tidak terarah
2	Jumlah anak usia 17-24 tahun yang tidak bekerja	RSP.23.07.07.09.02	23	Walikota	rendahnya keterampilan yang dimiliki	Kerawanan sosial
3	Jumlah anak usia 17-24 tahun yang tidak bekerja	RSP.23.07.07.09.03	25	Walikota	Akses informasi lowongan pekerjaan yang masih terbatas	tidak terserapnya tenagakerja pada pasar tenaga kerja
4	Jumlah pengangguran terbuka yang meningkat	RSP.23.07.07.09.04	23	Walikota	Rasio kesempatan kerja yang yang tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja	Meningkatnya angka kriminalitas
5	Jumlah pengangguran terbuka yang meningkat	RSP.23.07.07.09.05	0	Walikota	Rasio kesempatan kerja yang yang tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja	meningkatnya angka kemiskinan
6	Keteramplan yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar	RSP.23.07.07.09.06	25	Walikota	Pelatihan yang tidak sesuai kebutuhan	Peserta pelatihan tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar
7	Keteramplan yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar	RSP.23.07.07.09.07	24	Walikota	Kualitas keluaran yang masih rendah	Tidak terserapnya tenaga kerja secara maksimal
8	Keteramplan yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar	RSP.23.07.07.09.08	19	Walikota	sarpras yang belum sesuai standar	kompetensi output rendah
9	Keteramplan yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar	RSP.23.07.07.09.09	23	Walikota	Kualitas input yang masih belum memadai	terhambatnya proses pelatihan
10	Keteramplan yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar	RSP.23.07.07.09.10	25	Walikota	Konflik kepentingan	kualitas input yang rendah
11	Akses Permodal yang masih kurang	RSP.23.07.07.09.11	16	Walikota	Komitmen pemerintah dan pihak pemberi modal yang masih kurang	Terhambatnya penciptaan wirausaha baru



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
12	Koordinasi lintas sektor yang belum maksimal	RSP.23.07.07.09.12	19	Walikota	Belum adanya data terpadu peserta pelatihan	Peserta pelatihan yang tidak tepat sasaran
13	Koordinasi lintas sektor yang belum maksimal	RSP.23.07.07.09.13	23	Walikota	Belum adanya koordinasi dalam penciptaan wirausaha baru	Tumpang tindih pelaksanaan pelatihan
14	Tata kelola usaha yang masih belum maksimal	RSP.23.07.07.09.14	24	Walikota	Pemahaman manajemen pengelola usaha yang masih minim	Kegiatan usaha yang terhambat
15	Meningkatnya jumlah aduan konflik Hubungan Industrial	RSP.23.07.07.09.15	23	Walikota	Tingkat ketaatan pihak perusahaan dan pihak tenagakerja terhadap aturan ketenagakerjaan yang masih rendah	PHK sepihak
16	Meningkatnya jumlah aduan konflik Hubungan Industrial	RSP.23.07.07.09.16	23	Walikota	Pola hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja yang tidak setara	Meningkatnya konflik antara pemberi kerja dan penerima kerja
17	Meningkatnya jumlah kecelakaan kerja	RSP.23.07.07.09.17	25	Walikota	Rendahnya kesadaran akan pentingnya penerapan K3	Meningkatnya jumlah kecelakaan kerja
18	Meningkatnya jumlah kecelakaan kerja	RSP.23.07.07.09.18	19	Walikota	Kurangnya sarana dan prasarana K3	Meningkatnya jumlah kecelakaan kerja
19	Rendahnya perusahaan yang menerapkan UMK	RSP.23.07.07.09.19	23	Walikota	kurang terbukanya perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya	sulitnya menentukan perusahaan yang wajib menerapkan UMK
20	Kurangnya peserta BPJS Ketenagakerjaan	RSP.23.07.07.09.20	19	Walikota	Kurangnya kesadaran perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	Rendahnya peserta BPJS Ketenagakerjaan
<b>II DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP</b>						
1	Kurangnya minat investor	RSP.23.16.07.20.01	19	Walikota	Kurangnya promosi penanaman modal	Tidak tersampainya peluang investasi pada investor
2	Kurangnya minat investor	RSP.23.16.07.20.02	19	Walikota	Implementasi kebijakan yang belum berpihak pada investasi	terhambatnya investasi
3	Kurangnya minat investor	RSP.23.16.07.20.03	19	Walikota	Faktor keamanan	kerugian investasi tinggi
4	Data kegiatan penanaman modal yang belum diperbaharui dan dilaporkan	RSP.23.16.07.20.04	22	Walikota	Tidak semua pelaku usaha melaporkan LKPM	kurangnya akumulasi nilai realisasi investasi
5	Data kegiatan penanaman modal yang belum diperbaharui dan dilaporkan	RSP.23.16.07.20.05	24	Walikota	Kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha	Investor tidak melaporkan data investasinya
<b>III DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP</b>						
1	Menurunnya Jumlah investasi	RSP.23.27.07.19.01	11	Walikota	kebijakan yang belum berpihak pada investasi	terhambatnya investasi

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
2	Menurunnya Jumlah investasi	RSP.23.27.07.19.02	11	Walikota	Informasi investasi daerah masih kurang	kurangnya minat investor untuk berinvestasi
3	Menurunnya Jumlah investasi	RSP.23.27.07.19.03	11	Walikota	kualitas SDM ketenagakerjaan rendah	kurangnya minat investor untuk berinvestasi
4	Menurunnya Jumlah investasi	RSP.23.27.07.19.04	14	Walikota	Sarana dan prasarana perindustrian dan perdagangan yang belum memadai	kurangnya minat investor untuk berinvestasi

## Daftar Risiko Prioritas

<b>Nama Pemda : Kota Bima</b> <b>Tahun Penilaian : 2023</b> <b>Tujuan Strategis II : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan masyarakat</b> <b>Sasaran Strategis VIII : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi</b> <b>Urusan Pemerintah :</b>						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
<b>I DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>						
1	Angka partisipasi sekolah rendah	RSP.23.01.08.04.01	17	Walikota	Usia peserta didik yang tidak sesuai dengan jenjang pendidikan	Berkurangnya persentase angka partisipasi sekolah untuk setiap jenjang pendidikan
2	Angka partisipasi sekolah rendah	RSP.23.01.08.04.02	17	Walikota	Kesadaran masyarakat yang masih kurang	Banyak anak usia sekolah yang tidak terakomodir disetiap jenjang pendidikan
<b>II DINAS KESEHATAN</b>						
1	Akses penjaminan kesehatan masyarakat belum maksimal	RSP.23.02.08.05.01	16	Walikota Bima	Koordinasi lintas perangkat daerah pengelola jaminan kesehatan belum	Sebagian masyarakat belum memperoleh jaminan kesehatan
<b>III DINAS SOSIAL</b>						
1	Pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak maksimal	RSP.23.06.08.08.01	10	Walikota	Terjadinya Perubahan data kependudukan penerima layanan	Bansos tidak tersalurkan kepada penerima layanan
2	Pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak maksimal	RSP.23.06.08.08.02	14	Walikota	Kurangnya SDM pemberi layanan	Penyaluran bansos tidak tepat waktu
3	Pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak maksimal	RSP.23.06.08.08.03	7	Walikota	Kurang optimalnya koordinasi dengan stakeholders terkait	Program/kegiatan tidak berjalan lancar
4	Pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak maksimal	RSP.23.06.08.08.04	7	Walikota	keterbatasan sarana dan prasarana	Program/kegiatan tidak berjalan lancar
5	Timbulnya kecemburuan sosial ditengah masyarakat	RSP.23.06.08.08.05	14	Walikota	kurangnya sosialisasi terkait kriteria penerima layanan	Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
<b>IV DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>						
1	meningkatnya rumah tidak layak huni	RSP.23.04.08.07.01	25	Walikota	Penghasilan Masyarakat dibawah Standar	jumlah rumah tidak layak huni meningkat

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
2	meningkatnya rumah tidak layak huni	RSP.23.04.08.07.02	22	Walikota	Penanganan Pasca Bencana Kurang Optimal	Kerusakan bangunan dan gedung
3	meningkatnya rumah tidak layak huni	RSP.23.04.08.07.03	14	Walikota	penggunaan material yang tidak memenuhi standar	menurunnya umur ekonomis bangunan
4	meningkatnya rumah tidak layak huni	RSP.23.04.08.07.04	17	Walikota	pengetahuan tentang konstruksi yang masih kurang	Menurunnya kualitas bangunan
<b>V DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						
1	Bencana Alam	RSP.23.03.08.06.01	25	Walikota	Perubahan Iklim	Kerusakan Sarana dan Prasarana
2	Lahan untuk membangun Infrastruktur tidak tersedia	RSP.23.03.08.06.02	17	Walikota	Ijin lahan sulit diperoleh	Terhambatnya Pembangunan Infrastruktur
3	lembaga pengelola Air Minum dan sanitasi belum efektif	RSP.23.03.08.06.03	19	Walikota	kurangnya pengetahuan SDM pengelola air minum dan sanitasi	tidak Efektifnya Pemanfaatan sarana terbangun
4	Ketersediaan Baku Mutu Air yang belum menjangkau ke seluruh masyarakat	RSP.23.03.08.06.04	24	Walikota	Konflik kepentingan	Terhambatnya Pembangunan Infrastruktur
5	Ketersediaan Baku Mutu Air yang belum menjangkau ke seluruh masyarakat	RSP.23.03.08.06.05	19	Walikota	Kurangnya Kerjasama dengan Pihak lain untuk mendukung Pembiayaan	Terhambatnya Pembangunan Infrastruktur
6	Ketersediaan Baku Mutu Air yang belum menjangkau ke seluruh masyarakat	RSP.23.03.08.06.06	17	Walikota	Kualitas Jaringan Air Eksisting yang tidak layak	Pelayanan tidak optimal
7	Ketersediaan Baku Mutu Air yang belum menjangkau ke seluruh masyarakat	RSP.23.03.08.06.07	16	Walikota	Debit air yang tersedia masih kurang	Masyarakat tidak terlayani air bersih
8	Perencanaan Kebutuhan Penanganan Air Minum dan Sanitasi belum terintegrasi	RSP.23.03.08.06.08	22	Walikota	Database belum tersedia	Perencanaan tidak tepat sasaran
9	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat masih Kurang	RSP.23.03.08.06.09	24	Walikota	Belum ada Kesadaran masyarakat akan sanitasi bersih	tidak Efektifnya Pemanfaatan sarana terbangun
10	Tidak tersedianya Lahan	RSP.23.03.08.06.10	22	Walikota	Konflik kepemilikan Lahan	Terhambatnya Pembangunan Infrastruktur
11	Umur Ekonomis Infrastruktur drainase tidak sesuai rencana	RSP.23.03.08.06.11	24	Walikota	Bencana Alam	Kerusakan Infrastruktur drainase
12	Umur Ekonomis Infrastruktur drainase tidak sesuai rencana	RSP.23.03.08.06.12	24	Walikota	Konstruksi yang kurang memadai	Penurunan kualitas Infrastuktur drainase
13	Umur Ekonomis Infrastruktur drainase tidak sesuai rencana	RSP.23.03.08.06.13	22	Walikota	SDM Perencana, Pengawas dan Penyedia Jasa belum sesuai standar kompetensi	Kualitas Infrastuktur drainase tidak baik

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
14	Umur Ekonomis Infrastruktur drainase tidak sesuai rencana	RSP.23.03.08.06.14	17	Walikota	Kurangnya Pemeliharaan	Kualitas Infrastuktur drainase menurun
15	Perencanaan Kebutuhan tidak tepat sasaran	RSP.23.03.08.06.15	17	Walikota	Tindakan Penanganan tidak sesuai kondisi	Capaian Kinerja tidak Maksimal
<b>VI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>						
1	Meningkatnya Kasus Kekerasan pada Perempuan	RSP.23.08.08.12.01	16	Walikota	Permasalahan Ekonomi	Reputasi Daerah tentang Perlindungan Perempuan
2	Meningkatnya Kasus Kekerasan pada Perempuan	RSP.23.08.08.12.02	14	Walikota	Relasi Kuasa yang masih tinggi	Reputasi Daerah tentang Perlindungan Perempuan
3	Meningkatnya Kasus Kekerasan pada Perempuan	RSP.23.08.08.12.03	14	Walikota	Belum Optimalnya sosialisasi tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
<b>VII KECAMATAN</b>						
1	pelayanan yang belum sesuai dengan waktu yang ditargetkan	RSP.23.32.08.31.01	16	Walikota	sarpras yang belum memadai	Keterlambatan pelayanan
2	pelayanan yang belum sesuai dengan waktu yang ditargetkan	RSP.23.32.08.31.02	14	Walikota	Prosedur dan mekanisme pelayanan yang belum memadai	Pelayanan yang tidak efektif
3	pelayanan yang belum sesuai dengan waktu yang ditargetkan	RSP.23.32.08.31.03	16	Walikota	Kompetensi SDM yang masih kurang	Kualitas pelayanan yang rendah
<b>VIII DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>						
1	Angka Kelahiran Meningkat	RSP.23.12.08.13.01	19	Walikota	Pernikahan Dibawah Umur	Meningkatnya jumlah kelahiran
2	Angka Kelahiran Meningkat	RSP.23.12.08.13.02	7	Walikota	Kegagalan Penggunaan Alat Kontrasepsi	Kelahiran tidak dapat dikendalikan
3	Unmeet Need Yang Masih Tinggi	RSP.23.12.08.13.03	17	Walikota	Stigma negatif tentang alat kontrasepsi	Meningkatnya jumlah kelahiran yang tidak diinginkan
4	Adanya Dropout Aseptor KB	RSP.23.12.08.13.04	14	Walikota	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alat kontrasepsi	Meningkatnya jumlah kelahiran
5	Ledakan Jumlah Urbanisasi	RSP.23.12.08.13.05	13	Walikota	Ketersediaan lapangan kerja	Jumlah penduduk yang meningkat

## Daftar Risiko Prioritas

<b>Nama Pemda : Kota Bima</b> <b>Tahun Penilaian : 2023</b> <b>Tujuan Strategis III : Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik</b> <b>Sasaran Strategis IX : Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik</b> <b>Urusan Pemerintah :</b>						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
<b>I BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>						
1	Laporan yang di sajikan tidak sesuai dengan SAP	RSP.23.28.09.26.01	17	Walikota	Kesalahan Akun saat mencatat transaksi	Penyajian laporan keuangan yang tidak andal
2	Laporan yang di sajikan tidak sesuai dengan SAP	RSP.23.28.09.26.02	23	Walikota	SDM pengelola keuangan dan pengelola barang yang belum memadai	penyelesaian laporan keuangan yang tidak tepat waktu
3	Laporan yang di sajikan tidak sesuai dengan SAP	RSP.23.28.09.26.03	14	Walikota	Laporan Keuangan BLUD yang belum disajikan tepat waktu	terhambatnya penyelesaian LKPD
4	Laporan yang di sajikan tidak sesuai dengan SAP	RSP.23.28.09.26.04	17	Walikota	pencatatan atas aset hasil penyerahan pemerintah kabupaten bima belum dicatat sebagaimana mestinya	neraca pemerintah daerah belum dapat diyakini secara memadai
5	Laporan yang di sajikan tidak sesuai dengan SAP	RSP.23.28.09.26.05	17	Walikota	perubahan aplikasi yang tidak disertai perubahan menu pada aplikasi BMD	tidak akuratnya neraca BMD
6	pengelolaan PAD yang belum optimal	RSP.23.28.09.26.06	16	Walikota	kebocoran penerimaan PAD	Tidak tercapainya target PAD
7	pengelolaan PAD yang belum optimal	RSP.23.28.09.26.07	14	Walikota	implementasi regulasi yang bersifat teknis belum optimal	Tidak tercapainya target PAD
8	pengelolaan PAD yang belum optimal	RSP.23.28.09.26.08	14	Walikota	penyetoran pajak dan retribusi yang melebihi tahun anggaran	Nilai pengakuan pendapatan daerah tidak maksimal
9	Penatausahaan perbendaharaan yang belum optimal	RSP.23.28.09.26.09	19	Walikota	terdapat selisih nilai antara bank dan kas daerah	kesalahan pencatatan pada kas daerah
10	Penatausahaan perbendaharaan yang belum optimal	RSP.23.28.09.26.10	4	Walikota	terjadinya error sistem	terhambatnya proses pencairan anggaran
11	Pengelolaan aset yang belum optimal	RSP.23.28.09.26.11	18	Walikota	ketidapatuhan OPD dalam menyampaikan laporan triwulan BMD	tidak tergambarnya nilai aset pada periode pelaporan tertentu

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
12	Pengelolaan aset yang belum optimal	RSP.23.28.09.26.12	23	Walikota	koordinasi lintas OPD yang masih belum maksimal	terhambatnya penyusunan laporan BMD
13	terjadinya kesalahan penginputan pada sistem penganggaran	RSP.23.28.09.26.13	19	Walikota	penginputan yang dilakukan dua kali	terjadinya kesalahan penginputan akun pendapatan dan belanja
14	terjadinya kesalahan penginputan pada sistem penganggaran	RSP.23.28.09.26.14	19	Walikota	perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban menggunakan aplikasi yang berbeda	penyelesaian pekerjaan yang tidak tepat waktu
15	penyelesaian tindak lanjut yang masih belum optimal	RSP.23.28.09.26.15	16	Walikota	ketidapatuhan OPD untuk menyelesaikan rekomendasi hasil temuan tepat waktu masih kurang	semakin meningkatnya beban penyelesaian tuntutan ganti kerugian keuangan daerah
<b>II SEKRETARIAT DAERAH</b>						
<b>A BAGIAN OPA</b>						
1	Pelaporan kinerja yang belum maksimal	RSP.23.33.09.01.01	17	Walikota	Kompetensi SDM pada perangkat daerah yang masih kurang memadai	Laporan yang disusun tidak maksimal
2	Pelaporan kinerja yang belum maksimal	RSP.23.33.09.01.02	22	Walikota	Data dari perangkat daerah dan eksternal yang masih belum dapat diyakini	Laporan yang tidak kredibel
3	Pelaporan kinerja yang belum maksimal	RSP.23.33.09.01.03	22	Walikota	pengumpulan data yang tidak tepat waktu	penyusunan laporan melewati batas waktu yang telah ditentukan Kemenpan RB
4	Pelaporan kinerja yang belum maksimal	RSP.23.33.09.01.04	13	Walikota	Capaian Indikator Kinerja beberapa Perangkat Daerah yang masih rendah atau tidak mencapai target	Kinerja Pemerintah Daerah tidak mencapai target
5	Pelaporan kinerja yang belum maksimal	RSP.23.33.09.01.05	21	Walikota	Penetapan target yang tidak realistis	Capaian kinerja Pemerintah Daerah tidak tercapai
6	Komitmen Perangkat daerah yang masih kurang	RSP.23.33.09.01.06	11	Walikota	Pemahaman akan SAKIP yang kurang	Penyusunan Laporan AKIP yang terhambat
<b>B BAGIAN PEMERINTAHAN</b>						
1	capaian kinerja tidak mencapai target	RSP.23.33.09.01.07	17	Walikota	penetapan target kinerja tidak realistis	Capaian Kinerja tidak sesuai target
2	capaian kinerja tidak mencapai target	RSP.23.33.09.01.08	24	Walikota	data dari perangkat daerah yang tidak valid	Laporan yang tidak kredibel
3	capaian kinerja tidak mencapai target	RSP.23.33.09.01.09	19	Walikota	kompetensi SDM yang belum memadai	Penyampaian laporan yang melewati waktu yang ditetapkan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
<b>III DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						
1	Kebijakan Internal SPBE belum memadai	RSP.23.14.09.18.01	25	Walikota	Arsitektur SPBE belum tersusun	tidak terdeskripsikannya integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi
2	Kebijakan Internal SPBE belum memadai	RSP.23.14.09.18.02	25	Walikota	Belum terintegrasinya peta rencana daerah dengan SPBE nasional	tidak ada keselarasan antara SPBE pemerintah daerah dengan SPBE nasional
3	Tata Kelola SPBE belum maksimal	RSP.23.14.09.18.03	25	Walikota	Belum ada Pedoman teknis tentang pengelolaan dan pengembangan aplikasi	Tidak terstrukturanya proses pengembangan aplikasi pemerintah daerah
4	Tata Kelola SPBE belum maksimal	RSP.23.14.09.18.04	19	Walikota	Layanan jaringan intra pemerintah daerah belum terintegrasi pada seluruh perangkat daerah	arus data dan informasi internal pemerintah daerah tidak terdistribusi dengan maksimal dan keamanan informasi belum terjamin secara menyeluruh
5	Tata Kelola SPBE belum maksimal	RSP.23.14.09.18.05	19	Walikota	Layanan aplikasi pemerintah daerah dengan aplikasi pemerintah pusat belum terintegrasi	arus data dan informasi antar pemerintah daerah dengan pihak pemerintah pusat tidak terdistribusi dengan maksimal dan keamanan informasi belum terjamin secara menyeluruh
6	Tata Kelola SPBE belum maksimal	RSP.23.14.09.18.06	24	Walikota	Kolaborasi penanggungjawab kegiatan koordinasi SPBE belum maksimal	penanganan indikator SPBE pemerintah daerah masih bersifat parsial
7	Manajemen SPBE belum berjalan sebagaimana mestinya	RSP.23.14.09.18.07	19	Walikota	Belum tersusunnya manajemen risiko SPBE	tidak teridentifikasinya penyebab kegagalan pencapaian target indek SPBE
8	Manajemen SPBE belum berjalan sebagaimana mestinya	RSP.23.14.09.18.08	25	Walikota	Belum tersusunnya Manual SMKI, pedoman manajemen aset TIK, Pedoman manajemen layanan TIK, pedoman manajemen SDM	tidak teridentifikasinya penyebab kegagalan pencapaian target indek SPBE
9	Manajemen SPBE belum berjalan sebagaimana mestinya	RSP.23.14.09.18.09	25	Walikota	Belum dilaksanakan audit TIK	tidak dapat menilai tingkat keandalan pengelolaan SPBE



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
10	Layanan SPBE belum maksimal	RSP.23.14.09.18.10	19	Walikota	Layanan aplikasi pemerintah daerah belum terintegrasi	masih terdapat layanan aplikasi informasi yang serupa
11	Layanan SPBE belum maksimal	RSP.23.14.09.18.11	24	Walikota	Kurangnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam menyediakan informasi publik	informasi publik atas penyelenggaraan pemerintahan daerah belum sampai ke masyarakat secara maksimal
12	Layanan SPBE belum maksimal	RSP.23.14.09.18.12	19	Walikota	Terbatasnya platform yang dapat diakses	informasi publik atas penyelenggaraan pemerintahan daerah belum sampai ke masyarakat secara maksimal
13	Layanan SPBE belum maksimal	RSP.23.14.09.18.13	24	Walikota	Kompetensi SDM yang terbatas	kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat rendah
14	Layanan SPBE belum maksimal	RSP.23.14.09.18.14	25	Walikota	Sarana dan Prasarana yang terbatas	terhambatnya proses pelayanan informasi publik
<b>IV BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>						
1	Capaian Sasaran RPD tidak sesuai target	RSP.23.28.09.25.01	17	Walikota	kebijakan Penetapan Target yang tidak realistis	Target Tidak tercapai
2	Capaian Sasaran RPD tidak sesuai target	RSP.23.28.09.25.02	17	Walikota	Kapabilitas tenaga perencana belum memadai	kualitas dokumen perencanaan yang kurang baik
3	Capaian Sasaran RPD tidak sesuai target	RSP.23.28.09.25.03	17	Walikota	Alokasi anggaran yang tidak merujuk pada pencapaian sasaran	penggunaan anggaran tidak tepat sasaran
4	Monitoring dan Evaluasi secara berkala belum terlaksana secara optimal	RSP.23.28.09.25.04	19	Walikota	instrumen monev yang belum berjalan secara optimal	Hasil Monev belum ditindaklanjuti
<b>V DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>						
1	Layanan yang terhambat	RSP.23.11.09.16.01	13	Walikota	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan	Waktu penyelesaian pelayanan yang semakin lama
2	Layanan yang terhambat	RSP.23.11.09.16.02	22	Walikota	Sarana dan Prasarana yang kurang memadai	Penyelesaian pelayanan yang tidak maksimal
3	Layanan yang terhambat	RSP.23.11.09.16.03	11	Walikota	SDM yang tidak sesuai dengan kompetensi	Kurangnya kemampuan memahami tugas kurang maksimal
4	Layanan yang terhambat	RSP.23.11.09.16.04	7	Walikota	Masyarakat yang tidak memahami tata letak kantor	Waktu penyelesaian pelayanan yang semakin lama
5	Penyelesaian pelayanan yang tidak tepat waktu	RSP.23.11.09.16.05	20	Walikota	Server down pada jaringan komunikasi data	Pelayanan terhenti

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
6	Penyelesaian pelayanan yang tidak tepat waktu	RSP.23.11.09.16.06	16	Walikota	Ketersediaan jaringan listrik yang belum memadai	Pelayanan terhenti
7	Terjadi pungutan liar	RSP.23.11.09.16.07	13	Walikota	Beban kerja yang tidak berimbang pada tingkat kesejahteraan pegawai	Etos kerja pegawai menurun
8	Terjadi pungutan liar	RSP.23.11.09.16.08	20	Walikota	Tidak diterapkannya etika pelayanan	Terjadinya konflik kepentingan
<b>VI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP</b>						
1	Pelayanan yang tidak optimal	RSP.23.16.09.20.01	8	Walikota	Prosedur yang tidak transparan dan berbelit-belit	Terhambatnya pelayanan
2	Pelayanan yang tidak optimal	RSP.23.16.09.20.02	13	Walikota	Karakter dan kompetensi SDM yang masih kurang	Pelayanan yang tidak berkualitas
3	Pelayanan yang tidak optimal	RSP.23.16.09.20.03	14	Walikota	Sarana dan prasarana pelayanan publik yang belum optimal	ketepatan waktu dan kenyamanan pelayanan bagi masyarakat berkurang
4	WBS belum berjalan secara optimal	RSP.23.16.09.20.04	17	Walikota	Pegelolaan pengaduan belum optimal	Penanganan pengaduan akan terhambat
5	WBS belum berjalan secara optimal	RSP.23.16.09.20.05	17	Walikota	Komunikasi lintas OPD belum berjalan	Akan memunculkan konflik
6	Pungutan liar	RSP.23.16.09.20.06	17	Walikota	Integritas SDM Pelayanan	Tingkat kepercayaan masyarakat menurun
7	Masyarakat belum menerima Informasi pelayanan publik secara optimal	RSP.23.16.09.20.07	16	Walikota	Masih terbatasnya media informasi pelayanan publik	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pelayanan publik
<b>VII BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM</b>						
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai belum sesuai anjab dan ABK	RSP.23.31.09.27.01	19	Walikota	Anjab dan ABK belum ditetapkan	Penempatan Pegawai tidak sesuai kompetensi
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai belum sesuai anjab dan ABK	RSP.23.31.09.27.02	17	Walikota	Anjab dan ABK belum ditetapkan	Penempatan Pegawai di OPD tidak sesuai beban kerja
3	Formasi CPNS Belum sesuai perencanaan kebutuhan	RSP.23.31.09.27.03	19	Walikota	Terbatasnya alokasi formasi yang disediakan oleh Pusat	Kebutuhan ASN belum tercukupi
4	Formasi CPNS Belum sesuai perencanaan kebutuhan	RSP.23.31.09.27.04	24	Walikota	Anjab dan ABK belum ditetapkan	Penempatan Pegawai tidak sesuai kebutuhan
5	Promosi Jabatan belum sesuai kompetensi	RSP.23.31.09.27.05	25	Walikota	Terbatasnya ASN yang memiliki sertifikat Kompetensi sesuai ketentuan	Rendahnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
<b>VIII KECAMATAN</b>						
1	Pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran	RSP.23.32.09.31.01	23	Walikota	Pemerintah belum memiliki data yang akurat	keresahan masyarakat
2	Pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran	RSP.23.32.09.31.02	16	Walikota	konflik kepentingan	kepercayaan masyarakat kepada pemerintah berkurang
3	Pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran	RSP.23.32.09.31.03	19	Walikota	pemerataan pemberian bantuan yang tidak proposional	pengentasan kemiskinan akan terhambat
4	PMKS di Kec. Rasanae Timur yang belum tertangani secara maksimal	RSP.23.32.09.31.04	17	Walikota	informasi tentang pelayanan PMKS yang belum optimal	penderita PMKS tidak tertangani secara optimal
5	PMKS di Kec. Rasanae Timur yang belum tertangani secara maksimal	RSP.23.32.09.31.05	19	Walikota	Pemahaman aparat pemerintah yang masih kurang	penanganan PMKS terhambat
6	PMKS di Kec. Rasanae Timur yang belum tertangani secara maksimal	RSP.23.32.09.31.06	19	Walikota	Kurangnya koordinasi dengan stakeholder/ Pemangku kepentingan terkait	sebagian PMKS tidak memperoleh haknya secara maksimal
7	Peningkatan kapasitas usaha masyarakat yang belum optimal	RSP.23.32.09.31.07	19	Walikota	Kurangnya pelatihan keterampilan	usaha yang tidak berkembang
8	Peningkatan kapasitas usaha masyarakat yang belum optimal	RSP.23.32.09.31.08	19	Walikota	Terbatasnya sarpras	terhambatnya usaha masyarakat
9	Masyarakat belum mendapatkan akses air bersih yang memadai	RSP.23.32.09.31.09	19	Walikota	penanganan dampak bencana yang belum dilakukan secara optimal	menurunnya kesehatan masyarakat
10	Masyarakat belum mendapatkan akses air bersih yang memadai	RSP.23.32.09.31.10	19	Walikota	debit air yang semakin berkurang	tidak terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat
11	Peningkatan luasan kawasan kumuh di kec. rasanae timur	RSP.23.32.09.31.11	19	Walikota	sampah dan sanitasi dalam kondisi yang tidak baik	menurunnya kondisi kesehatan masyarakat
12	Peningkatan luasan kawasan kumuh di kec. rasanae timur	RSP.23.32.09.31.12	19	Walikota	kesadaran masyarakat yang masih kurang	kualitas lingkungan semakin menurun
13	Peningkatan luasan kawasan kumuh di kec. rasanae timur	RSP.23.32.09.31.13	19	Walikota	sarpras yang masih kurang	tidak teratasinya masalah persampahan masyarakat
14	Peningkatan luasan kawasan kumuh di kec. rasanae timur	RSP.23.32.09.31.14	14	Walikota	pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukan	meningkatnya pencemaran lingkungan
<b>VIII INSPEKTORAT</b>						
1	Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia yang belum memadai dibandingkan dengan beban kerja	RSP.23.29.09.03.01	14	Walikota	Formulir Anjab dan ABK belum disusun berdasarkan perbandingan jumlah kebutuhan SDM dengan beban kerja	Sebagian pengawasan yang bersifat mandatory tidak bisa dilaksanakan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
2	Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia yang belum memadai dibandingkan dengan	RSP.23.29.09.03.02	14	Walikota	Proses rekrutmen belum memperhatikan kebutuhan berdasarkan jenjang jabatan	Jumlah pejabat tidak sesuai dengan proporsi yang ideal
3	Kompetensi SDM pengawasan yang belum memadai	RSP.23.29.09.03.03	19	Walikota	Intensitas pengembangan kompetensi yang masih kurang	Terdapat kesenjangan antara jenis penugasan dengan kompetensi pengawas
4	Kompetensi SDM pengawasan yang belum memadai	RSP.23.29.09.03.04	19	Walikota	Budaya belajar yang rendah	Rendahnya kualitas SDM pengawasan
5	Kompetensi SDM pengawasan yang belum memadai	RSP.23.29.09.03.05	14	Walikota	Belum adanya pedoman tentang pemberian penghargaan dan hukuman	Etos kerja aparat pengawas menurun
6	Pengawasan belum sepenuhnya berbasis risiko	RSP.23.29.09.03.06	16	Walikota	Perangkat daerah belum sepenuhnya melaksanakan manajemen risiko	Pelaksanaan pengawasan tidak tepat sasaran
7	Pengawasan belum sepenuhnya berbasis risiko	RSP.23.29.09.03.07	16	Walikota	PKPT belum sepenuhnya berbasis risiko	Pelaksanaan pengawasan tidak tepat sasaran
8	Manajemen kepegawaian yang belum baik	RSP.23.29.09.03.08	14	Walikota	Distribusi tugas dan fungsi pada struktur organisasi inspektorat belum memadai	Tumpang tindih pelaksanaan tugas
9	Kinerja pemerintah daerah belum sepenuhnya diukur dengan ekonomis, efektivitas, dan efisiensi	RSP.23.29.09.03.09	19	Walikota	Pengawasan belum sepenuhnya melakukan penilaian pada tingkat efisien, efektif, dan ekonomis pada kinerja perangkat daerah	Tidak tercapainya target kinerja pemerintah daerah
10	Sinergitas pengawasan dengan pihak lain belum maksimal	RSP.23.29.09.03.10	14	Walikota	Koordinasi dengan pihak internal dan eksternal yang masih kurang	Pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah yang terhambat
11	Akses informasi untuk kebutuhan pengawasan masih terbatas	RSP.23.29.09.03.11	19	Walikota	Keengganan perangkat daerah memberikan beberapa informasi terkait objek pengawasan	Pelaksanaan pengawasan oleh pihak internal maupun eksternal terhambat
<b>IX BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH</b>						
1	Perangkat Daerah tidak merespon hasil riset	RSP.23.35.09.29.01	25	Walikota	Pemahaman SDM OPD tentang Hasil Riset yang masih kurang	Kinerja tidak meningkat
2	Rekomendasi hasil Riset tidak dimanfaatkan Perangkat Daerah dan Masyarakat	RSP.23.35.09.29.02	24	Walikota	Kemampuan menggunakan Teknologi yang belum memadai	Kinerja tidak meningkat
3	Pemahaman terkait Riset terbatas hanya pada Pemenuhan Penelitian	RSP.23.35.09.29.03	25	Walikota	Kurangnya Pejabat Fungsional yang fokus menangani riset dan inovasi.	Kinerja tidak meningkat

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
4	Pengimplementasian inovasi tidak dimanfaatkan Perangkat Daerah atau Masyarakat	RSP.23.35.09.29.04	19	Walikota	Sarana dan Prasarana masih terbatas	Kinerja tidak meningkat
		RSP.23.35.09.29.05	14		Kurangnya sosialisasi	Kinerja tidak meningkat
5	Peluang implemtasi inovasi yang telah dibuat oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat tidak dilaksanakan	RSP.23.35.09.29.06	19	Walikota	Kurangnya kesadaran Perangkat Daerah dan Masyarakat dalam memanfaatkan hasil inovasi	Kinerja tidak meningkat
6	Peluang implemtasi inovasi yang telah dibuat oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat tidak dilaksanakan	RSP.23.35.09.29.07	17	Walikota	Adanya Perubahan Kebijakan	Kinerja tidak meningkat

## Daftar Risiko Prioritas

<b>Nama Pemda : Kota Bima</b> <b>Tahun Penilaian : 2023</b> <b>Tujuan Strategis IV : Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman</b> <b>Sasaran Strategis X : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman</b> <b>Urusan Pemerintah :</b>						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
<b>I DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>						
1	Kebijakan Peruntukan lahan yang belum berpihak pada meningkatnya kualitas lingkungan hidup	RSP.23.10.10.15.01	25	Walikota	analisis dampak atau kajian sebelum membuat kebijakan yang dilakukan belum dilakukan secara maksimal	Kesalahan peruntukan lahan
2	Kebijakan Peruntukan lahan yang belum berpihak pada meningkatnya kualitas lingkungan hidup	RSP.23.10.10.15.02	24	Walikota	Kurangnya ketaatan terhadap dokumen tata ruang	Alih fungsi lahan
3	Kebijakan Peruntukan lahan yang belum berpihak pada meningkatnya kualitas lingkungan hidup	RSP.23.10.10.15.03	19	Walikota	Tidak adanya koordinasi dengan dinas terkait	Penanganan kualitas lingkungan hidup menjadi parsial
4	Kualitas air dikota bima yang semakin menurun	RSP.23.10.10.15.04	25	Walikota	Perilaku hidup masyarakat yang belum sehat	Bakteri Ecoli meningkat
5	Kualitas air dikota bima yang semakin menurun	RSP.23.10.10.15.05	16	Walikota	Pelaku usaha yang belum taat pada UKL dan UPL/SPPL	Pencemaran air, tanah, dan udara
6	Kualitas air dikota bima yang semakin menurun	RSP.23.10.10.15.06	17	Walikota	Koordinasi pengelolaan kualitas air yang masih rendah	Penanganan kualitas lingkungan hidup menjadi parsial
7	Kualitas air dikota bima yang semakin menurun	RSP.23.10.10.15.07	23	Walikota	Meningkatnya kadar NOX SOX	Pencemaran udara
8	Kualitas air dikota bima yang semakin menurun	RSP.23.10.10.15.08	25	Walikota	Vegetasi yang berkurang	Peningkatan Suhu
<b>II DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						
1	Data Pemanfaatan Ruang tidak optimal	RSP.23.03.10.06.01	19	Walikota	Hasil Gambar citra Satelit tidak terbaharui	Tidak dapat menyandingkan kondisi eksisting dengan kondisi rencana
2	Data Pemanfaatan Ruang tidak optimal	RSP.23.03.10.06.02	19	Walikota	Cakupan penilaian pemanfaatan ruang masih luas	Informasi pemanfaatan ruang tidak terdeteksi secara optimal

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
3	Izin Mendirikan Bangunan tidak sesuai dengan pemanfaatan Ruang	RSP.23.03.10.06.03	19	Walikota	Kesadaran masyarakat akan pemanfaatan ruang masih rendah	Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan pola ruang
4	Pelaporan kinerja yang belum maksimal	RSP.23.03.10.06.04	19	Walikota	Masih kurangnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan pola ruang
5	Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan peruntukkan	RSP.23.03.10.06.05	19	Walikota	Konflik Kepemilikan Lahan	Berkurangnya Luasan Ruang terbuka Hijau
<b>III KECAMATAN</b>						
1	Masyarakat belum mendapatkan akses air bersih yang memadai	RSP.23.32.10.31.01	19	Walikota	penanganan dampak bencana yang belum dilakukan secara optimal	menurunnya kesehatan masyarakat
2	Masyarakat belum mendapatkan akses air bersih yang memadai	RSP.23.32.10.31.02	19	Walikota	debit air yang semakin berkurang	tidak terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat
3	Peningkatan luasan kawasan kumuh di kec. rasanae timur	RSP.23.32.10.31.03	19	Walikota	sampah dan sanitasi dalam kondisi yang tidak baik	menurunnya kondisi kesehatan masyarakat
4	Peningkatan luasan kawasan kumuh di kec. rasanae timur	RSP.23.32.10.31.04	19	Walikota	kesadaran masyarakat yang masih kurang	kualitas lingkungan semakin menurun
5	Peningkatan luasan kawasan kumuh di kec. rasanae timur	RSP.23.32.10.31.05	19	Walikota	sarpras yang masih kurang	tidak teratasinya masalah persampahan masyarakat
6	Peningkatan luasan kawasan kumuh di kec. rasanae timur	RSP.23.32.10.31.06	14	Walikota	pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukan	meningkatnya pencemaran lingkungan
<b>IV DINAS KESEHATAN</b>						
1	Jumlah Kematian yang tinggi dibawah UHH yang ditetapkan	RSP.23.02.10.05.01	19	Walikota Bima	Kejadian Luar biasa (Wabah)	Kematian akibat wabah meningkat
2	Kondisi Lingkungan masyarakat buruk	RSP.23.02.10.05.02	23	Walikota	pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam menjalankan hidup sehat rendah	masyarakat rentan terhadap penyakit
<b>V DINASPERHUBUNGAN</b>						
1	Jalan yang tidak sesuai standar	RSP.23.13.10.17.01	25	Walikota	lebar jalan yang tidak sesuai standar	tingkat kepadatan lalu lintas meningkat
2	Area parkir yang tidak sesuai standar	RSP.23.13.10.17.02	24	Walikota	kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap area parkir yang masih kurang	kepadatan jalan pada titik tertentu

## Daftar Risiko Prioritas

**Nama Pemda** : Kota Bima  
**Tahun Penilaian** : 2023  
**Tujuan Strategis IV** : Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman  
**Sasaran Strategis XI** : Meningkatnya Kemantapan Infrastruktur  
**Urusan Pemerintah** :

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
<b>I DINAS PERHUBUNGAN</b>						
1	Jalan yang tidak sesuai standar	RSP.23.13.11.17.01	25	Walikota	lebar jalan yang tidak sesuai standar	tingkat kepadatan lalu lintas meningkat
2	Jalan yang tidak sesuai standar	RSP.23.13.11.17.02	25	Walikota	kepemilikan aset yang bukan kewenangan kota	tidak diintervensi
3	Jalan yang tidak sesuai standar	RSP.23.13.11.17.03	24	Walikota	sarana prasarana jalan yang tidak sesuai standar	tingkat kecelakaan yang meningkat
4	Peningkatan sarana infrastruktur jalan yang tidak tepat sasaran	RSP.23.13.11.17.04	25	Walikota	dokumen tata kelola transportasi yang belum tersedia	pelaksanaan tata kelola lalu lintas terhambat
<b>II DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>						
1	menurunnya kualitas bangunan	RSP.23.04.11.07.01	25	Walikota	meningkatnya masyarakat miskin	meningkatnya jumlah rumah tidak layak huni
2	menurunnya kualitas bangunan	RSP.23.04.11.07.02	19	Walikota	luasan lahan milik masyarakat dibawah standar	Menurunnya kualitas lingkungan hunian
3	Kerusakan bangunan dan gedung	RSP.23.04.11.07.03	22	Walikota	Penanganan Pasca Bencana Kurang Optimal	Kerusakan bangunan dan gedung
4	menurunnya umur ekonomis bangunan	RSP.23.04.11.07.04	14	Walikota	penggunaan material yang tidak memenuhi standar	menurunnya umur ekonomis bangunan
5	Menurunnya kualitas bangunan	RSP.23.04.11.07.05	17	Walikota	pengetahuan tentang konstruksi yang masih kurang	Menurunnya kualitas bangunan
6	Meningkatnya luas kawasan kumuh	RSP.23.04.11.07.06	17	Walikota	kemampuan untuk memiliki hunian baru yang layak huni masih kurang	Meningkatnya luas kawasan kumuh
7	Menurunnya kualitas hidup	RSP.23.04.11.07.07	14	Walikota	kurang adanya kesadaran dari masyarakat	Menurunnya kualitas hidup
8	Terhambatnya pencapaian penurunan kawasan kumuh	RSP.23.04.11.07.08	25	Walikota	kurang adanya sinergi antara perangkat daerah	Terhambatnya pencapaian penurunan kawasan kumuh



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
<b>III DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						
1	Tidak tersedianya Lahan	RSP.23.03.11.06.01	10	Walikota	Konflik kepemilikan Lahan	Terhambatnya Penanganan Peningkatan Jalan
2	Umur Ekonomis Jalan tidak sesuai rencana	RSP.23.03.11.06.02	24	Walikota	Bencana Alam	Kerusakan Jalan
3	Umur Ekonomis Jalan tidak sesuai rencana	RSP.23.03.11.06.03	17	Walikota	Konstruksi yang kurang memadai	Penurunan Kemantapan Jalan
4	Umur Ekonomis Jalan tidak sesuai rencana	RSP.23.03.11.06.04	17	Walikota	SDM Perencana, Pengawas dan Penyedia Jasa belum sesuai standar kompetensi	Kualitas Jalan tidak baik
5	Umur Ekonomis Jalan tidak sesuai rencana	RSP.23.03.11.06.05	19	Walikota	Kurangnya Pemeliharaan	Kualitas Jalan Menurun
6	Umur Ekonomis Jalan tidak sesuai rencana	RSP.23.03.11.06.06	24	Walikota	Pemanfaatan Jalan tidak sesuai Tonase Rencana	Kerusakan Jalan menjadi cepat
7	Perencanaan Kebutuhan tidak tepat sasaran	RSP.23.03.11.06.07	22	Walikota	Tindakan Penanganan tidak sesuai kondisi	Capaian Kinerja tidak maksimal
8	Tidak tersedianya Lahan	RSP.23.03.11.06.08	22	Walikota	Konflik kepemilikan Lahan	Terhambatnya Penanganan Sumber Daya Air
9	Umur Ekonomis Infrastruktur SDA tidak sesuai rencana	RSP.23.03.11.06.09	24	Walikota	Bencana Alam	Kerusakan Infrastruktur SDA
10	Umur Ekonomis Infrastruktur SDA tidak sesuai rencana	RSP.23.03.11.06.10	24	Walikota	Konstruksi yang kurang memadai	Penurunan Kualitas Infrastruktur SDA
11	Umur Ekonomis Infrastruktur SDA tidak sesuai rencana	RSP.23.03.11.06.11	22	Walikota	SDM Perencana, Pengawas dan Penyedia Jasa belum sesuai standar kompetensi	Kualitas Infrastruktur SDA tidak baik
12	Umur Ekonomis Infrastruktur SDA tidak sesuai rencana	RSP.23.03.11.06.12	17	Walikota	Kurangnya Pemeliharaan	Kualitas Infrastruktur SDA menurun
13	Perencanaan Kebutuhan tidak tepat sasaran	RSP.23.03.11.06.13	17	Walikota	Tindakan Penanganan tidak sesuai kondisi	Capaian Kinerja tidak maksimal

### Daftar Risiko Prioritas

<b>Nama Pemda : Kota Bima</b> <b>Tahun Penilaian : 2023</b> <b>Tujuan Strategis IV : Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman</b> <b>Sasaran Strategis XII : Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim</b> <b>Urusan Pemerintah :</b>						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
<b>I BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>						
1	Kebijakan penanganan kebencanaan belum memiliki landasan hukum yang memadai	RSP.23.05.12.30.01	23	Walikota	Dokumen kebencanaan yang belum tersusun secara menyeluruh dan belum diperbaharui tepat waktu	Langkah penanganan bencana menjadi terhambat
2	lambatnya pemulihan pasca bencana	RSP.23.05.12.30.02	23	Walikota	Kolaborasi antar OPD yang masih kurang	Kerusakan yang diakibatkan oleh bencana semakin parah
3	Masyarakat tidak siap menghadapi bencana	RSP.23.05.12.30.03	19	Walikota	masyarakat yang kurang memahami informasi kebencanaan	Jumlah korban yang meningkat
4	Penanganan bencana yang terlambat	RSP.23.05.12.30.04	24	Walikota	peran serta masyarakat yang kurang dalam penanganan bencana	munculnya bencana ikutan
5	Penanganan bencana yang terlambat	RSP.23.05.12.30.05	24	Walikota	Kapasitas dan kapabilitas tim penanggulangan bencana belum memadai	penanganan bencana yang tidak terstruktur
6	Korbn bencana tidak memperoleh haknya dalam penanggulangan kebencanaan	RSP.23.05.12.30.06	19	Walikota	sarana dan prasarana penanggulanagn bencana belum memadai	Munculnya kerawanan sosial
<b>II DINAS SOSIAL</b>						
1	Distribusi bantuan yang terhambat	RSP.23.06.12.08.01	13	Walikota	Akses distribusi ke lokasi terdampak bencana yang terputus	Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana
2	Tidak tertanganinya korban bencana secara maksimal	RSP.23.06.12.08.02	14	Walikota	Tidak tersediannya persediaan logistik	Penanganan bencana yang terhambat
3	Tidak tertanganinya korban bencana secara maksimal	RSP.23.06.12.08.03	14	Walikota	kurangnya koordinasi lintas sektor	Penangan bencana yang tumpang tindih
<b>III SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>						
1	Kejadian yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	RSP.23.05.12.10.01	17	Walikota	Kebijakan ketertiban dan ketentraman masyarakat belum berpihak pada pelaksanaan tugas POL PP	Penegakan PERDA/PERKADA yang tidak optimal
2	Kejadian yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	RSP.23.05.12.10.02	19	Walikota	Sarana dan Prasarana Kurang memadai	pelaksanaan tugas yang tidak optimal

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
<b>IV DINAS PEMADAM KEBAKARAN</b>						
1	Luas Wilayah operasi yang tersebar dengan kontur yang tidak sama	RSP.23.05.12.11.01	24	Walikota	Kondisi Geografis yang tidak mendukung	10 kelurahan tidak terlayani secara maksimal
2	Pelayanan kebakaran tidak maksimal	RSP.23.05.12.11.02	14	Walikota	Kolaborasi pencegahan kebakaran masih minim	tingkat kerugian tidak bisa dieliminir
3	Keterlibatan masyarakat dalam penanganan kebakaran dan non kebakaran masih kurang	RSP.23.05.12.11.03	16	Walikota	Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penanganan kebakaran dan non kebakaran	Tindakan operasi pemadaman kebakaran dan non kebakaran terhambat
4	Inspeksi dan proteksi pencegahan kebakaran belum maksimal	RSP.23.05.12.11.04	23	Walikota	Belum ada payung hukum tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran	pelaksanaan inspeksi sarana proteksi tidak dapat berjalan maksimal
<b>V KECAMATAN</b>						
1	Pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran	RSP.23.32.12.31.01	19	Walikota	pemerataan pemberian bantuan yang tidak proposional	pengentasan kemiskinan akan terhambat
2	Masyarakat belum mendapatkan akses air bersih yang memadai	RSP.23.32.12.31.02	19	Walikota	penanganan dampak bencana yang belum dilakukan secara optimal	menurunnya kesehatan masyarakat

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
7	Keterlibatan masyarakat dalam penanganan kebakaran dan non kebakaran masih kurang	RSP.23.05.13.11.07	16	Walikota	Perilaku masyarakat yang masih tidak tepat dalam penanganan kebakaran dan non kebakaran	Tindakan operasi pemadaman kebakaran dan non kebakaran terhambat
8	Kecelakaan Lalu Lintas dalam penanganan Kebakaran dan non kebakaran	RSP.23.05.13.11.08	14	Walikota	Kesadaran Masyarakat pengguna Jalan masih kurang	Terhambatnya operasi pemadaman kebakaran dan non kebakaran
9	Inspeksi dan proteksi pencegahan kebakaran belum maksimal	RSP.23.05.13.11.09	23	Walikota	Belum ada payung hukum tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran	pelaksanaan inspeksi sarana proteksi tidak dapat berjalan maksimal
10	Kecelakaan kerja SDM pemadam sering terjadi	RSP.23.05.13.11.10	25	Walikota	Sarana prasarana yang tidak sesuai standar	Terhambatnya pelayanan

PJ. WALIKOTA BIMA



MOHAMMAD RUM

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA  
 NOMOR : 188.45/669/7001 X 12023  
 TENTANG  
 PENETAPAN REGISTER RISIKO, PETA RISIKO, DAN RENCANA  
 TINDAK PENGENDALIAN SASARAN STRATEGIS RENCANA  
 PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BIMA  
 TAHUN 2024-2026

PETA RISIKO

Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

			Tingkat Dampak				
			1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
Tingkat Frekuensi	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23 RSP.23.09.01.14.06 RSP.23.09.01.14.07 RSP.23.09.01.14.08 RSP.23.09.01.14.09 RSP.23.09.01.14.10 RSP.23.09.01.14.11	25 RSP.23.09.01.14.01 RSP.23.09.01.14.02 RSP.23.09.01.14.03 RSP.23.09.01.14.04 RSP.23.09.01.14.05 RSP.23.04.01.07.03
	4	Sering Terjadi	6	12	16 RSP.23.03.01.06.05	19 RSP.23.02.01.05.01 RSP.23.02.01.05.03 RSP.23.12.01.13.01 RSP.23.09.01.14.12 RSP.23.09.01.14.13 RSP.23.09.01.14.14 RSP.23.09.01.14.15 RSP.23.09.01.14.16 RSP.23.08.01.12.01 RSP.23.03.01.06.01 RSP.23.03.01.06.03	24 RSP.23.02.01.05.02 RSP.23.02.01.05.04 RSP.23.03.01.06.02 RSP.23.03.01.06.07
	3	Kadang Terjadi	4	10	14 RSP.23.12.01.13.04 RSP.23.06.01.08.01 RSP.23.04.01.07.02	17 RSP.23.12.01.13.03 RSP.23.04.01.07.01 RSP.23.03.01.06.04	22 RSP.23.03.01.06.06
	2	Jarang Terjadi	2	7 RSP.23.12.01.13.02	11	13 RSP.23.12.01.13.05	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 s.d 25	Merah
Tinggi (4)	16 s.d 19	Orange
Sedang (3)	12 s.d 15	Kuning
Rendah (2)	6 s.d 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 s.d 5	Biru

## PETA RISIKO

### Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan

			Tingkat Dampak				
			1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
Tingkat Frekuensi	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23 RSP.23.08.02.12.02	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16 RSP.23.08.02.12.03 RSP.23.08.02.12.06 RSP.23.08.02.12.07	19 RSP.23.01.02.04.02 RSP.23.21.02.21.01 RSP.23.21.02.21.02 RSP.23.08.02.12.09	24 RSP.23.21.02.21.03
	3	Kadang Terjadi	4	10 RSP.23.08.02.12.01 RSP.23.08.02.12.04 RSP.23.08.02.12.10	14 RSP.23.08.02.12.08 RSP.23.08.02.12.11	17 RSP.23.01.02.04.01 RSP.23.01.02.04.03 RSP.23.01.02.04.04 RSP.23.01.02.04.07 RSP.23.01.02.04.09	22 RSP.23.01.02.04.08 RSP.23.01.02.04.10 RSP.23.01.02.04.11 RSP.23.01.02.04.12
	2	Jarang Terjadi	2	7 RSP.23.08.02.12.05	11	13 RSP.23.01.02.04.05 RSP.23.01.02.04.06	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 s.d 25	Merah
Tinggi (4)	16 s.d 19	Orange
Sedang (3)	12 s.d 15	Kuning
Rendah (2)	6 s.d 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 s.d 5	Biru

## PETA RISIKO

### Sasaran 3 Meningkatnya Standar Hidup Masyarakat

			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
T i n g k a t  F r e k u e n s i	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18 RSP.23.23.03.22.14	23 RSP.23.07.03.09.03 RSP.23.07.03.09.08 RSP.23.25.03.24.04 RSP.23.08.03.12.05	25 RSP.23.24.03.23.03 RSP.23.23.03.22.01 RSP.23.23.03.22.12 RSP.23.07.03.09.05 RSP.23.07.03.09.09 RSP.23.25.03.24.02 RSP.23.25.03.24.03
	4	Sering Terjadi	6	12	16 RSP.23.26.03.19.12 RSP.23.15.03.19.13 RSP.23.23.03.22.02 RSP.23.23.03.22.07 RSP.23.07.03.09.01 RSP.23.08.03.12.01 RSP.23.08.03.12.06 RSP.23.08.03.12.09 RSP.23.08.03.12.10	19 RSP.23.26.03.19.07 RSP.23.24.03.23.02 RSP.23.07.03.09.02 RSP.23.07.03.09.07 RSP.23.08.03.12.12	24 RSP.23.23.03.22.08 RSP.23.07.03.09.04 RSP.23.07.03.09.06 RSP.23.25.03.24.01
	3	Kadang Terjadi	4	10 RSP.23.26.03.19.09 RSP.23.26.03.19.11 RSP.23.08.03.12.04 RSP.23.08.03.12.07 RSP.23.08.03.12.13	14 RSP.23.27.03.19.05 RSP.23.27.03.19.06 RSP.23.26.03.19.08 RSP.23.26.03.19.10 RSP.23.15.03.19.15 RSP.23.15.03.19.16 RSP.23.24.03.23.04 RSP.23.24.03.23.07 RSP.23.23.03.22.09 RSP.23.23.03.22.13 RSP.23.23.03.22.15 RSP.23.08.03.12.02 RSP.23.08.03.12.03 RSP.23.08.03.12.11	17 RSP.23.15.03.19.14 RSP.23.15.03.19.17 RSP.23.24.03.23.05 RSP.23.24.03.23.06 RSP.23.23.03.22.03 RSP.23.23.03.22.04 RSP.23.23.03.22.05 RSP.23.23.03.22.11	22 RSP.23.24.03.23.01 RSP.23.23.03.22.06
	2	Jarang Terjadi	2	7 RSP.23.27.03.19.04 RSP.23.23.03.22.10 RSP.23.08.03.12.08	11 RSP.23.27.03.19.03	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

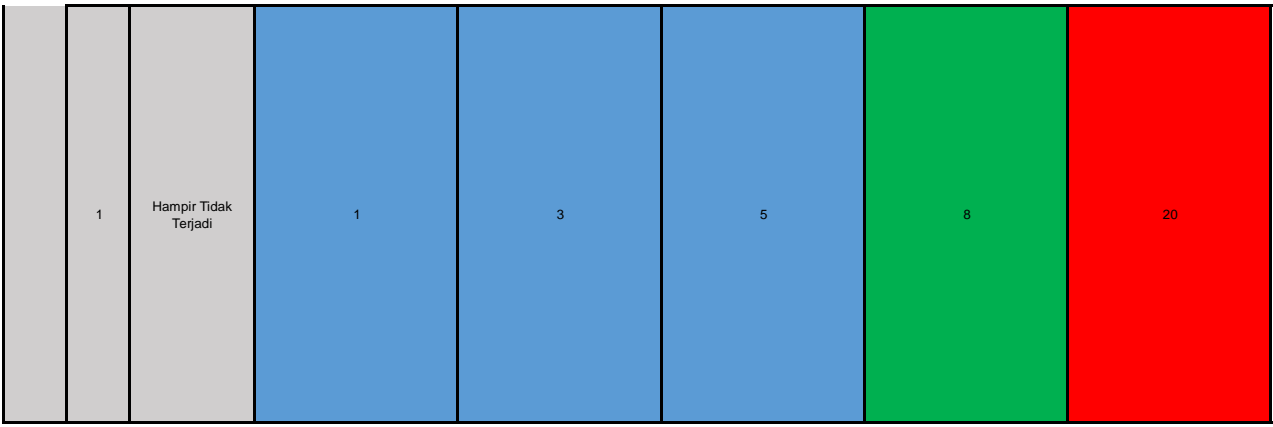
Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 s.d 25	Merah
Tinggi (4)	16 s.d 19	Orange
Sedang (3)	12 s.d 15	Kuning
Rendah (2)	6 s.d 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 s.d 5	Biru

## PETA RISIKO

### Sasaran 4 Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat

			Tingkat Dampak				
			1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
Tingkat Frekuensi	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18 RSP.23.23.04.22.14	23 RSP.23.25.04.24.06 RSP.23.09.04.14.13 RSP.23.09.04.14.14 RSP.23.09.04.14.15	25 RSP.23.23.04.22.01 RSP.23.23.04.22.12 RSP.23.25.04.24.04 RSP.23.25.04.24.05 RSP.23.03.04.06.01
	4	Sering Terjadi	6	12	16 RSP.23.23.04.22.02 RSP.23.23.04.22.07 RSP.23.03.04.06.07 RSP.23.26.04.19.05	19 RSP.23.23.04.22.16 RSP.23.23.04.22.17 RSP.23.25.04.24.02 RSP.23.25.04.24.03 RSP.23.09.04.14.01 RSP.23.09.04.14.02 RSP.23.09.04.14.03 RSP.23.09.04.14.04 RSP.23.09.04.14.05 RSP.23.09.04.14.06 RSP.23.09.04.14.07 RSP.23.09.04.14.08 RSP.23.09.04.14.09 RSP.23.09.04.14.10 RSP.23.09.04.14.11 RSP.23.09.04.14.12 RSP.23.09.04.14.16 RSP.23.09.04.14.17 RSP.23.09.04.14.18 RSP.23.09.04.14.19 RSP.23.09.04.14.20 RSP.23.03.04.06.03 RSP.23.03.04.06.05	24 RSP.23.23.04.22.08 RSP.23.25.04.24.01 RSP.23.03.04.06.04
	3	Kadang Terjadi	4	10 RSP.23.26.04.19.04	14 RSP.23.23.04.22.09 RSP.23.23.04.22.13 RSP.23.23.04.22.15 RSP.23.27.04.19.01 RSP.23.27.04.19.02 RSP.23.26.04.19.03	17 RSP.23.23.04.22.03 RSP.23.23.04.22.04 RSP.23.23.04.22.05 RSP.23.23.04.22.11 RSP.23.03.04.06.02 RSP.23.03.04.06.06	22 RSP.23.23.04.22.06 RSP.23.03.04.06.08
	2	Jarang Terjadi	2	7 RSP.23.23.04.22.10	11	13	21





Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 s.d 25	Merah
Tinggi (4)	16 s.d 19	Orange
Sedang (3)	12 s.d 15	Kuning
Rendah (2)	6 s.d 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 s.d 5	Biru





## PETA RISIKO

### Sasaran 5 Meningkatnya Pemberdayaan Gender dan Pemuda

			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Frekuensi	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16 RSP.23.08.05.12.04	19 RSP.23.17.05.04.01 RSP.23.17.05.04.02 RSP.23.12.05.13.01 RSP.23.02.05.05.02	24 RSP.23.02.05.05.01
	3	Kadang Terjadi	4	10	14 RSP.23.08.05.12.01 RSP.23.08.05.12.03 RSP.23.08.05.12.05 RSP.23.08.05.12.06 RSP.23.12.05.13.04	17 RSP.23.17.05.04.03 RSP.23.17.05.04.04 RSP.23.17.05.04.05 RSP.23.06.05.08.01 RSP.23.12.05.13.03	22
	2	Jarang Terjadi	2	7 RSP.23.12.05.13.02	11 RSP.23.08.05.12.02	13 RSP.23.12.05.13.05	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 s.d 25	Merah
Tinggi (4)	16 s.d 19	Orange
Sedang (3)	12 s.d 15	Kuning
Rendah (2)	6 s.d 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 s.d 5	Biru

## PETA RISIKO

### Sasaran 6 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

			Tingkat Dampak				
			1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
T i n g k a t  F r e k u e n s i	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18 RSP.23.23.06.22.14	23 RSP.23.25.06.24.06	25 RSP.23.13.06.17.01 RSP.23.13.06.17.02 RSP.23.13.06.17.04 RSP.23.23.06.22.01 RSP.23.23.06.22.12 RSP.23.25.06.24.04 RSP.23.25.06.24.05 RSP.23.10.06.15.01
	4	Sering Terjadi	6	12	16 RSP.23.26.06.19.12 RSP.23.15.06.19.13 RSP.23.23.06.22.02 RSP.23.23.06.22.07 RSP.23.05.06.10.04	19 RSP.23.26.06.19.07 RSP.23.25.06.24.02 RSP.23.25.06.24.03 RSP.23.16.06.20.01 RSP.23.16.06.20.02 RSP.23.16.06.20.03 RSP.23.03.06.06.02 RSP.23.24.06.23.02 RSP.23.05.06.10.02	24 RSP.23.13.06.17.03 RSP.23.13.06.17.05 RSP.23.23.06.22.08 RSP.23.25.06.24.01 RSP.23.16.06.20.05 RSP.23.03.06.06.01 RSP.23.24.06.23.03 RSP.23.24.06.23.05 RSP.23.10.06.15.02
	3	Kadang Terjadi	4	10 RSP.23.26.06.19.09 RSP.23.26.06.19.11	14 RSP.23.27.06.19.01 RSP.23.27.06.19.05 RSP.23.27.06.19.06 RSP.23.26.06.19.08 RSP.23.26.06.19.10 RSP.23.15.06.19.15 RSP.23.15.06.19.16 RSP.23.23.06.22.09 RSP.23.23.06.22.13 RSP.23.23.06.22.15 RSP.23.24.06.23.04 RSP.23.24.06.23.07	17 RSP.23.15.06.19.14 RSP.23.15.06.19.17 RSP.23.23.06.22.03 RSP.23.23.06.22.04 RSP.23.23.06.22.05 RSP.23.23.06.22.11 RSP.23.03.06.06.03 RSP.23.03.06.06.04 RSP.23.24.06.23.06 RSP.23.05.06.10.01	22 RSP.23.23.06.22.06 RSP.23.16.06.20.04 RSP.23.24.06.23.01
	2	Jarang Terjadi	2	7 RSP.23.27.06.19.04 RSP.23.23.06.22.10	11 RSP.23.27.06.19.02 RSP.23.27.06.19.03 RSP.23.05.06.10.03	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 s.d 25	Merah
Tinggi (4)	16 s.d 19	Orange
Sedang (3)	12 s.d 15	Kuning
Rendah (2)	6 s.d 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 s.d 5	Biru

## PETA RISIKO

### Sasaran 7 Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan

			Tingkat Dampak				
			1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
<b>T i n g k a t  F r e k u e n s i</b>	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23 RSP.23.07.07.09.02 RSP.23.07.07.09.04 RSP.23.07.07.09.09 RSP.23.07.07.09.13 RSP.23.07.07.09.15 RSP.23.07.07.09.16 RSP.23.07.07.09.19	25 RSP.23.07.07.09.03 RSP.23.07.07.09.06 RSP.23.07.07.09.10 RSP.23.07.07.09.17
	4	Sering Terjadi	6	12	16 RSP.23.07.07.09.11	19 RSP.23.07.07.09.08 RSP.23.07.07.09.12 RSP.23.07.07.09.18 RSP.23.07.07.09.20 RSP.23.16.07.20.01 RSP.23.16.07.20.02 RSP.23.16.07.20.03	24 RSP.23.07.07.09.01 RSP.23.07.07.09.07 RSP.23.07.07.09.14 RSP.23.16.07.20.05
	3	Kadang Terjadi	4	10	14	17	22 RSP.23.16.07.20.04
	2	Jarang Terjadi	2	7	11 RSP.23.27.07.19.01 RSP.23.27.07.19.02 RSP.23.27.07.19.03 RSP.23.27.07.19.04	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 s.d 25	Merah
Tinggi (4)	16 s.d 19	Orange
Sedang (3)	12 s.d 15	Kuning
Rendah (2)	6 s.d 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 s.d 5	Biru

## PETA RISIKO

### Sasaran 8 Menurunnya Tingkat Kemiskinan

			Tingkat Dampak				
			1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
<b>T i n g k a t  F r e k u e n s i</b>	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25 RSP.23.04.08.07.01 RSP.23.03.08.06.01
	4	Sering Terjadi	6	12	16 RSP.23.02.08.05.01 RSP.23.03.08.06.07 RSP.23.08.08.12.01 RSP.23.32.08.31.01 RSP.23.32.08.31.03	19 RSP.23.03.08.06.03 RSP.23.03.08.06.05 RSP.23.12.08.13.01	24 RSP.23.03.08.06.04 RSP.23.03.08.06.09 RSP.23.03.08.06.11 RSP.23.03.08.06.12
	3	Kadang Terjadi	4	10 RSP.23.06.08.08.01	14 RSP.23.06.08.08.02 RSP.23.06.08.08.05 RSP.23.04.08.07.03 RSP.23.08.08.12.02 RSP.23.08.08.12.03 RSP.23.32.08.31.02 RSP.23.12.08.13.04	17 RSP.23.01.08.04.01 RSP.23.01.08.04.02 RSP.23.04.08.07.04 RSP.23.03.08.06.02 RSP.23.03.08.06.06 RSP.23.03.08.06.14 RSP.23.03.08.06.15 RSP.23.12.08.13.03	22 RSP.23.04.08.07.02 RSP.23.03.08.06.08 RSP.23.03.08.06.10 RSP.23.03.08.06.13
	2	Jarang Terjadi	2	7 RSP.23.06.08.08.03 RSP.23.06.08.08.04 RSP.23.12.08.13.02	11	13 RSP.23.12.08.13.05	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 s.d 25	Merah
Tinggi (4)	16 s.d 19	Orange
Sedang (3)	12 s.d 15	Kuning
Rendah (2)	6 s.d 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 s.d 5	Biru

## PETA RISIKO

### Sasaran 9 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

			Tingkat Dampak				
			1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
Tingkat Frekuensi	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18 RSP.23.28.09.26.11	23 RSP.23.28.09.26.02 RSP.23.28.09.26.12 RSP.23.32.09.31.01	25 RSP.23.14.09.18.01 RSP.23.14.09.18.02 RSP.23.14.09.18.03 RSP.23.14.09.18.08 RSP.23.14.09.18.09 RSP.23.14.09.18.14 RSP.23.31.09.27.05 RSP.23.35.09.29.01 RSP.23.35.09.29.03
	4	Sering Terjadi	6	12	16 RSP.23.28.09.26.06 RSP.23.28.09.26.15 RSP.23.11.09.16.06 RSP.23.16.09.20.07 RSP.23.32.09.31.02 RSP.23.29.09.03.06 RSP.23.29.09.03.07	19 RSP.23.28.09.26.09 RSP.23.28.09.26.13 RSP.23.28.09.26.14 RSP.23.33.09.01.09 RSP.23.14.09.18.04 RSP.23.14.09.18.05 RSP.23.14.09.18.07 RSP.23.14.09.18.10 RSP.23.14.09.18.12 RSP.23.28.09.25.04 RSP.23.31.09.27.01 RSP.23.31.09.27.03 RSP.23.32.09.31.03 RSP.23.32.09.31.05 RSP.23.32.09.31.06 RSP.23.32.09.31.07 RSP.23.32.09.31.08 RSP.23.32.09.31.09 RSP.23.32.09.31.10 RSP.23.32.09.31.11 RSP.23.32.09.31.12 RSP.23.32.09.31.13 RSP.23.29.09.03.03 RSP.23.29.09.03.04 RSP.23.29.09.03.09 RSP.23.29.09.03.11 RSP.23.35.09.29.04 RSP.23.35.09.29.06	24 RSP.23.33.09.01.08 RSP.23.14.09.18.06 RSP.23.14.09.18.11 RSP.23.14.09.18.13 RSP.23.31.09.27.04 RSP.23.35.09.29.02
	3	Kadang Terjadi	4 RSP.23.28.09.26.10	10	14 RSP.23.28.09.26.03 RSP.23.28.09.26.07 RSP.23.28.09.26.08 RSP.23.16.09.20.03 RSP.23.32.09.31.14 RSP.23.29.09.03.01 RSP.23.29.09.03.02 RSP.23.29.09.03.05 RSP.23.29.09.03.08 RSP.23.29.09.03.10 RSP.23.35.09.29.05	17 RSP.23.28.09.26.01 RSP.23.28.09.26.04 RSP.23.28.09.26.05 RSP.23.33.09.01.01 RSP.23.33.09.01.07 RSP.23.28.09.25.01 RSP.23.28.09.25.02 RSP.23.28.09.25.03 RSP.23.16.09.20.04 RSP.23.16.09.20.05 RSP.23.16.09.20.06 RSP.23.31.09.27.02 RSP.23.32.09.31.04 RSP.23.35.09.29.07	22 RSP.23.33.09.01.02 RSP.23.33.09.01.03 RSP.23.11.09.16.02



	2	Jarang Terjadi	2	7 RSP.23.11.09.16.04	11 RSP.23.33.09.01.06 RSP.23.11.09.16.03	13 RSP.23.33.09.01.04 RSP.23.11.09.16.01 RSP.23.11.09.16.07 RSP.23.16.09.20.02	21 RSP.23.33.09.01.05
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8 RSP.23.16.09.20.01	20 RSP.23.11.09.16.05 RSP.23.11.09.16.08

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 s.d 25	Merah
Tinggi (4)	16 s.d 19	Orange
Sedang (3)	12 s.d 15	Kuning
Rendah (2)	6 s.d 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 s.d 5	Biru

## PETA RISIKO

### Sasaran 10 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman

			Tingkat Dampak				
			1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
T i n g k a t  F r e k u e n s i	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23 RSP.23.10.10.15.07 RSP.23.02.10.05.02	25 RSP.23.10.10.15.01 RSP.23.10.10.15.04 RSP.23.10.10.15.08 RSP.23.13.10.17.01
	4	Sering Terjadi	6	12	16 RSP.23.10.10.15.05	19 RSP.23.10.10.15.03 RSP.23.03.10.06.01 RSP.23.03.10.06.02 RSP.23.03.10.06.03 RSP.23.03.10.06.04 RSP.23.03.10.06.05 RSP.23.32.10.31.01 RSP.23.32.10.31.02 RSP.23.32.10.31.03 RSP.23.32.10.31.04 RSP.23.32.10.31.05 RSP.23.02.10.05.01	24 RSP.23.10.10.15.02 RSP.23.13.10.17.02
	3	Kadang Terjadi	4	10	14 RSP.23.32.10.31.06	17 RSP.23.10.10.15.06	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 s.d 25	Merah
Tinggi (4)	16 s.d 19	Orange
Sedang (3)	12 s.d 15	Kuning
Rendah (2)	6 s.d 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 s.d 5	Biru

## PETA RISIKO

### Sasaran 11 Meningkatnya Kemantapan Infrastruktur

			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
<b>T i n g k a t  F r e q u e n s i</b>	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25 RSP.23.13.11.17.01 RSP.23.13.11.17.02 RSP.23.13.11.17.04 RSP.23.04.11.07.01 RSP.23.04.11.07.08
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19 RSP.23.04.11.07.02 RSP.23.03.11.06.05	24 RSP.23.13.11.17.03 RSP.23.03.11.06.02 RSP.23.03.11.06.06 RSP.23.03.11.06.09 RSP.23.03.11.06.10
	3	Kadang Terjadi	4	10 RSP.23.03.11.06.01	14 RSP.23.04.11.07.04 RSP.23.04.11.07.07	17 RSP.23.04.11.07.05 RSP.23.04.11.07.06 RSP.23.03.11.06.03 RSP.23.03.11.06.04 RSP.23.03.11.06.12 RSP.23.03.11.06.13	22 RSP.23.04.11.07.03 RSP.23.03.11.06.07 RSP.23.03.11.06.08 RSP.23.03.11.06.11
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 s.d 25	Merah
Tinggi (4)	16 s.d 19	Orange
Sedang (3)	12 s.d 15	Kuning
Rendah (2)	6 s.d 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 s.d 5	Biru

## PETA RISIKO

### Sasaran 12 Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

			Tingkat Dampak				
			1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
<b>T i n g k a t</b>	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23 RSP.23.05.12.30.01 RSP.23.05.12.30.02 RSP.23.05.12.11.04	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16 RSP.23.05.12.11.03	19 RSP.23.05.12.30.03 RSP.23.05.12.30.06 RSP.23.05.12.10.02 RSP.23.32.12.31.01 RSP.23.32.12.31.02	24 RSP.23.05.12.30.04 RSP.23.05.12.30.05 RSP.23.05.12.11.01
	3	Kadang Terjadi	4	10	14 RSP.23.06.12.08.02 RSP.23.06.12.08.03 RSP.23.05.12.11.02	17 RSP.23.05.12.10.01	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13 RSP.23.06.12.08.01	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 s.d 25	Merah
Tinggi (4)	16 s.d 19	Orange
Sedang (3)	12 s.d 15	Kuning
Rendah (2)	6 s.d 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 s.d 5	Biru

## PETA RISIKO

### Sasaran 13 Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban

			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Frekuensi	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18 RSP 23.32.13.31.03	23 RSP 23.34.13.28.01 RSP 23.34.13.28.09 RSP 23.05.13.11.09	25 RSP 23.34.13.28.06 RSP 23.34.13.28.08 RSP 23.05.13.11.02 RSP 23.05.13.11.10
	4	Sering Terjadi	6	12	16 RSP 23.32.13.31.01 RSP 23.32.13.31.02 RSP 23.32.13.31.05 RSP 23.32.13.31.06 RSP 23.05.13.10.01 RSP 23.05.13.10.06 RSP 23.05.13.11.03 RSP 23.05.13.11.06 RSP 23.05.13.11.07	19 RSP 23.32.13.31.04 RSP 23.05.13.10.04 RSP 23.05.13.10.07 RSP 23.34.13.28.02 RSP 23.34.13.28.07	24 RSP 23.34.13.28.04 RSP 23.05.13.11.01 RSP 23.05.13.11.04
	3	Kadang Terjadi	4	10	14 RSP 23.05.13.10.02 RSP 23.34.13.28.05 RSP 23.05.13.11.05 RSP 23.05.13.11.08	17 RSP 23.05.13.10.03 RSP 23.34.13.28.03	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11 RSP 23.05.13.10.05	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 s.d 25	Merah
Tinggi (4)	16 s.d 19	Orange
Sedang (3)	12 s.d 15	Kuning
Rendah (2)	6 s.d 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 s.d 5	Biru

PJ. WALIKOTA BIMA



MOHAMMAD RUM

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA  
 NOMOR : 188.45/G69/17001 X 12023  
 TENTANG  
 PENETAPAN REGISTER RISIKO, PETA RISIKO DAN RENCANA TINDAK  
 PENGENDALIAN SASARAN STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
 PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN 2024-2026

Daftar Rencana Tindak Pengendalian

<b>Nama Pemda : Kota Bima</b> <b>Tahun Penilaian : 2023</b> <b>Tujuan Strategis I : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing</b> <b>Sasaran Strategis I : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat</b> <b>Urusan Pemerintah :</b>							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>DINAS KESEHATAN</b>						
1	Jumlah Kematian yang tinggi dibawah UHH yang ditetapkan	RSP.23.02.01.05.01	Adanya tim TGC di setiap PKM	Kompetensi petugas yang masih kurang	Pelatihan HDP tingkat Kota Bima	Kepala Dinas	Apr-24
			Adanya klaster kesehatan untuk kejadian bencana	Belum tersusunnya health disaster plan lingkup Pemerintah Kota Bima	Menyusun dokumen HDP	Kepala Dinas	Jun-24
			Adanya sistim deteksi cepat terhadap peningkatan kejadian penyakit	Kesadaran masyarakat terkait vaksinasi masih kurang	Simulasi HDP	Kepala Dinas	Okt-24
			Adanya laboratorium daerah yang dapat melakukan pemeriksaan terhadap spesimen KLB				
			Tersedianya vaksin untuk beberapa penyakit terkait PD3I				

### Daftar Rencana Tindak Pengendalian

<b>Nama Pemda : Kota Bima</b> <b>Tahun Penilaian : 2023</b> <b>Tujuan Strategis I : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing</b> <b>Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kualitas Pendidikan</b> <b>Urusan Pemerintah :</b>							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>							
1	Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang kurang memadai	RSP.23.01.02.04.01	Melakukan upaya sosialisasi kepada guru terkait linearitas pendidikan	Peserta sosialisasi tidak hadir maksimal	Melakukan Pendampingan ke sekolah	Kadis	Triwulan I 2024
2	Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang kurang memadai	RSP.23.01.02.04.02	Melakukan pelatihan penggunaan IT bagi pendidik	Peserta Pelatihan kurang maksimal mengikuti pelatihan, sehingga ilmu yang diperoleh sangat minim	Melakukan Pendampingan ke sekolah	Kadis	Triwulan II 2024
3	Angka partisipasi sekolah rendah	RSP.23.01.02.04.03	Melakukan sosialisasi kepada seluruh kepala sekolah terkait rentang usia peserta didik per jenjang	Kecenderung untuk tidak mengikuti regulasi batasan usia yang ditentukan oleh Kemendikbud	Melakukan Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi ke sekolah terkait pelaksanaan PPDB	Kadis	Triwulan II 2024
4	Angka partisipasi sekolah rendah	RSP.23.01.02.04.04	Memberikan edukasi ke masyarakat melalui kegiatan literasi/gemar baca tulis	Minimnya pengetahuan dan rasa ingin tahu masyarakat terkait pentingnya literasi dan numerasi	Melakukan pendekatan ke masyarakat melalui kerjasama dengan kelurahan terkait literasi dan numerasi	Kadis	Triwulan I 2024
5	Kurangnya kemampuan literasi dan numerasi	RSP.23.01.02.04.05	Redistribusi guru sesuai dengan rasio kebutuhan guru pada satuan pendidikan	Adanya redistribusi guru berbasis kepentingan	Melakukan redistribusi guru dengan mempertimbangkan rasio kebutuhan guru pada masing-masing satuan pendidikan tanpa adanya kepentingan lainnya	Kadis	Triwulan I 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Kurangnya kemampuan literasi dan numerasi	RSP.23.01.02.04.06	Melakukan pengadaan sarana prasarana belajar yang representatif	Kurangnya anggaran melalui dana DAU	Mengajukan usulan pengadaan sarana prasarana melalui Dana DAK Fisik	Kadis	Triwulan I 2024
7	Akreditasi pendidikan masih rendah	RSP.23.01.02.04.07	Meningkatkan kegiatan pendampingan pada satuan pendidikan terkait layanan satuan pendidikan	Kurangnya dokumen pendukung terkait penilaian akreditasi sekolah	Mengingatkan sekolah agar menyiapkan lebih awal dokumen pendukung penilaian akreditasi	Kadis	Triwulan I 2024
8	Akreditasi pendidikan masih rendah	RSP.23.01.02.04.08	Meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui pemberian beasiswa pendidikan bagi guru yang belum linear	beberapa guru tidak ingin melanjutkan studi karena alasan usia	Memberikan sosialisasi kepada guru terkait linearitas pendidikan	Kadis	Triwulan II 2024
9	Iklim keamanan sekolah belum kondusif	RSP.23.01.02.04.09	Mengadakan sosialisasi pada seluruh satuan pendidikan untuk meningkatkan toleransi dalam dunia pendidikan	Peserta sosialisasi tidak maksimal mengikuti sosialisasi sehingga informasi tidak terserap dengan maksimal	Melakukan pendampingan langsung pada satuan pendidikan untuk meningkatkan toleransi dalam dunia pendidikan	Kadis	Triwulan II 2024
10	Iklim keamanan sekolah belum kondusif	RSP.23.01.02.04.10	Menyusun Perwali Tentang Iklim Keamanan Sekolah	belum adanya data terkait daftar sekolah dengan tingkat keamanan kurang	Melakukan pendataan dengan bekerja sama dengan seluruh kelurahan terkait wilayah sekolah dengan tingkat keamanan tinggi	Kadis	Triwulan I 2024
11	Penanganan peserta didik berkebutuhan khusus masih kurang	RSP.23.01.02.04.11	Menyusun SK Penetapan Sekolah Penyelenggara Inklusi di Kota Bima	banyak sekolah yang tidak mendata terkait siswa penyandang inklusi	Mewajibkan sekolah agar melakukan pendataan terhadap siswa penyandang inklusi	Kadis	Triwulan I 2024
12	Penanganan peserta didik berkebutuhan khusus masih kurang	RSP.23.01.02.04.12	Melakukan sosialisasi terkait peserta didik berkebutuhan khusus	Peserta sosialisasi tidak maksimal mengikuti sosialisasi sehingga informasi tidak terserap dengan maksimal	Melakukan pendampingan langsung pada satuan pendidikan yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus	Kadis	Triwulan II 2024



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH</b>							
1	Koleksi Perpustakaan yang belum lengkap	RSP.23.21.02.21.01	Belanja buku sesuai standar	Pengadaan buku yang tidak sesuai kebutuhan	Pendataan kembali buku yang sudah ada	Kepala Dinas	September, Oktober, November dan Desember 2023
2	Perpustakaan yang belum sesuai dengan standar	RSP.23.21.02.21.02	Pembinaan rutin	Kurangnya tenaga yang kompeten	Peningkatan SDM	Kepala Dinas	Januari sampai Desember 2023
3	Masyarakat yang belum terlibat dalam kegiatan sosialisasi	RSP.23.21.02.21.03	Melakukan sosialisasi rutin	Kurangnya Kesadaran masyarakat akan pemanfaatan perpustakaan	Memaksimalkan pelayanan keliling	Kepala Dinas	Januari sampai Desember 2023
<b>III DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>							
1	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.02.12.01	Koordinasi Linsek dengan Dukcapil dan Pokja KLA dalam rangka pemenuhan KIA dan KK	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alur pelayanan dan syarat-syarat pengajuan permohonan pelayanan	MOU dengan Dukcapil dalam rangka pemenuhan KIA dan KK, Rakor dengan Pokja KLA dalam rangka peningkatan pemenuhan nilai KLA	Kepala Dinas	TW I 2024
2	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.02.12.02	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak guna menekan peningkatan angka stanting	Masih kurangkannya pemahaman masyarakat terkait stunting	Meningkatkan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak guna menekan peningkatan angka stanting	Kepala Dinas	TW I Tahun 2024
3	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.02.12.03	Koordinasi dengan lintas sektor melalui pokja KLA guna memenuhi persyaratan KLA	Minimnya pemahaman lintas sektor terhadap pemenuhan indikator KLA	Meningkatkan Advokasi dan sosialisasi terkait KLA pada lintas sektor	Kepala Dinas	TW II Tahun 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.02.12.04	SDM yang memiliki sertifikasi KHA masih sangat terbatas dan belum tersebar pada beberapa lintas sektor terkait	Minimnya pelatihan KHA (Konvensi Hak Anak)	Mengadakan kegiatan pelatihan KHA (konvensi Hak Anak) dan Mengikutsertakan beberapa peserta dari lintas sektor	Kepala Dinas	TW II Tahun 2024
5	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.02.12.05	Pendataan inovasi di beberapa OPD	Minimnya OPD yang memiliki Inovasi	Koordinasi dengan Brides terkait Inovasi dari berbagai OPD	Kepala Dinas	TW III Tahun 2024
6	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.02.12.06	Sosialisasi kawasan tanpa rokok	minimnya kesadaran masyarakat terhadap kawasan tanpa rokok	Meningkatkan sosialisasi dan KIE terkait kawasan tanpa rokok	Kepala Dinas	TW III Tahun 2024
7	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.02.12.07	Pelaksanaan kegiatannya pada Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)	Kegiatan Pelayanan pada Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) belum dimanfaatkan secara maksimal	Menyusun alur pelayanan dan pemanfaatan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) untuk pelayanan kasus kekerasan pada perempuan dan anak	Kepala Dinas	TW III Tahun 2024
8	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.02.12.08	Melakukan MoU dengan pihak BUMN yang ada di Kota Bima	Pihak yang diajak kerjasama masih terbatas pada pihak pemerintah	Meningkatkan kerjasama dengan pihak pemerhati anak baik pada level pemerintah maupun swasta	Kepala Dinas	TW III Tahun 2024
					Penyediaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		TW II Tahun 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.02.12.09	Sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta pencegahan pernikahan usia anak dan Penyediaan layanan pengaduan masyarakat anak dan pendampingan bagi anak	masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta pernikahan usia anak	Meningkatkan koordinasi linsek dan Sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta pencegahan pernikahan usia anak  Penyediaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Kepala Dinas	TW II Tahun 2024  TW II Tahun 2024
10	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.02.12.10	Melaksanakan koordinasi dengan linsek melalui pokja KLA	Linsek belum banyak yang terlibat dalam mendukung KLA	Meningkatkan koordinasi serta monev berkala dengan linsek dalam rangka mendukung pemenuhan nilai KLA	Kepala Dinas	TW III Tahun 2024
11	Pencabutan Penghargaan terhadap Kota Layak Anak	RSP.23.08.02.12.11	Mengeluarkan surat edaran terkait pemenuhan standar keselamatan bagi joki cilik	Masih banyak yang mengabaikan standar keselamatan bagi joki cilik	Memperketat ijin penyelenggaraan bagi kegiatan yang tidak memenuhi standar keselamatan bagi joki cilik	Kepala Dinas	TW I Tahun 2024

## Daftar Rencana Tindak Pengendalian

<b>Nama Pemda : Kota Bima</b> <b>Tahun Penilaian : 2023</b> <b>Tujuan Strategis I : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing</b> <b>Sasaran Strategis III : Meningkatkan Standar Hidup Masyarakat</b> <b>Urusan Pemerintah :</b>							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>							
1	Menurunnya Jumlah investasi	RSP.23.27.03.19.01	Monitoring Harga Barang Kebutuhan Pokok ditingkat pengecer dan ditingkat Distributor	Melaksanakan Operasi Pasar	Kordinasi lintas sektor dengan Bagian Ekonomi, Pertanian, Dinas Ketahanan pangan dan Bulog	Kepala Dinas	Dec-23
2	Menurunnya Jumlah investasi	RSP.23.27.03.19.02	belum ada pengendalian	belum tersedianya regulasi yang berpihak pada investasi	Membuat MOU dengan Pihak Perbankan kemudahan penyaluran permodalan Koperasi dan UMKM	Kepala Dinas	Tahun 2024
3	Menurunnya Jumlah investasi	RSP.23.27.03.19.03	belum ada pengendalian	Data dan Informasi investasi yang belum memadai	Menyusun Data terpadu Koperasi dan UMKM Kota Bima	Kepala Dinas	Tahun 2024
4	Menurunnya Jumlah investasi	RSP.23.27.03.19.04	belum ada pengendalian	Diklat dan Pelatihan yang masih kurang	Diklat/ Pelatihan Perkoperasian	Kepala Dinas	Tahun 2024
5	Menurunnya Jumlah investasi	RSP.23.27.03.19.05	Pembangunan Sarana distribusi Perdagangan	Pemanfaatan sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang ada	Pembangunan sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan bersumber dari Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan RI dan APBD	Kepala Dinas	Tahun 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Menurunnya Jumlah investasi	RSP.23.27.03.19.06	Monitoring Harga Barang Kebutuhan Pokok ditingkat pengecer dan ditingkat Distributor	Pelaksanaan Operasi Pasar	Pembangunan sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan bersumber dari Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan RI dan APBD	Kepala Dinas	Triwulan III Tahun 2024
7	PAD belum maksimal	RSP.23.26.03.19.07	Sosialisasi, Pembinaan dan Pengaawasan terhadap Pelaku Usaha	Melakukan Penindakan terhadap Pelaku Usaha yng tidak taat terhadap pembayaran Retribusi/ Sewa Toko dan Kios	Kordinasi Lintas Sektor dengan Satuan Pol PP	Kepala Dinas	Triwulan I Tahun 2024
8	PAD belum maksimal	RSP.23.26.03.19.08	Optimalisasi Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pelaku Usaha	Pembinaan Berkelanjutan terhadap Pelaku Usaha Pengguna Fasilitas Toko Kios Pemerintah	Penertiban Pelaku Usaha	Kepala Dinas	Triwulan I Tahun 2024
9	PAD belum maksimal	RSP.23.26.03.19.09	Belum ada Pengendalian	Adanya Pedagang Musiman	Memberikan kesempatan kepada pedagang lain untuk menempati lapak pedagang musiman	Kepala Dinas	
10	Terjadi peningkatan inflasi	RSP.23.26.03.19.10	Monitoring Harga Barang Kebutuhan Pokok ditingkat pengecer dan ditingkat Distributor	Pelaksanaan Operasi Pasar	Kordinasi lintas sektor dengan Bagian Ekonomi, Pertanian, Dinas Ketahanan pangan dan Bulog	Kepala Dinas	Januari dan Oktober 2024
11	Terjadi peningkatan inflasi	RSP.23.26.03.19.11	Monitoring Harga Barang Kebutuhan Pokok ditingkat pengecer dan ditingkat Distributor	Pelaksanaan Operasi Pasar	Kordinasi lintas sektor dengan Bagian Ekonomi, Pertanian, Dinas Ketahanan pangan dan Bulog	Kepala Dinas	Januari dan Oktober 2024
12	Terjadi peningkatan inflasi	RSP.23.26.03.19.12	Monitoring Harga Barang Kebutuhan Pokok ditingkat pengecer dan ditingkat Distributor	Pelaksanaan Operasi Pasar	Kordinasi lintas sektor dengan Bagian Ekonomi, Pertanian, Dinas Ketahanan pangan dan Bulog	Kepala Dinas	Januari dan Oktober 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Menurunnya Jumlah Modal Koperasi	RSP.23.15.03.19.13	Diklat Penyusunan SOP dan Peraturan Khusus Koperasi	SDM Pengurus yang masih kurang	pendampingan penyusunan SOP dan peraturan khusus koperasi	Kepala Dinas	Nov-23
14	Menurunnya Jumlah Modal Koperasi	RSP.23.15.03.19.14	Penyuluhan Perkoperasian Kepada kelompok masyarakat	kurangnya informasi dan publikasi tentang koperasi	publikasi informasi perkoperasian melalui media sosial	Kepala Dinas	Nov-23
15	Menurunnya Jumlah Modal Koperasi	RSP.23.15.03.19.15	Penyuluhan Perkoperasian Kepada kelompok masyarakat	maraknya investasi ilegal yang berkedok koperasi	publikasi informasi perkoperasian melalui media sosial	Kepala Dinas	Nov-23
16	Menurunnya Jumlah Modal Koperasi	RSP.23.15.03.19.16	Diklat manajemen kelembagaan Koperasi bagi pengurus dan pengelola	Kurangnya minat pengurus dan pengelola untuk mengikuti diklat	pendampingan kelembagaan koperasi	Kepala Dinas	Nov-23
17	Menurunnya Jumlah Modal Koperasi	RSP.23.15.03.19.17	Diklat Akuntansi Bagi Pengurus koperasi	Kurangnya Kemampuan SDM Pengelola dalam mengelola koperasi	pendampingan kelembagaan dan usaha koperasi	Kepala Dinas	Nov-23
<b>II DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN BIMA</b>							
1	Destinasi wisata yang kurang menarik	RSP.23.24.03.23.01	Pengadaan anggaran untuk sarana dan prasarana	Revitalisasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana belum dilakukan dengan maksimal	Melengkapi sarana penunjang lainnya dan pemeliharaan secara maksimal	Kepala Dinas	Triwulan III Tahun 2024
2	Destinasi wisata yang kurang menarik	RSP.23.24.03.23.02	Kerjasama promosi pariwisata dengan pihak Bandara Sultan Muhammad Salahudin	Kebijakan kerjasama promosi dengan pihak Bandara Sultan Muhammad Salahudin belum efektif	Melakukan penambahan media promosi pariwisata di tempat-tempat strategis	Kepala Dinas	Triwulan III Tahun 2024
3	Destinasi wisata yang kurang menarik	RSP.23.24.03.23.03	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Pembangunan sektor pariwisata hanya berpusat pada pembangunan sarana prsarana pendukung bukan atraksi	Pengadaan penambahan atraksi wisata seperti wisata air	Kepala Dinas	Triwulan II Tahun 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
4	akses untuk kawasan pengembangan wisata kurang memadai	RSP.23.24.03.23.04	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Kebijakan kerjasama dengan penyedia jasa transportasi belum efektif	Mengupayakan pengadaan alat transportasi khusus wisatawan yang dikelola sendiri oleh pemerintah	Kepala Dinas	Triwulan III Tahun 2024
5	kolaborasi dengan penyedia jasa pariwisata belum terbangun	RSP.23.24.03.23.05	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Hanya membentuk organisasi kelompok sadar wisata yang belum optimal fungsinya	Mendorong terbentuknya organisasi pengelola pariwisata seperti ASITA, HPI dan PHRI	Kepala Dinas	Triwulan III Tahun 2024
6	Kesiapan penyedia jasa pariwisata yang masih belum memadai	RSP.23.24.03.23.06	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Kebijakan pengembangan SDM pariwisata belum sampai tersertifikasi LSUP	Melaksanakan kerjasama dengan LSUP dalam pengembangan SDM bidang Pariwisata	Kepala Dinas	Triwulan IV Tahun 2024
7	Pengelolaan Destinasi wisata tidak maksimal	RSP.23.24.03.23.07	Pelatihan untuk SDM pariwisata baik ASN maupun masyarakat umum	Kebijakan pelatihan SDM pariwisata masih belum tepat sasaran	Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk SDM pariwisata yang tepat sasaran dan kredibilitas	Kepala Dinas	Triwulan IV Tahun 2024
<b>III DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>							
1	Perikanan Tangka Produksi perikanan Tangkap Semakin Menurun	RSP.23.23.03.22.01	Belum ada pengendalian	Belum dilakukan pengendalian	melaksanakan Kajian Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	Kepala Dinas	TW I 2024
2	Perikanan Tangka Produksi perikanan Tangkap Semakin Menurun	RSP.23.23.03.22.02	1. Penyediaan Data dan informasi Sumber daya ikan 2.perbaikan terumbu karangan dan pengendalian sampah laut	Kebijakan prioritas pembangunan fasilitas penangkapan.	Pengawasan usaha Perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan	Kepala Dinas	TW II 2024
3	Perikanan Tangka Produksi perikanan Tangkap Semakin Menurun	RSP.23.23.03.22.03	pengadaan alat bantu tangkap (runponisasi dan kapal penangkap ikan),	Kebijakan prioritas pembangunan fasilitas penangkapan.	Mengadakan pembangunan fasilitas dermaga pembongkaran ikan dan pengadaan sarana dan prasarana tangkap.	Kepala Dinas	TW II 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Perikanan Tangka Produksi perikanan Tangkap	RSP.23.23.03.22.04	pengadaan dermaga pembongkaran ikan.	Mebutuhkan anggaran yang cukup besar		Kepala Dinas	TW III 2024
5	Perikanan Tangka Produksi perikanan Tangkap Semakin Menurun	RSP.23.23.03.22.05	Pelatihan nelayan	Tingkat pemahaman nelayan yang berbeda	Fasilitasi pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan dan Peningkatan Kapasitas Nelayan	Kepala Dinas	TW III 2024
6	Perikanan Budidaya Produksi perikanan Budidaya Semakin Menurun	RSP.23.23.03.22.06	Penyediaan Sarana Perikanan Budidaya	Mebutuhkan tambahan anggaran	Melakukan koordinasi dengan DKP Propinsi dan KKP	Kepala Dinas	TW. I Tahun 2024
7	Perikanan Budidaya Produksi perikanan Budidaya Semakin Menurun	RSP.23.23.03.22.07	-	Sosialisasi terhadap keberadaan LPUMKP belum dilakukan	Mensosialisasikan keberadaan LPUMKP (Lembaga Pengelola Usaha Modal Kelautan dan Perikanan) kepada pelaku usaha	Kepala Dinas	TW. III Tahun 2024
8	Daya dukung lingkungan yang semakin menurun	RSP.23.23.03.22.08	Pemantauan lingkungan budidaya	Waktu pemantauan yang masih kurang	Menambah waktu pemantaun	Kepala Dinas	TW. III Tahun 2024
9	Pemanfaatan teknologi budidaya perikanan yang masih minim	RSP.23.23.03.22.09	Bimbingan Tekhnis terhadap Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan)	Pokdakan belum semuanya mengikuti Bimtek Karena keterbatasan anggaran	Memaksimalkan Bimtek dan menambah anggaran	Kepala Dinas	TW. III Tahun 2024
10	Fluktuasi Harga	RSP.23.23.03.22.10					
11	Pengolahan Hasil Perikanan yang belum maksimal	RSP.23.23.03.22.11	Sosialisasi dan Pembinaan	Sosialisasi dan pembinaan belum menyeluruh	Pembangunan cold storage pabrik es di Wiayah Kolo	Kepala Dinas	TW II Tahun 2024
12	Pengolahan Hasil Perikanan yang belum maksimal	RSP.23.23.03.22.12	Sosialisasi dan Pembinaan	Pada umumnya Nelayan terikat perjanjian dengan pengusaha yang menampung hasil tangkapannya	fasilitasi ketersediaan bahan baku dengan menjembatani hubungan kerjasama antara nelayan dan pengolah hasil perikanan	Kepala Dinas	TW I Tahun 2024



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Pengolahan Hasil Perikanan yang belum maksimal	RSP.23.23.03.22.13	Sosialisasi dan Gelar Produk Olahan Perikanan/ Bazar	Sosialisasi dan bazar belum menyeluruh	Optimalisasi sosialisasi, bazar serta promosi produk olahan baik secara online maupun offline	Kepala Dinas	TW II Tahun 2024
14	Pengolahan Hasil Perikanan yang belum maksimal	RSP.23.23.03.22.14	Sosialisasi dan pembinaan sehingga sebagian pelaku usaha/pengolah hasil perikanan telah mendapat bantuan peralatan dan pinjaman modal usaha baik dari perbankan maupun pemerintah	Administrasi pencairan pinjaman modal usaha yang panjang dan pencairan yang lama sehingga menyebabkan pelaku usaha enggan meminjam modal di lembaga perbankan	Optimalisasi Sosialisasi, Pembinaan dan Fasilitas akses ke lembaga perbankan / lembaga lainnya seperti LPMUKP (Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Perikanan) di bawah naungan KKP	Kepala Dinas	TW II Tahun 2024
15	Harga Jual Produk Olahan Menurun	RSP.23.23.03.22.15	Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha supaya Mengikuti standar prosedur SKP	Mengikuti standar prosedur SKP	Membangun MoU dengan BPOM, Dikes, Dinas Propinsi, serta KKP.	Kepala Dinas	TW II Tahun 2024
<b>IV DINAS TENAGA KERJA</b>							
1	Akses Permodal yang masih kurang	RSP.23.07.03.09.01	sebagian calon wirausaha telah mendapat bantuan alat dan modal dari pemerintah	Akses permodalan dari lembaga keuangan belum terserap secara maksimal	Membangun MOU dengan pihak perbankan yang memuat penyederhanaan persyaratan	Kepala Dinas	tahun 2024
2	Koordinasi lintas sektor yang belum maksimal	RSP.23.07.03.09.02	Sudah adanya pendataan melalui aplikasi siap kerja	Data peserta lintas PD belum tersedia secara memadai	Pengembangan aplikasi ketenagakerjaan	Kepala Dinas	Jul-24
3	Koordinasi lintas sektor yang belum maksimal	RSP.23.07.03.09.03	Membuat MOU dengan beberapa perangkat Daerah lainnya	Belum terbangunnya sinergi antar OPD	Membangun MOU terpadu dengan instansi terkait  Melakukan Rakor ketenagakerjaan secara berkala	Kepala Dinas	Apr-24  Februari dan Juli 2024
4	Tata kelola usaha yang masih belum maksimal	RSP.23.07.03.09.04	Belum ada pengendalian yang dilakukan	Belum dilakukannya peningkatan pemahaman pengelola usaha	Pelatihan manajemen usaha	Kepala Dinas	Aug-24

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Keterampilan yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar	RSP.23.07.03.09.05	Belum ada pengendalian yang dilakukan	Masih terdapat pelatihan yang tidak sesuai kebutuhan	menyusun data proyeksi dan analisis kebutuhan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar secara berkala	Kepala Dinas	Januari-Maret 2024
6	Keterampilan yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar	RSP.23.07.03.09.06	Telah dilakukan uji kompetensi dari BNSP	Kelembagaan dan pengelola BLK belum memiliki kompetensi yang memadai	sertifikasi kompetensi pengelola BLK	Kepala Dinas	Tahun 2024
					Akreditasi BLK	Kepala Dinas	Tahun 2024
7	Keterampilan yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar	RSP.23.07.03.09.07	Telah ada aturan tentang standarisasi sarpras permenaker 13 tahun xxxx DED telah tersusun	masih adanya sarpras yang belum sesuai dengan permenaker 13 tahun xxx	Rencana kebutuhan prasarana yang sesuai standar	Kepala Dinas	Nov-23
					Pembangunan gedung BLK	Kepala Dinas	Tahun 2024-2026
					Pemenuhan kebutuhan sarpras yang sesuai standar	Kepala Dinas	Tahun 2024-2026
8	Keterampilan yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar	RSP.23.07.03.09.08	Telah dilakukan pendaftaran secara online	belum tersusunnya mekanisme seleksi peserta pelatihan	membuat instrumen seleksi	Kepala Dinas	Mar-24
9	Keterampilan yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar	RSP.23.07.03.09.09	Telah menyusun persyaratan recruitment peserta Sosialisasi	Masih adanya personal penyeleksi yang tidak berintegritas	Menyusun kode etik	Kepala Dinas	Maret-April 2024
					menyusun tim seleksi yang independen	Kepala Dinas	Feb-24
<b>V</b>	<b>DINAS PERTANIAN</b>						
1	Target pertumbuhan produksi pertanian yang belum tercapai	RSP.23.25.03.24.01	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	masih terdapat Penggunaan Sarana pertanian yang belum Optimal	Perlu dilakukan maintenance dan monev secara terperiodik/berkala agar bisa memastikan kondisi dan keadaan sarana masih layak digunakan	Kepala dinas	Triwulan I TA 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Kompetensi tenaga pendamping yang belum memadai	Perlu dilakukan pelatihan dan semacamnya untuk mengoptimalkan tenaga pendamping	Kepala dinas	Triwulan IV TA 2023
			Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Akses data kondisi dan sebaran pemanfaatan prasarana pertanian belum dapat dimanfaatkan secara Optimal	Perlu dilakukan pendataan kondisi dan sebaran pemanfaatan Prasarana pertanian yang terperiodik dan berkala	Kepala dinas	Triwulan IV TA 2023
			Pembangunan, rehabilitasi daneliharaan prasarana pertanian dan prasarana pertanian lainnya	Disitribusi prasarana pertanian dan prasarana pertanian lainnya yang terbangun,terehabilitasi dan terpelihara belum menjangkau seluruh wilayah pertanian di Kota Bima	Perlu adanya prioritas penganggaran untuk kegiatan yang mendukung peningkatan Produksi pertanian	Kepala dinas	Triwulan I TA 2024
2	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang belum maksimal	RSP.23.25.03.24.02	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Masih kurangnya Tenaga POPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Perlu kiranya dilakukan perekrutan Tenaga POPT Dinas Pertanian Kota Bima	Kepala dinas	Tahun 2024
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	masih kurang beragamnya jenis kegiatan yang dilakukan untuk mendukung Penanganan Dampak Perubahan Iklim ini	Perlu memperbanyak referensi kegiatan yang sesuai dengan kondisi geografis dan kecukupan anggaran untuk Penanganan Dampak Perubahan Iklim ini	Kepala dinas	Tahun 2024
			Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan zoonosis	Masih kurangnya anggaran APBD untuk memfasilitasi Kegiatan pengendalian dan Penanggulangan penyakit hewan zoonosis	Diperlukan Support anggaran dari APBD untuk kegiatan ini, tidak hanya mengandalkan anggaran dari bantuan Propinsi atau dana dari Pusat	Kepala dinas	Tahun 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Cakupan ketersediaan air irigasi tidak seimbang dengan luas lahan	RSP.23.25.03.24.03	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Infrastruktur Irigasi	Disitribusi dari pengadaan infrastruktur irigasi yang terbangun,terehabilitasi dan terpelihara masih belum optimal	Perlu update pendataan terkait infrastruktur irigasi untuk dijadikan acuan pemerintah dalam menyediakan atau membangun infrastruktur yang baru	Kepala dinas	Triwulan I TA 2024
4	Terjadinya alih fungsi lahan	RSP.23.25.03.24.04	Telah dilakukan sosialisasi Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Sosialisai yang dilakukan belum menyentuh keseluruhan wilayah Kota Bima	Melakukan kegiatan monitoring dan sosialisasi ke seluruh wilayah kota Bima	Kepala dinas	Triwulan I TA 2024
<b>VI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>							
1	Tidak terpenuhi Indikator Nilai APE	RSP.23.08.03.12.01	Melakukan MoU dengan pihak BUMN yang ada di Kota Bima	Pihak yang diajak kerja sama masih terbatas pada pihak pemerintah	Meningkatkan kerjasama dengan pihak pemerhati anak baik pada level pemerintah maupun swasta	Kepala Dinas	TW I Tahun 2024
2	Tidak terpenuhi Indikator Nilai APE	RSP.23.08.03.12.02	Pengumpulan data PUG pada lintas sektor	Masih banyak data yang belum tersedia	Meningkatkan koordinasi serta monev berkala dengan linsek dalam rangka mendukung PUG dani APE	Kepala Dinas	TW III dan TW IV Tahun 2024
3	Tidak terpenuhi Indikator Nilai APE	RSP.23.08.03.12.03	Pelatihan PUG dan PPRG bagi kasubag progran dan tenaga fungsional pada linsek	Belum semua kasubag progran dan tenaga fungsional pada linsek mendapat Pelatihan PUG dan PPRG	Pelaksanaan Pelatihan PUG dan PPRG bagi kasubag progran dan tenaga fungsional pada linsek	Kepala Dinas	TW II Tahun 2024
4	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.03.12.04	Koordinasi Linsek dengan Dukcapil dan Pokja KLA dalam rangka pemenuhan KIA dan KK	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alur pelayanan dan syarat-syarat pengajuan permohonan pelayanan	MOU dengan Dukcapil dalam rangka pemenuhan KIA dan KK, Rakor dengan Pokja KLA dalam rangka peningkatan pemenuhan nilai KLA	Kepala Dinas	TW I 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.03.12.05	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak guna menekan peningkatan angka stunting	Masih kurangkannya pemahaman masyarakat terkait stunting	Meningkatkan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak guna menekan peningkatan angka stunting	Kepala Dinas	TW I Tahun 2024
6	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.03.12.06	Koordinasi dengan lintas sektor melalui pokja KLA guna memenuhi persyaratan KLA	Minimnya pemahaman lintas sektor terhadap pemenuhan indikator KLA	Meningkatkan Advokasi dan sosialisasi terkait KLA pada lintas sektor	Kepala Dinas	TW II Tahun 2024
7	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.03.12.07	SDM yang memiliki sertifikasi KHA masih sangat terbatas dan belum tersebar pada beberapa lintas sektor terkait	Minimnya pelatihan KHA (Konvensi Hak Anak)	Mengadakan kegiatan pelatihan KHA (konvensi Hak Anak) dan Mengikutsertakan beberapa peserta dari lintas sektor	Kepala Dinas	TW II Tahun 2024
8	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.03.12.08	Pendataan inovasi di beberapa OPD	Minimnya OPD yang memiliki Inovasi	Koordinasi dengan Brides terkait Inovasi dari berbagai OPD	Kepala Dinas	TW III Tahun 2024
9	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.03.12.09	Sosialisasi kawasan tanpa rokok	minimnya kesadaran masyarakat terhadap kawasan tanpa rokok	Meningkatkan sosialisasi dan KIE terkait kawasan tanpa rokok	Kepala Dinas	TW III Tahun 2024
10	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.03.12.10	Pelaksanaan kegiatannya pada Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)	Kegiatan Pelayanan pada Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) belum dimanfaatkan secara maksimal	Menyusun alur pelayanan dan pemanfaatan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) untuk pelayanan kasus kekerasan pada perempuan dan anak	Kepala Dinas	TW III Tahun 2024
11	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.03.12.11	Melakukan MoU dengan pihak BUMN yang ada di Kota Bima	Pihak yang diajak kerja sama masih terbatas pada pihak pemerintah	Meningkatkan kerjasama dengan pihak pemerhati anak baik pada level pemerintah maupun swasta	Kepala Dinas	TW III Tahun 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
					Penyediaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		TW II Tahun 2024
12	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.03.12.12	Sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta pencegahan pernikahan usia anak dan Penyediaan layanan pengaduan masyarakat anak dan pendampingan bagi anak	masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta pernikahan usia anak	Meningkatkan koordinasi linsek dan Sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta pencegahan pernikahan usia anak	Kepala Dinas	TW II Tahun 2024
					Penyediaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		TW II Tahun 2024
13	Tidak terpenuhi Nilai Indikator Kota Layak Anak	RSP.23.08.03.12.13	Melaksanakan koordinasi dengan linsek melalui pokja KLA	Linsek belum banyak yang terlibat dalam mendukung KLA	Meningkatkan koordinasi serta monev berkala dengan linsek dalam rangka mendukung pemenuhan nilai KLA	Kepala Dinas	TW III Tahun 2024

## Daftar Rencana Tindak Pengendalian

<b>Nama Pemda : Kota Bima</b> <b>Tahun Penilaian : 2023</b> <b>Tujuan Strategis I : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing</b> <b>Sasaran Strategis IV : Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat</b> <b>Urusan Pemerintah :</b>							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>							
1	Produksi Perikanan Tangkap Semakin Menurun disebabkan anomali cuaca	RSP.23.23.04.22.01	Belum ada pengendalian	belum dilakukan pengendalian	melaksanakan Kajian Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	Kepala Dinas	TW I 2024
2	Produksi Perikanan Tangkap Semakin Menurun disebabkan Ketersediaan Sumber Daya Ikan mulai berkurang	RSP.23.23.04.22.02	1. Penyediaan Data dan informasi Sumber daya ikan 2.perbaikan terumbu karangan dan pengendalian sampah laut	Kebijakan prioritas pembangunan penangkapan.	Pengawasan usaha Perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan	Kepala Dinas	TW II 2024
3	Produksi Perikanan Tangkap Semakin Menurun disebabkan Sarana dan Prasarana (alat bantu penangkapan ikan) kurang	RSP.23.23.04.22.03	pengadaan alat bantu tangkap (runponisasi dan kapal penangkap ikan),	Kebijakan prioritas pembangunan penangkapan.	Mengadakan pembangunan fasilitas dermaga pembongkaran ikan dan pengadaan sarana dan prasarana tangkap.	Kepala Dinas	TW II 2024
4	Produksi Perikanan Tangkap Semakin Menurun disebabkan Fasilitas pelabuhan pendaratan Ikan belum tersedia	RSP.23.23.04.22.04	pengadaan dermaga pembongkaran ikan.	Volume dermaga apung masih kecil dan kurang.	Akan dialokasikan anggaran	Kepala Dinas	TW III 2024
5	Produksi Perikanan Tangkap Semakin Menurun disebabkan Kualitas SDM (Nelayan) masih rendah	RSP.23.23.04.22.05	Pelatihan nelayan	Tingkat pemahaman nelayan yang berbeda	Fasilitasi pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan dan Peningkatan Kapasitas Nelayan	Kepala Dinas	TW III 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
6	produksi perikanan Budidaya semakin menurun disebabkan Sarana budidaya Perikanan kurang	RSP.23.23.04.22.07	Penyediaan Sarana Perikanan Budidaya	Mebutuhkan tambahan anggaran	Melakukan koordinasi dengan DKP Propinsi dan KKP	Kepala Dinas	TW. I Tahun 2024
7	produksi perikanan Budidaya semakin menurun disebabkan Pelaku Usaha Perikanan kesulitan memperoleh Modal usaha	RSP.23.23.04.22.08	Belum ada kegiatan pengendalian	Sosialisasi terhadap keberadaan LPUMKP belum dilakukan	Mensosialisasikan keberadaan LPUMKP (Lembaga Pengelola Usaha Modal Kelautan dan Perikanan) kepada pelaku usaha	Kepala Dinas	TW. III Tahun 2024
8	Daya dukung lingkungan yang semakin menurun disebabkan Pencemaran Lingkungan	RSP.23.23.04.22.09	Pemantauan lingkungan budidaya	Waktu pemantauan yang masih kurang	Menambah waktu pemantaun	Kepala Dinas	TW. III Tahun 2024
9	Pemanfaatan teknologi budidaya perikanan yang masih minim disebabkan Pengetahuan Masyarakat tentang Pemanfaatan teknologi Budidaya Perikanan	RSP.23.23.04.22.10	Bimbingan Tekhnis terhadap Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan)	Pokdakan belum semuanya mengikuti Bimtek Karena keterbatasan anggaran	Memaksimalkan Bimtek dan menambah anggaran	Kepala Dinas	TW. III Tahun 2024
10	Fluktuasi Harga disebabkan Permintaan terhadap Ikan Budidaya yang tidak stabil	RSP.23.23.04.22.11					
11	PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN yang belum maksimal disebabkan Penanganan Ikan Tangkap belum menerapkan Cold Chain System (CCS)	RSP.23.23.04.22.12	Sosialisasi dan Pembinaan	Sosialisasi dan pembinaan belum menyeluruh	Pembangunan cold storage pabrik es di Wiayah Kolo	Kepala Dinas	TW II Tahun 2024



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
12	PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN yang belum maksimal disebabkan Kelangkaan bahan baku	RSP.23.23.04.22.13	Sosialisasi dan Pembinaan	Pada umumnya Nelayan terikat perjanjian dengan pengusaha yang menampung hasil tangkapannya	fasilitasi ketersediaan bahan baku dengan menjembatani hubungan kerjasama antara nelayan dan pengolah hasil perikanan	Kepala Dinas	TW II Tahun 2024
13	PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN yang belum maksimal disebabkan Akses Pemasaran hasil pengolahan Ikan	RSP.23.23.04.22.14	Sosialisasi dan Gelar Produk Olahan Perikanan/ Bazar	Sosialisasi dan bazar belum menyeluruh	Optimalisasi sosialisasi, bazar serta promosi produk olahan baik secara online maupun offline	Kepala Dinas	TW II Tahun 2024
14	PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN yang belum maksimal disebabkan Modal usaha yang masih kurang	RSP.23.23.04.22.15	Sosialisasi dan pembinaan sehingga sebagian pelaku usaha/pengolah hasil perikanan telah mendapat bantuan peralatan dan pinjaman modal usaha baik dari perbankan maupun pemerintah	Administrasi pencairan pinjaman modal usaha yang panjang dan pencairan yang lama sehingga menyebabkan pelaku usaha enggan meminjam modal di lembaga perbankan	Optimalisasi Sosialisasi , Pembinaan dan Fasilitas akses ke lembaga perbankan / lembaga lainnya seperti LPMUKP (Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Perikanan) di bawah naungan KKP	Kepala Dinas	TW II Tahun 2024
15	Harga Jual Produk Olahan Menurun disebabkan Sarana dan Prasarana pengolahan Ikan tidak memenuhi standar SKP (Standar Kelayakan Pengolahan)	RSP.23.23.04.22.16	Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha supaya Mengikuti standar prosedur SKP	Mengikuti standar prosedur SKP	Membangun MoU dengan BPOM, Dikes, Dinas Propinsi, serta KKP.	Kepala Dinas	TW II Tahun 2024
16	Minat Konsumsi Ikan Kurang disebabkan Pemahaman Masyarakat akan manfaat Ikan kurang	RSP.23.23.04.22.17	Bimtek, sosailisasi, pembinaan dan pemberian makanan berbahan baku ikan	Kegiatan yang dilakukan belum menyeluruh karena anggaran yang terbatas/minim	Optimalisasi pelaksanaan Bimtek, sosailisasi, pembinaan dan pemberian makanan berbahan baku ikan bekerjasama dengan stake holder terkait	Kepala Dinas	1 tahun anggaran
17	Minat Konsumsi Ikan Kurang disebabkan Daya Beli Ikan rendah						

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II DINAS PERTANIAN</b>							
1	Target pertumbuhan produksi pertanian yang belum tercapai	RSP.23.25.04.24.01	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	masih terdapat Penggunaan Sarana pertanian yang belum Optimal	Perlu dilakukan maintenace dan monev secara terperiodik/berkala agar bisa memastikan kondisi dan keadaan sarana masih layak digunakan	Kepala dinas	Triwulan I TA 2024
			Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Kompetensi tenaga pendamping yang belum memadai	Perlu dilakukan pelatihan dan semacamnya untuk mengoptimalkan tenaga pendamping	Kepala dinas	Triwulan IV TA 2023
			Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Akses data kondisi dan sebaran pemanfaatan prasarana pertanian belum dapat dimanfaatkan secara Optimal	Perlu dilakukan pendataan kondisi dan sebaran pemanfaatan Prasarana pertanian yang terperiodik dan berkala	Kepala dinas	Triwulan IV TA 2023
			Pembangunan, rehabilitasi daneliharaan prasarana pertanian dan prasarana pertanian lainnya	Disitribusi prasarana pertanian dan prasarana pertanian lainnya yang terbangun,terehabilitasi dan terpelihara belum menjangkau seluruh wilayah pertanian di Kota Bima	Perlu adanya prioritas penganggaran untuk kegiatan yang mendukung peningkatan Produksi pertanian	Kepala dinas	Triwulan I TA 2024
2	Target pertumbuhan produksi pertanian yang belum tercapai	RSP.23.25.04.24.02	Peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan	Masih kurangnya kompetensi penyuluh dan petani terhadap adopsi teknologi	Perlu dilakukan BIMTEK yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi dan teknologi	Kepala dinas	Triwulan I TA 2024
3	Kebijakan pembiayaan yang belum berpihak kepada petani	RSP.23.25.04.24.03	Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian	Akses pembiayaan bagi petani blm terbuka secara maksimal	Perlu membangun MOU dengan Pihak Pembiayaan	Kepala dinas	Triwulan I TA 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang belum maksimal	RSP.23.25.04.24.04	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Masih kurangnya Tenaga POPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Perlu kiranya dilakukan perekrutan Tenaga POPT Dinas Pertanian Kota Bima	Kepala dinas	Tahun 2024
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	masih kurang beragamnya jenis kegiatan yang dilakukan untuk mendukung Penanganan Dampak Perubahan Iklim ini	Perlu memperbanyak referensi kegiatan yang sesuai dengan kondisi geografis dan kecukupan anggaran untuk Penanganan Dampak Perubahan Iklim ini	Kepala dinas	Tahun 2024
			Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan zoonosis	Masih kurangnya anggaran APBD untuk memfasilitasi Kegiatan pengendalian dan Penanggulangan penyakit hewan zoonosis	Diperlukan Support anggaran dari APBD untuk kegiatan ini, tidak hanya mengandalkan anggaran dari bantuan Propinsi atau dana dari Pusat	Kepala dinas	Tahun 2024
5	Cakupan ketersediaan air irigasi tidak seimbang dengan luas lahan	RSP.23.25.04.24.05	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Infrastruktur Irigasi	Distribusi dari pengadaan infrastruktur irigasi yang terbangun, ter rehabilitasi dan terpelihara masih belum optimal	Perlu update pendataan terkait infrastruktur irigasi untuk dijadikan acuan pemerintah dalam menyediakan atau membangun infrastruktur yang baru	Kepala dinas	Triwulan I TA 2024
6	Terjadinya alih fungsi lahan	RSP.23.25.04.24.06	Telah dilakukan sosialisasi Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Sosialisai yang dilakukan belum menyentuh keseluruhan wilayah Kota Bima	Melakukan kegiatan monitoring dan sosialisasi ke seluruh wilayah kota Bima	Kepala dinas	Triwulan I TA 2024
<b>III DINAS KETAHANAN PANGAN</b>							
1	penganekaragaman bahan pangan yang belum maksimal	RSP.23.09.04.14.01	Lomba B2SA, Promosi B2SA, SE Walikota Bima dalam rangka optimalisasi bahan pangan lokal dalam	Komunikasi yg efektif kepada masyarakat dan stakeholder lainnya	Promosi dan sosialisasi pangan secara lebih intensif	PPTK/ Kepala Dinas	1 tahun anggaran

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
2	penganekaragaman bahan pangan yang belum maksimal	RSP.23.09.04.14.02	Bahan pangan lokal untuk kegunaan kekinian dan sosial kemasyarakatan. Kegiatan PLAKAT		Peningkatan kerja sama dgn seluruh stakeholder dalam <u>pengnakeragaman</u>	PPTK/ Kepala Dinas	1 tahun anggaran
3	penganekaragaman bahan pangan yang belum maksimal	RSP.23.09.04.14.03			Peningkatan kerja sama dgn seluruh stakeholder dalam <u>pengnakeragaman</u>	PPTK/ Kepala Dinas	1 tahun anggaran
4	penganekaragaman bahan pangan yang belum maksimal	RSP.23.09.04.14.04			Peningkatan kerja sama dgn seluruh stakeholder dalam <u>pengnakeragaman</u>	PPTK/ Kepala Dinas	1 tahun anggaran
5	penganekaragaman bahan pangan yang belum maksimal	RSP.23.09.04.14.05			Pengadaan CPP	Komunikasi yg efektif kepada masyarakat dan stakeholder lainnya	Penguatan CPP
			Merevisi Perwali Nomor 41 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengelolaan operasional cadangan pangan pemerintah	Perwali Nomor 41 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengelolaan operasional cadangan pangan pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan Pepres 125 tahun 2022 tentang penyelenggaraan CPP	1.) Analisis ulang kebutuhan pangan; 2.) Pengadaan kebutuhan sarana prasarana pendukung pangan; 3.) Pengadaan CPP.	PPTK/ Kepala Dinas	1 tahun anggaran
6	Terjadinya kelangkaan pangan	RSP.23.09.04.14.06	Penyusunan PPH Ketersediaan, NBM, Data Neraca Pangan Strategis Mingguan; Pengadaan CPP, Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal; Data Potensi Ketersediaan Pangan Lokal; Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (Gerakan Pangan Murah); Pantauan stok dan pasokan harga pangan.	Skor PPH Ketersediaan belum ideal;	Pembuatan aplikasi Informasi harga dan data ketersediaan pangan, Peningkatan upaya Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (Gerakan Pangan Murah); Penyusunan standar harga; Penguatan & fasilitasi LDPM; Kerjasama antar daerah dan lembaga lainnya.	PPTK/ Kepala Dinas	1 tahun anggaran
7	Terjadinya kelangkaan pangan	RSP.23.09.04.14.07					
8	Terjadinya kelangkaan pangan	RSP.23.09.04.14.08					
9	Terjadinya kelangkaan pangan	RSP.23.09.04.14.09					

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Bertambahnya kasus gizi Kurang atau gizi buruk	RSP.23.09.04.14.10	Pemberian makanan tambahan, Penyusunan Peta	Sosialisasi dan pendampingan	Pemberian makanan tambahan, Penyusunan Peta	PPTK/ Kepala Dinas	1 tahun anggaran
11	Bertambahnya kasus gizi Kurang atau gizi buruk	RSP.23.09.04.14.11	FSVA, Penyusunan Peta SKPG,		FSVA, Penyusunan Peta SKPG, Sosialisasi dan pendampingan; Keluarahan B2SA		
12	Bertambahnya kasus gizi Kurang atau gizi buruk	RSP.23.09.04.14.12					
13	Angka kecukupan gizi masyarakat yang masih rendah	RSP.23.09.04.14.13	Analisis PPH Konsumsi, Lomba B2SA, Promosi B2SA, SE Walikota Bima dalam rangka optimalisasi bahan pangan lokal dalam keg kedinasan dan sosial kemasyarakatan. Kegiatan PLAKAT	Skor PPH masih belum ideal	Gerakan konsumsi sayur dan buah lokal; Pengembangan Kelurahan B2SA; Kebun PLAKAT B2SA; Peningkatan koordinasi dan kolaborasi stakeholder. Promosi dan Sosialisasi B2SA	Kepala Dinas	1 tahun anggaran
14	Angka kecukupan gizi masyarakat yang masih rendah	RSP.23.09.04.14.14				Kepala Dinas	1 tahun anggaran
15	Angka kecukupan gizi masyarakat yang masih rendah	RSP.23.09.04.14.15				Kepala Dinas	1 tahun anggaran
16	Keamanan dan mutu pangan yang masih rendah	RSP.23.09.04.14.16	Sosialisasi PSAT, Pendataan Pelaku usaha	Masih rendahnya mutu dan keamanan pangan PSAT yang dikonsumsi masyarakat	Sosialisasi PSAT, Pendataan Pelaku usaha	Kepala Dinas	1 tahun anggaran
17	Keamanan dan mutu pangan yang masih rendah	RSP.23.09.04.14.17	PSAT; Pembinaan PSAT;		PSAT; Pembinaan PSAT; Pengadaan alat rapit tes; Registrasi PSAT; Pembuatan Buku Profil PSAT; Uji mutu PSAT; Pengadaan sarana dan prasarana pelaku usaha pangan yang mendukung sanitasi higienis		
18	Keamanan dan mutu pangan yang masih rendah	RSP.23.09.04.14.18					
19	Keamanan dan mutu pangan yang masih rendah	RSP.23.09.04.14.19					
20	Keamanan dan mutu pangan yang masih rendah	RSP.23.09.04.14.20					
<b>IV DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>							
1	Bencana Alam	RSP.23.03.04.06.01	Menempatkan bangunan air bersih maupun tangki septik pada daerah yang tidak rawan bencana	ketidapahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan agar tidak menyebabkan bencana	Berkoordinasi dengan Dinas Terkait DLH, Pertanian untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar sumber air tetap terjaga	Kepala Dinas	Tw 1 Tahun 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Lahan untuk membangun Infrastruktur tidak tersedia	RSP.23.03.04.06.02	Sosialisasi langsung kepada masyarakat maupun kepada pemerintah setempat	Keengganan masyarakat untuk memberikan lahan	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Kepala Dinas	Tw 3 Tahun 2024
3	lembaga pengelola Air Minum dan sanitasi belum efektif	RSP.23.03.04.06.03	Sosialisasi terhadap calon pengelola air minum dan sanitasi	kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana SPAM maupun Tangki Septik	Pelatihan, Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM maupun Tangki Septik agar dapat mengelola Sarana dan prasana agar tetap terawat	Kepala Dinas	Tw 3 Tahun 2024
4	Ketersediaan Baku Mutu Air yang belum menjangkau ke seluruh masyarakat	RSP.23.03.04.06.04	memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang ada di hulu agar dapat memberikan sebagian sumber airnya kepada masyarakat di hilir	anggapan bahwa kebutuhan tidak mencukupi jika sebagian sumber airnya di ambil oleh daerah lain	memberikan pemahaman melalui tokoh masyarakat dan aparat kelurahan serta penjelasan teknis kepada masyarakat terutama yang menolak	Kepala Dinas	Tw 1 Tahun 2024
5	Ketersediaan Baku Mutu Air yang belum menjangkau ke seluruh masyarakat	RSP.23.03.04.06.05	Melakukan usulan dengan anggaran DAK Tahun berikutnya	Belum ada dana pendukung selain dana DAK	mencari sumber anggaran selain DAK dan berkoordinasi dengan Bappeda Kota Bima	Kepala Dinas	Tw 3 Tahun 2024
6	Ketersediaan Baku Mutu Air yang belum menjangkau ke seluruh masyarakat	RSP.23.03.04.06.06	-	ketidapahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan agar tidak menyebabkan kualitas sumber daya air menurun	Berkoordinasi dengan Dinas Terkait DLH, Pertanian untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar sumber air tetap terjaga	Kepala Dinas	Tw 3 Tahun 2024
7	Ketersediaan Baku Mutu Air yang belum menjangkau ke seluruh masyarakat	RSP.23.03.04.06.07	-	ketidapahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan agar tidak menyebabkan penurunan debit air	Berkoordinasi dengan Dinas Terkait DLH, Pertanian untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar sumber air tetap terjaga	Kepala Dinas	Tw 3 Tahun 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Perencanaan Kebutuhan Penanganan Air Minum dan Sanitasi belum terintegrasi	RSP.23.03.04.06.08	survey dan permintaan data pada kelurahan	anggaran yang besar	Penyusunan database dan pemuktahiran secara berkala	Kepala Dinas	Tw 1 Tahun 2024
<b>V DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>							
1	Menurunnya Jumlah investasi	RSP.23.27.04.19.01	Pembangunan Sarana distribusi Perdagangan	Pemanfaatan sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang ada	Pembangunan sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan bersumber dari Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan RI dan APBD	Kepala Dinas	Tahun 2024
2	Menurunnya Jumlah investasi	RSP.23.27.04.19.02	Monitoring Harga Barang Kebutuhan Pokok pengecer dan Distributor ditingkat	Pelaksanaan Operasi Pasar	Pembangunan sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan bersumber dari Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan RI dan APBD	Kepala Dinas	Triwulan III Tahun 2024
3	Terjadi peningkatan inflasi	RSP.23.26.04.19.03	Monitoring Harga Barang Kebutuhan Pokok pengecer dan Distributor ditingkat	Pelaksanaan Operasi Pasar	Kordinasi lintas sektor dengan Bagian Ekonomi, Pertanian, Dinas Ketahanan pangan dan Bulog	Kepala Dinas	Januari dan Oktober 2024
4	Terjadi peningkatan inflasi	RSP.23.26.04.19.04	Monitoring Harga Barang Kebutuhan Pokok pengecer dan Distributor ditingkat	Pelaksanaan Operasi Pasar	Kordinasi lintas sektor dengan Bagian Ekonomi, Pertanian, Dinas Ketahanan pangan dan Bulog	Kepala Dinas	Januari dan Oktober 2024
5	Terjadi peningkatan inflasi	RSP.23.26.04.19.05	Monitoring Harga Barang Kebutuhan Pokok pengecer dan Distributor ditingkat	Pelaksanaan Operasi Pasar	Kordinasi lintas sektor dengan Bagian Ekonomi, Pertanian, Dinas Ketahanan pangan dan Bulog	Kepala Dinas	Januari dan Oktober 2024

### Daftar Rencana Tindak Pengendalian

<b>Nama Pemda : Kota Bima</b> <b>Tahun Penilaian : 2023</b> <b>Tujuan Strategis I : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing</b> <b>Sasaran Strategis V : Meningkatnya Pemberdayaan Gender Dan Pemuda</b> <b>Urusan Pemerintah :</b>							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>							
1	kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelatihan kepemudaan yang diadakan	RSP.23.17.05.04.01	Melakukan sosialisasi dan publikasi terkait kegiatan kepemudaan baik pada peserta didik maupun masyarakat umum	Surat tidak sampai pada sasaran yang dituju	Kegiatan sosialisasi dan publikasi, dilkukan dengan berbagai cara diantaranya medsos, media cetak maupun online	Kadis	Triwulan I 2024
2	kurangnya pembinaan olahraga berprestasi	RSP.23.17.05.04.02	Menyusun jadwal latihan dengan mempertimbangkan kegiatan sekolah lainnya	Terjadi tumpang tindih jadwal antara jadwal latihan dengan kegiatan sekolah lainnya	Berkoordinasi dengan pihak sekolah dalam menyusun jadwal latihan agar tidak terjadi tumpang tindih	Kadis	Triwulan I 2024
3	kurangnya pembinaan olahraga berprestasi	RSP.23.17.05.04.03	Melaksanakan even kejuaraan per triwulan	Kurang konsistennya panitia/penyelenggara even dalam menyelenggarakan even	Meningkatkan konsistensi panitia/penyelenggara even agar dapat menyelenggarakan even sesuai jadwal yang telah disusun	Kadis	Triwulan II 2024
4	kurangnya pembinaan olahraga berprestasi	RSP.23.17.05.04.04	Melakukan Rapat Koordinasi dengan pengampu cabang olahraga secara rutin per bulan	Kurang konsistennya jadwal rapat koordinasi diakibatkan kesibukan masing-masing pengampu cabor	Meningkatkan konsistensi para pengampu cabang olahraga dengan cara memberikan honor atau insentif bagi para pengampu cabor	kadis	Triwulan I-IV 2024



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Kebijakan terkait kepemudaan dan olahraga yang belum berpihak	RSP.23.17.05.04.05	Merancang regulasi daerah terkait kepemudaan dan keolahragaan	Belum adanya referensi yang memadai terkait program kepemudaan dan keolahragaan, disamping itu tenaga ahli terkait pemuda dan olahraga masih minim	Melakukan studi tiru terkait regulasi daerah terkait pemuda dan olahraga pada daerah yang sudah maju dan berkembang kegiatan pemuda dan olahraganya	kadis	Triwulan II 2024
<b>II DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>							
1	Tidak terpenuhi Indikator Nilai APE	RSP.23.08.05.12.01	Sosialisasi terkait regulasi pengarusutamaan gender (PUG)	kurangnya pemahaman linsek terkait regulasi pengarusutamaan gender (PUG)	Meningkatkan advokasi dan sosialisasi terkait regulasi pengarusutamaan gender (PUG)	Kepala Dinas	TW III Tahun 2024
2	Tidak terpenuhi Indikator Nilai APE	RSP.23.08.05.12.02	Sosialisasi PUG pada lintas sektor	kurangnya pemahaman linsek terkait PUG	Meningkatkan advokasi dan sosialisasi dengan linsek terkait PUG	Kepala Dinas	TW III Tahun 2024
3	Tidak terpenuhi Indikator Nilai APE	RSP.23.08.05.12.03	Melaksanakan koordinasi dengan linsek melalui pokja PUG	Linsek belum banyak yang terlibat dalam mendukung PUG	Meningkatkan koordinasi serta monev berkala dengan linsek dalam rangka mendukung pemenuhan nilai APE	Kepala Dinas	TW III Tahun 2024
4	Tidak terpenuhi Indikator Nilai APE	RSP.23.08.05.12.04	Melakukan MoU dengan pihak BUMN yang ada di Kota Bima	Pihak yang diajak kerja sama masih terbatas pada pihak pemerintah	Meningkatkan kerjasama dengan pihak pemerhati anak baik pada level pemerintah maupun swasta	Kepala Dinas	TW I Tahun 2024
5	Tidak terpenuhi Indikator Nilai APE	RSP.23.08.05.12.05	Pengumpulan data PUG pada lintas sektor	Masih banyak data yang belum tersedia	Meningkatkan koordinasi serta monev berkala dengan linsek dalam rangka mendukung PUG dan APE	Kepala Dinas	TW III dan TW IV Tahun 2024
6	Tidak terpenuhi Indikator Nilai APE	RSP.23.08.05.12.06	Pelatihan PUG dan PPRG bagi kasubag program dan tenaga fungsional pada linsek	Belum semua kasubag program dan tenaga fungsional pada linsek mendapat Pelatihan PUG dan PPRG	Pelaksanaan Pelatihan PUG dan PPRG bagi kasubag program dan tenaga fungsional pada linsek	Kepala Dinas	TW II Tahun 2024
<b>III DINAS SOSIAL</b>							

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kualitas dan kuantitas SDM PSKS yang masih kurang	RSP.23.06.05.08.01	Bimtek penguatan kapasitas SDM PSKS	Peserta Bimtek belum memiliki sertifikat yang terstandar	Melakukan pelatihan sertifikasi pada lembaga yang tersertifikasi	Kepala Dinas	Jun-24
<b>IV DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>							
1	Angka Kelahiran Meningkat	RSP.23.12.05.13.01	Pemberian layanan informasi kesehatan reproduksi kepada remaja	Kurang tersedianya layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif	Memberikan sosialisasi atau layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan ramah remaja secara intensif	Kepala Dinas (DPPKB)	Tahun 2024
2	Angka Kelahiran Meningkat	RSP.23.12.05.13.02	Pengelolaan alat dan obat kontrasepsi	Alat dan obat kontrasepsi yang kedaluwarsa	Update manajemen pengelolaan alat dan obat kontrasepsi secara berkala	Kepala Dinas (DPPKB)	Tahun 2024
3	Unmeet Need Yang Masih Tinggi	RSP.23.12.05.13.03	Sosialisasi tentang penggunaan alat kontrasepsi	Masih ada anggapan negatif dalam masyarakat tentang penggunaan alat kontrasepsi	Sosialisasi tentang Alat Kontrasepsi, Manfaat dan Kerugiannya serta kesehatan reproduksi	Kepala Dinas (DPPKB)	Tahun 2024
4	Adanya Dropout Aseptor KB	RSP.23.12.05.13.04	Pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang alat kontrasepsi dan manfaatnya	Belum seluruh masyarakat mendapatkan informasi layanan konseling kesehatan reproduksi	Pemberian layanan promosi dan konseling kesehatan reproduksi fasilitas kesehatan dan kelompok-kelompok kegiatan masyarakat	Kepala Dinas (DPPKB)	Tahun 2024
5	Ledakan Jumlah Urbanisasi	RSP.23.12.05.13.05	Advokasi Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kurangnya Keterlibatan Mitra Kerja khususnya Dinas Terkait dalam Penggarapan Kegiatan Kependudukan dan KB	Sinkronisasi kegiatan dilapangan antara Dinas terkait dengan Dinas DPPKB	Kepala Dinas (DPPKB)	Tahun 2024
<b>IV DINAS KESEHATAN</b>							
1	Jumlah Kematian yang tinggi dibawah UHH yang ditetapkan	RSP.23.02.05.05.01	Terbentuknya tim AMPSR (audit maternal perinata survey respon) Optmalisasi persalinan di faskes Pemberian pelayanan ANC terpadu pada setiap ibu hamil	Belum maksimal pelaksanaannya secara standar	Menyusun jadwal kegiatan sesuai dengan desk job	Kepala Dinas	45292

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tersedianya sarana pelayanan USG ibu hamil di 7 Puskesmas				
			Pelaksanaan kelas ibu hamil	Belum semua ibu hamil mendapatkan kelas ibu hamil secara standar	Terlaksananya kelas ibu hamil sesuai standar	Kepala Dinas	44927
			Peningkatan kapasitas tenaga pelayanan KIA	Tenaga kesehatan belum terlatih	Melakukan pelatihan	Kepala Dinas	Januari - Desember 2024
2	angka kesakitan masyarakat yang tinggi	RSP.23.02.05.05.02	Telah ditetapkan tim pengendalian DBD dan Cikungunya	Kesadaran masyarakat kurang	Menyusun jadwal sosialisasi terpadu	Kepala Dinas	45261
			Perwali tentang penanggulangan TB, HIV/AIDS, KTR	Koordinasi lintas sektor yang masih kurang	Sosialisasi	Kepala Dinas	Selama tahun 2024 sesuai jadwal di atas
			Screening pada masyarakat berisiko penyakit menular dan penyakit tidak menular	Kurangnya sediaan farmasi	Melakukan pengadaan sesuai RKO	Kepala Dinas	
			Pemberian obat pencegahan	Penyusunan rencana kebutuhan sediaan farmasi tidak terintegrasi	Menyusun RKO terintegrasi	Kepala Dinas	

### Daftar Rencana Tindak Pengendalian

<b>Nama Pemda : Kota Bima</b> <b>Tahun Penilaian : 2023</b> <b>Tujuan Strategis II : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan</b> <b>Sasaran Strategis VI : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi</b> <b>Urusan Pemerintah :</b>							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I DINAS PERHUBUNGAN</b>							
1	Jalan yang tidak sesuai standar	RSP.23.13.06.17.01	Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait kepemilikan aset jalan yang ada	Kurangnya koordinasi terkait kepemilikan aset jalan yang ada	Melakukan koordinasi dengan pihak pusat dan provinsi secara intens	Kadis	Dec-25
2	Jalan yang tidak sesuai standar	RSP.23.13.06.17.02	Telah dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi	Tidak memiliki kewenangan untuk melakukan rehabilitasi	Melakukan koordinasi dengan pihak pusat dan provinsi	Kadis	Dec-25
3	Jalan yang tidak sesuai standar	RSP.23.13.06.17.03	Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana kelengkapan jalan	Kurangnya data sehingga tidak tersedianya anggaran	Menyiapkan data secara berkala terkait pengajuan anggaran kegiatan	Kadis	Dec-24
4	Peningkatan sarana infrastruktur jalan yang tidak tepat sasaran	RSP.23.13.06.17.04	Melakukan pengajuan terhadap perubahan anggaran ke Tim TAPD	Anggaran tidak tersedia	Mengajukan anggaran terkait penyusunan Dokumen Andalalin, Tatralok dan Mater Plan Transportasi	Kadis	Dec-24

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Area parkir yang tidak sesuai standar	RSP.23.13.06.17.05	Melakukan kontrak kerjasama dengan juru parkir	Adanya parkir liar dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait serta kurangnya fasilitas parkir yang tidak memenuhi standar	Sosialisasi secara berkala terhadap pengguna parkir, melakukan tindakan terhadap parkir liar, menyiapkan fasilitas ruang parkir sesuai standar, melengkapi sarana prasarana parkir	Kadis	Dec-24
			Menyiapkan fasilitas parkir yang sesuai standar	Tidak tersedianya ruang parkir yang sesuai standar	Melakukan sosialisasi Perda Parkir kepada pengguna dan juru parkir	Kadis	Dec-24
<b>II DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>							
1	Menurunnya Jumlah investasi	RSP.23.27.06.19.01	Monitoring Harga Barang Kebutuhan Pokok ditingkat pengecer dan ditingkat Distributor	Melaksanakan Operasi Pasar	Kordinasi lintas sektor dengan Bagian Ekonomi, Pertanian, Dinas Ketahanan pangan dan Bulog	Kepala Dinas	Dec-23
2	Menurunnya Jumlah investasi	RSP.23.27.06.19.02	belum ada pengendalian	belum tersedianya regulasi yang berpihak pada investasi	Membuat MOU dengan Pihak Perbankan kemudahan penyaluran permodalan Koperasi dan UMKM	Kepala Dinas	Tahun 2024
3	Menurunnya Jumlah investasi	RSP.23.27.06.19.03	belum ada pengendalian	Data dan Informasi investasi yang belum memadai	Menyusun Data terpadu Koperasi dan UMKM Kota Bima	Kepala Dinas	Tahun 2024
4	Menurunnya Jumlah investasi	RSP.23.27.06.19.04	belum ada pengendalian	Diklat dan Pelatihan yang masih kurang	Diklat/ Pelatihan Perkoperasian	Kepala Dinas	Tahun 2024
5	Menurunnya Jumlah investasi	RSP.23.27.06.19.05	Pembangunan Sarana distribusi Perdagangan	Pemanfaatan sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang ada	Pembangunan sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan bersumber dari Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan RI dan APBD	Kepala Dinas	Tahun 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Menurunnya Jumlah investasi	RSP.23.27.06.19.06	Monitoring Harga Barang Kebutuhan Pokok ditingkat pengecer dan ditingkat Distributor	Pelaksanaan Operasi Pasar	Pembangunan sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan bersumber dari Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan RI dan APBD	Kepala Dinas	Triwulan III Tahun 2024
7	PAD belum maksimal	RSP.23.26.06.19.07	Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaku Usaha	Melakukan Penindakan terhadap Pelaku Usaha yng tidak taat terhadap pembayaran Retribusi/ Sewa Toko dan Kios	Kordinasi Lintas Sektor dengan Satuan Pol PP	Kepala Dinas	Triwulan I Tahun 2024
8	PAD belum maksimal	RSP.23.26.06.19.08	Optimalisasi Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pelaku Usaha	Pembinaan Berkelanjutan terhadap Pelaku Usaha Pengguna Fasilitas Toko Kios Pemerintah	Penertiban Pelaku Usaha	Kepala Dinas	Triwulan I Tahun 2024
9	PAD belum maksimal	RSP.23.26.06.19.09	Belum ada Pengendalian	Adanya Pedagang Musiman	Memberikan kesempatan kepada pedagang lain untuk menempati lapak pedagang musiman	Kepala Dinas	
10	Terjadi peningkatan inflasi	RSP.23.26.06.19.10	Monitoring Harga Barang Kebutuhan Pokok ditingkat pengecer dan ditingkat Distributor	Pelaksanaan Operasi Pasar	Kordinasi lintas sektor dengan Bagian Ekonomi, Pertanian, Dinas Ketahanan pangan dan Bulog	Kepala Dinas	Januari dan Oktober 2024
11	Terjadi peningkatan inflasi	RSP.23.26.06.19.11	Monitoring Harga Barang Kebutuhan Pokok ditingkat pengecer dan ditingkat Distributor	Pelaksanaan Operasi Pasar	Kordinasi lintas sektor dengan Bagian Ekonomi, Pertanian, Dinas Ketahanan pangan dan Bulog	Kepala Dinas	Januari dan Oktober 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Terjadi peningkatan inflasi	RSP.23.26.06.19.12	Monitoring Harga Barang Kebutuhan Pokok ditingkat pengecer dan ditingkat Distributor	Pelaksanaan Operasi Pasar	Kordinasi lintas sektor dengan Bagian Ekonomi, Pertanian, Dinas Ketahanan pangan dan Bulog	Kepala Dinas	Januari dan Oktober 2024
13	Menurunnya Jumlah Modal Koperasi	RSP.23.15.06.19.13	Diklat Penyusunan SOP dan Peraturan Khusus Koperasi	SDM Pengurus yang masih kurang	pendampingan penyusunan SOP dan peraturan khusus koperasi	Kepala Dinas	Nov-23
14	Menurunnya Jumlah Modal Koperasi	RSP.23.15.06.19.14	Penyuluhan Perkoperasian Kepada kelompok masyarakat	kurangnya informasi dan publikasi tentang koperasi	publikasi informasi perkoperasian melalui media sosial	Kepala Dinas	Nov-23
15	Menurunnya Jumlah Modal Koperasi	RSP.23.15.06.19.15	Penyuluhan Perkoperasian Kepada kelompok masyarakat	maraknya investasi ilegal yang berkedok koperasi	publikasi informasi perkoperasian melalui media sosial	Kepala Dinas	Nov-23
16	Menurunnya Jumlah Modal Koperasi	RSP.23.15.06.19.16	Diklat manajemen kelembagaan Koperasi bagi pengurus dan pengelola	Kurangnya minat pengurus dan pengelola untuk mengikuti diklat	pendampingan kelembagaan koperasi	Kepala Dinas	Nov-23
17	Menurunnya Jumlah Modal Koperasi	RSP.23.15.06.19.17	Diklat Akuntansi Bagi Pengurus koperasi	Kurangnya Kemampuan SDM Pengelola dalam mengelola koperasi	pendampingan kelembagaan dan usaha koperasi	Kepala Dinas	Nov-23
<b>III DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>							
1	PERIKANAN TANGKAP Produksi perikanan Tangkap Semakin Menurun	RSP.23.23.06.22.01	-	-	melaksanakan Kajian Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	Kepala Dinas	TW I 2024
2	PERIKANAN TANGKAP Produksi perikanan Tangkap Semakin Menurun	RSP.23.23.06.22.02	1. Penyediaan Data dan informasi Sumber daya ikan 2.perbaikan terumbu karangan dan pengendalian sampah laut	Kebijakan prioritas pembangunan fasilitas penangkapan.	Pengawasan usaha Perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan	Kepala Dinas	TW II 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
3	PERIKANAN TANGKAP Produksi perikanan Tangkap Semakin Menurun	RSP.23.23.06.22.03	pengadaan alat bantu tangkap (runponisasi dan kapal penangkap ikan),	Kebijakan prioritas pembangunan fasilitas penangkapan.	Mengadakan pembangunan fasilitas dermaga pembongkaran ikan dan pengadaan sarana dan prasarana tangkap.	Kepala Dinas	TW II 2024
4	PERIKANAN TANGKAP Produksi perikanan Tangkap Semakin Menurun	RSP.23.23.06.22.04	pengadaan dermaga pembongkaran ikan.	Mebutuhkan anggaran yang cukup besar	Akan dialokasikan anggaran	Kepala Dinas	TW III 2024
5	PERIKANAN TANGKAP Produksi perikanan Tangkap Semakin Menurun	RSP.23.23.06.22.05	Pelatihan nelayan	Tingkat pemahaman nelayan yang berbeda	Fasilitasi pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan dan Peningkatan Kapasitas Nelayan	Kepala Dinas	TW III 2024
6	PERIKANAN BUDIDAYA Produksi perikanan Budidaya Semakin Menurun	RSP.23.23.06.22.06	Penyediaan Sarana Perikanan Budidaya	Mebutuhkan tambahan anggaran	Melakukan koordinasi dengan DKP Propinsi dan KKP	Kepala Dinas	TW. I Tahun 2024
7	PERIKANAN BUDIDAYA Produksi perikanan Budidaya Semakin Menurun	RSP.23.23.06.22.07	-	Sosialisasi terhadap keberadaan LPUMKP belum dilakukan	Mensosialisasikan keberadaan LPUMKP (Lembaga Pengelola Usaha Modal Kelautan dan Perikanan) kepada pelaku usaha	Kepala Dinas	TW. III Tahun 2024
8	Daya dukung lingkungan yang semakin menurun	RSP.23.23.06.22.08	Pemantauan lingkungan budidaya	Waktu pemantauan yang masih kurang	Menambah waktu pemantaun	Kepala Dinas	TW. I Tahun 2024
9	Pemanfaatan teknologi budidaya perikanan yang masih minim	RSP.23.23.06.22.09	Bimbingan Tekhnis terhadap Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan)	Pokdakan belum semuanya mengikuti Bimtek Karena keterbatasan anggaran	Memaksimalkan Bimtek dan menambah anggaran	Kepala Dinas	TW. III Tahun 2024
10	Fluktuasi Harga	RSP.23.23.06.22.10					
11	PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN yang belum maksimal	RSP.23.23.06.22.11	Sosialisasi dan Pembinaan	Sosialisasi dan pembinaan belum menyeluruh	Pembangunan cold storage pabrik es di Wiayah Kolo	Kepala Dinas	TW II Tahun 2024



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
12	PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN yang belum maksimal	RSP.23.23.06.22.12	Sosialisasi dan Pembinaan	Pada umumnya Nelayan terikat perjanjian dengan pengusaha yang menampung hasil tangkapannya	fasilitasi ketersediaan bahan baku dengan menjembatani hubungan kerjasama antara nelayan dan pengolah hasil perikanan	Kepala Dinas	TW I Tahun 2024
13	PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN yang belum maksimal	RSP.23.23.06.22.13	Sosialisasi dan Gelar Produk Olahan Perikanan/ Bazar	Sosialisasi dan bazar belum menyeluruh	Optimalisasi sosialisasi, bazar serta promosi produk olahan baik secara online maupun offline	Kepala Dinas	TW II Tahun 2024
14	PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN yang belum maksimal	RSP.23.23.06.22.14	Sosialisasi dan pembinaan	Adminitrasi pencairan pinjaman modal usaha yang panjang dan pencairan yang lama sehingga menyebabkan pelaku usaha enggan meminjam modal di lembaga perbankan	Optimalisasi Sosialisasi , Pembinaan dan Fasilitasi akses ke lembaga perbankan / lembaga lainnya seperti LPMUKP (Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Perikanan) di bawah naungan KKP	Kepala Dinas	TW II Tahun 2024
15	Harga Jual Produk Olahan Menurun	RSP.23.23.06.22.15	Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha supaya Mengikuti standar prosedur SKP	Mengikuti standar prosedur SKP	Membangun MoU dengan BPOM, Dikes, Dinas Propinsi, serta KKP.	Kepala Dinas	TW II Tahun 2024
<b>IV DINAS PERTANIAN</b>							
1	Target pertumbuhan produksi pertanian yang belum tercapai	RSP.23.25.06.24.01	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Petani dengan tingkat pendidikan yang rendah tidak akan mampu menyerap pengetahuan dan teknologi yang diterapkan	Perlu dilakukan transfer pengetahuan dan teknologi kepada seluruh Petani agar petani mampu bersaing di era moderenisasi saat ini	Kepala dinas	Triwulan I TA 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Kompetensi tenaga pendamping yang belum memadai	Perlu dilakukan pelatihan dan semacamnya untuk mengoptimalkan tenaga pendamping	Kepala dinas	Triwulan I TA 2024
			Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Akses data kondisi dan sebaran pemanfaatan prasarana pertanian belum dapat dimanfaatkan secara Optimal	Perlu dilakukan pendataan kondisi dan sebaran pemanfaatan Prasarana pertanian yang terperiodik dan berkala	Kepala dinas	Triwulan I TA 2024
			Pembangunan, rehabilitasi daneliharaan prasarana pertanian dan prasarana pertanian lainnya	Disitribusi prasarana pertanian dan prasarana pertanian lainnya yang terbangun,terehabilitasi dan terpelihara belum menjangkau seluruh wilayah pertanian di Kota Bima	Perlu adanya prioritas penganggaran untuk kegiatan yang mendukung peningkatan Produksi pertanian	Kepala dinas	Triwulan I TA 2024
2	Target pertumbuhan produksi pertanian yang belum tercapai	RSP.23.25.06.24.02	Peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan	Masih kurangnya kompetensi penyuluh dan petani terhadap adopsi teknologi	Perlu dilakukan BIMTEK yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi dan teknologi	Kepala dinas	Triwulan I TA 2024
3	Kebijakan pembiayaan yang belum berpihak kepada petani	RSP.23.25.06.24.03	Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian	Akses pembiayaan bagi petani blm terbuka secara maksimal	Perlu membangun MOU dengan Pihak Pembiayaan	Kepala dinas	Triwulan I TA 2024
4	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang belum maksimal	RSP.23.25.06.24.04	Pengendalian Orgainisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Masih kurangnya Tenaga POPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Perlu kiranya dilakukan perekrutan Tenaga POPT Dinas Pertanian Kota Bima	Kepala dinas	TA 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	masih kurang beragamnya jenis kegiatan yang dilakukan untuk mendukung Penanganan Dampak Perubahan Iklim ini	Perlu memperbanyak referensi kegiatan yang sesuai dengan kondisi geografis dan kecukupan anggaran untuk Penanganan Dampak Perubahan Iklim ini	Kepala dinas	TA 2024
			Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan zoonosis	Masih kurangnya anggaran APBD untuk memfasilitasi Kegiatan pengendalian dan Penanggulangan penyakit hewan zoonosis	Diperlukan Support anggaran dari APBD untuk kegiatan ini, tidak hanya mengandalkan anggaran dari bantuan Propinsi atau dana dari Pusat	Kepala dinas	TA 2024
5	Cakupan ketersediaan air irigasi tidak seimbang dengan luas lahan	RSP.23.25.06.24.05	Pembangunan, rehabilitasi daneliharaan prasarana pertanian dan prasarana pertanian lainnya	Distribusi dari pengadaan infrastruktur irigasi yang terbangun,terehabilitasi dan terpelihara masih bisa dioptimalkan lagi	Perlu update pendataan terkait infrastruktur irigasi untuk dijadikan acuan pemerintah dalam menyediakan atau membangun infrastruktur yang baru	Kepala dinas	Triwulan I TA 2024
6	Terjadinya alih fungsi lahan	RSP.23.25.06.24.06	Terlaksananya pendampingan dan sosialisasi Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Sosialisai yang dilakukan belum menyentuh keseluruhan wilayah Kota Bima	Melakukan kegiatan monitoring dan sosialisasi ke seluruh wilayah kota Bima	Kepala dinas	Triwulan I TA 2024
<b>VI</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP</b>						
1	Kurangnya minat investor	RSP.23.16.06.20.01	Melakukan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Anggaran kegiatan Promosi kecil	Mengajukan anggaran promosi yang memadai pada perencanaan APBD tahun 2024	Kepala Dinas	Triwulan IV

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Kurangnya minat investor	RSP.23.16.06.20.02	Perwali Tentang Investasi Daerah	masih ada beberapa regulasi tentang kemudahan investasi yang belum tersusun	Membuat Regulasi terkait kemudahan Investasi	Kepala Dinas	Triwulan IV
3	Kurangnya minat investor	RSP.23.16.06.20.03					
4	Data kegiatan penanaman modal yang belum diperbaharui dan dilaporkan	RSP.23.16.06.20.04	Melakukan Sosialisasi dan Bimtek tentang tatacara pengisian LKPM serta mendampingi kepada pelaku usaha yang belum paham tentang cara pengisian LKPM.	Tidak semua Pelaku Usaha dapat diberikan bimtek serta memahami apa yang disosialisasikan terkait cara pengisian LKPM.	Sosialisasi dan Bimtek kepada Pelaku Usaha dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran yang ada.	Kepala Dinas	Triwulan III
5	Data kegiatan penanaman modal yang belum diperbaharui dan dilaporkan	RSP.23.16.06.20.05	Melakukan Sosialisasi dan Bimtek tentang tatacara pengisian LKPM serta mendampingi kepada pelaku usaha yang belum paham tentang cara pengisian LKPM.	Tidak semua Pelaku Usaha dapat diberikan bimtek serta memahami apa yang disosialisasikan terkait cara pengisian LKPM.	Sosialisasi dan Bimtek kepada Pelaku Usaha dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran yang ada.	Kepala Dinas	Triwulan III
<b>VII DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>							
1	Ketersediaan Baku Mutu Air yang belum menjangkau ke seluruh masyarakat	RSP.23.03.06.06.01	memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang ada di hulu agar dapat memberikan sebagian sumber airnya kepada masyarakat di hilir	anggapan bahwa kebutuhan tidak mencukupi jika sebagian sumber airnya di ambil oleh daerah lain	memberikan pemahaman melalui tokoh masyarakat dan aparat kelurahan serta penjelasan teknis kepada masyarakat terutama yang menolak	Kepala Dinas	Tw 1 Tahun 2024
2	Ketersediaan Baku Mutu Air yang belum menjangkau ke seluruh masyarakat	RSP.23.03.06.06.02	Melakukan usulan dengan anggaran DAK Tahun berikutnya	Belum ada dana pendukung selain dana DAK	mencari sumber anggaran selain DAK dan berkoordinasi dengan Bappeda Kota Bima	Kepala Dinas	Tw 3 Tahun 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Umur Ekonomis Jalan tidak sesuai rencana	RSP.23.03.06.06.03	Perencanaan dan pengawasan fisik	Pengawasan belum dilaksanakan secara rutin	Pemeliharaan Jalan Secara rutin dan Berkala, serta memberikan teguran tertulis kepada konsultan pengawas	Kepala Dinas	TW 2 Tahun 2024
4	Umur Ekonomis Jalan tidak sesuai rencana	RSP.23.03.06.06.04	-	-	Melakukan Bimtek dan Sertifikasi pelaksana Teknis penyedia Jasa Perencana, Pengawas dan penyedia	Kepala Dinas	TW 2 Tahun 2024
<b>VII DINAS PRIWISATA DAN KEBUDAYAAN BMA</b>							
1	Destinasi wisata yang kurang menarik	RSP.23.24.06.23.01	Pengadaan anggaran untuk sarana dan prasarana	Revitalisasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana belum dilakukan dengan maksimal	Melengkapi sarana penunjang lainnya dan pemeliharaan secara maksimal	Kepala Dinas	Triwulan III Tahun 2024
2	Destinasi wisata yang kurang menarik	RSP.23.24.06.23.02	Kerjasama promosi pariwisata dengan pihak Bandara Sultan Muhammad Salahudin	Kebijakan kerjasama promosi dengan pihak Bandara Sultan Muhammad Salahudin belum efektif	Melakukan penambahan media promosi pariwisata di tempat-tempat strategis	Kepala Dinas	Triwulan III Tahun 2024
3	Destinasi wisata yang kurang menarik	RSP.23.24.06.23.03	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Pembangunan sektor pariwisata hanya berpusat pada pembangunan sarana prasarana pendukung bukan atraksi	Pengadaan penambahan atraksi wisata seperti wisata air	Kepala Dinas	Triwulan II Tahun 2024
4	akses untuk kawasan pengembangan wisata kurang memadai	RSP.23.24.06.23.04	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Kebijakan kerjasama dengan penyedia jasa transportasi belum efektif	Mengupayakan pengadaan alat transportasi khusus wisatawan yang dikelola sendiri oleh pemerintah	Kepala Dinas	Triwulan III Tahun 2024
5	kolaborasi dengan penyedia jasa pariwisata belum terbangun	RSP.23.24.06.23.05	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Hanya membentuk organisasi kelompok sadar wisata yang belum optimal fungsinya	Mendorong terbentuknya organisasi pengelola pariwisata seperti ASITA, HPI dan PHRI	Kepala Dinas	Triwulan III Tahun 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Kesiapan penyedia jasa pariwisata yang masih belum memadai	RSP.23.24.06.23.06	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Kebijakan pengembangan SDM pariwisata belum sampai tersertifikasi LSUP	Melaksanakan kerjasama dengan LSUP dalam pengembangan SDM bidang Pariwisata	Kepala Dinas	Triwulan IV Tahun 2024
7	Pengelolaan Destinasi wisata tidak maksimal	RSP.23.24.06.23.07	Pelatihan untuk SDM pariwisata baik ASN maupun masyarakat umum	Kebijakan pelatihan SDM pariwisata masih belum tepat sasaran	Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk SDM pariwisata yang tepat sasaran dan kredibilitas	Kepala Dinas	Triwulan IV Tahun 2024
<b>VIII</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>						
1	Kebijakan Peruntukan lahan yang belum berpihak pada meningkatnya kualitas lingkungan hidup	RSP.23.10.06.15.01	Regulasi terkait KLHS RDTR wilayah di 4 Kecamatan	Belum adanya regulasi di wilayah Kec. Ras. Nae Timur	Regulasi terkait KLHS RDTR untuk wilayah Rasanae Timur	Kepala Dinas	Jan-24
2	Kebijakan Peruntukan lahan yang belum berpihak pada meningkatnya kualitas lingkungan hidup	RSP.23.10.06.15.02	Belum terdapat pengendalian	Belum adanya Regulasi terkait TAta guna Lahan	Regulasi Terkait TAta Guna LAhan, RTRW dan RPD	Kepala Dinas	Dec-24
<b>IX</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>						
1	Kejadian yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	RSP.23.05.06.10.01	Adanya pendataan anggota Satlinmas yang ada pada Wilayah Kelurahan	Perlu dilakukan pendataan anggota Satlinmas yang ada pada Wilayah Keluraha	MPenegakan PERDA/PERKADA	Bidang Perlindungan Masyarakat, SDM dan Sarana Prasarana / Kabid SDM	3 Bulan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Kejadian yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	RSP.23.05.06.10.02	Pelaksanaan tugas yang tidak optimal	Perlu melaksanakan Bintek, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Melaksanakan Bintek, Pendidikan dan Pelatihan	Bidang Perlindungan Masyarakat, SDM dan Sarana Prasarana / Kabid SDM	1 Bulan
3	Kejadian yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	RSP.23.05.06.10.03	Jangkauan penangan yang tidak optimal	Perlu penambahan anggota personil Pol.PP	Penambahan anggota personil Pol.PP	Bidang Perlindungan Masyarakat, SDM dan Sarana Prasarana / Kabid SDM	1 Bulan
4	Kejadian yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	RSP.23.05.06.10.04	Pelaksanaan tugas yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum belum maksimal	Dilakukan penambahan Sarana dan Prasarana yang memadai	Penambahan Sarana dan Prasarana	Bidang Perlindungan Masyarakat, SDM dan Sarana Prasarana / Kabid SDM	3 Bulan

## Daftar Rencana Tindak Pengendalian

<b>Nama Pemda : Kota Bima</b> <b>Tahun Penilaian : 2023</b> <b>Tujuan Strategis II : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan masyarakat</b> <b>Sasaran Strategis VII : Meningkatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan</b> <b>Urusan Pemerintah :</b>							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>DINAS TENAGAKERJA</b>						
1	Belum terusunnya dokumen ketenagakerjaan yang memadai	RSP.23.07.07.09.01	Belum ada pengendalian yang dilakukan	Kurangnya database ketenagakerjaan sebagai bahan penyusunan dokumen PTKK	Melakukan Penyusunan Dokumen PTKK	Kepala Dinas	Apr-24
2	Jumlah anak usia 17-24 tahun yang tidak bekerja	RSP.23.07.07.09.02	Memberikan pelatihan kepada angkatan kerja usia muda	Kurangnya angkatan kerja usia muda yang mengikuti pelatihan kerja	Melaksanakan pelatihan sesuai kebutuhan angkatan kerja usia muda	Kepala Dinas	Sep-24
3	Jumlah anak usia 17-24 tahun yang tidak bekerja	RSP.23.07.07.09.03	Menyebarkan informasi lowongan kerja	Informasi lowongan kerja tidak tersebar tepat sasaran	Memiliki database pencari kerja sehingga informasi lowongan kerja dapat disebar dengan tepat	Kepala Dinas	Dec-24
4	Jumlah pengangguran terbuka yang meningkat	RSP.23.07.07.09.04	Memberikan pelatihan yang bertujuan membuka peluang usaha baru	Usaha baru yang tercipta tidak mampu memenuhi kebutuhan pencari kerja	Memperluas kesempatan kerja yang tidak hanya di dalam daerah namun juga antar daerah dan antar negara	Kepala Dinas	Septemer 2024
5	Jumlah pengangguran terbuka yang meningkat	RSP.23.07.07.09.05	Memberikan pelatihan yang bertujuan membuka peluang usaha baru	Usaha baru yang tercipta tidak mampu memenuhi kebutuhan pencari kerja	Memperluas kesempatan kerja yang tidak hanya di dalam daerah namun juga antar daerah dan antar negara	Kepala Dinas	Septemer 2024



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Keterampilan yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar	RSP.23.07.07.09.06	Belum ada pengendalian yang dilakukan	Masih terdapat pelatihan yang tidak sesuai kebutuhan	menyusun data proyeksi dan analisis kebutuhan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar secara berkala	Kepala Dinas	Januari-Maret 2024
7	Keterampilan yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar	RSP.23.07.07.09.07	Telah dilakukan uji kompetensi dari BNSP	Kelembagaan dan pengelola BLK belum memiliki kompetensi yang memadai	sertifikasi kompetensi pengelola BLK Akreditasi BLK	Kepala Dinas Kepala Dinas	Tahun 2024 Tahun 2024
8	Keterampilan yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar	RSP.23.07.07.09.08	Telah ada aturan tentang standarisasi sarpras permenaker 13 tahun xxxx	masih adanya sarpras yang belum sesuai dengan permenaker 13 tahun xxx	Rencana kebutuhan prasarana yang sesuai standar	Kepala Dinas	Nov-23
			DED telah tersusun		Pembangunan gedung BLK	Kepala Dinas	Tahun 2024-2026
					Pemenuhan kebutuhan sarpras yang sesuai standar	Kepala Dinas	Tahun 2024-2026
9	Keterampilan yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar	RSP.23.07.07.09.09	Telah dilakukan pendaftaran secara online	belum tersusunnya mekanisme seleksi peserta pelatihan	membuat instrumen seleksi	Kepala Dinas	Mar-24
10	Keterampilan yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar	RSP.23.07.07.09.10	Telah menyusun persyaratan recruitment peserta	Masih adanya personal penyeleksi yang tidak berintegritas	Menyusun kode etik	Kepala Dinas	Maret-April 2024
			Sosialisasi		menyusun tim seleksi yang independen	Kepala Dinas	Feb-24
11	Akses Permodal yang masih kurang	RSP.23.07.07.09.11	sebagian calon wirausaha telah mendapat bantuan alat dan modal dari pemerintah	Akses permodalan dari lembaga keuangan belum terserap secara maksimal	Membangun MOU dengan pihak perbankan yang memuat penyederhanaan persyaratan	Kepala Dinas	tahun 2024
12	Koordinasi lintas sektor yang belum maksimal	RSP.23.07.07.09.12	Sudah adanya pendataan melalui aplikasi siap kerja	Data peserta lintas PD belum tersedia secara memadai	Pengembangan aplikasi ketenagakerjaan	Kepala Dinas	Jul-24

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Koordinasi lintas sektor yang belum maksimal	RSP.23.07.07.09.13	Membuat MOU dengan beberapa perangkat Daerah lainnya	Belum terbangunnya sinergi antar OPD	Membangun MOU terpadu dengan instansi terkait	Kepala Dinas	Apr-24
					Melakukan ketenagakerjaan berkala	Rakor secara berkala	Kepala Dinas
14	Tata kelola usaha yang masih belum maksimal	RSP.23.07.07.09.14	Belum ada pengendalian yang dilakukan	Belum dilakukannya peningkatan pemahaman pengelola usaha	Pelatihan manajemen usaha	Kepala Dinas	Aug-24
15	Meningkatnya jumlah aduan konflik Hubungan Industrial	RSP.23.07.07.09.15	Melakukan pembinaan kepada perusahaan dan tenaga kerja terkait aturan ketenagakerjaan	Perusahaan dan tenaga kerja masih abai terhadap peraturan ketenagakerjaan	Melakukan pembinaan intensif kepada perusahaan dan tenaga kerja terkait aturan ketenagakerjaan	Kepala Dinas	Dec-24
16	Meningkatnya jumlah aduan konflik Hubungan Industrial	RSP.23.07.07.09.16	Memberikan informasi terkait hak dan kewajiban bagi pekerja	Kurangnya kesadaran dari pemberi kerja dan pekerja terkait hak dan kewajiban masing-masing	Melakukan sosialisasi terkait hak dan kewajiban pemberi kerja serta pekerja	Kepala Dinas	Jul-24
17	Meningkatnya jumlah kecelakaan kerja	RSP.23.07.07.09.17	Melakukan sosialisasi terkait pentingnya penerapan K3	Rendahnya kesadaran pekerja terkait pentingnya penerapan K3	Melakukan sosialisasi kepada pemberi kerja dan pekerja terkait pentingnya penerapan K3	Kepala Dinas	Jul-24
18	Meningkatnya jumlah kecelakaan kerja	RSP.23.07.07.09.18	Melakukan sosialisasi terkait pentingnya penggunaan sarana dan prasarana K3	Rendahnya kesadaran dalam menyediakan sarana dan prasarana K3	Melakukan sosialisasi terkait pentingnya pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana K3	Kepala Dinas	Oct-24
19	Rendahnya perusahaan yang menerapkan UMK	RSP.23.07.07.09.19	Melakukan sosialisasi terkait penerapan UMK	Pekerja siap digaji di bawah UMK selama bisa mendapatkan pekerjaan	Melakukan sosialisasi kepada pekerja dan pembinaan kepada pemberi kerja terkait penerapan UMK	Kepala Dinas	Dec-24

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Kurangnya peserta BPJS Ketenagakerjaan	RSP.23.07.07.09.20	Melakukan sosialisasi tentang jaminan sosial ketenagakerjaan	Pekerja kurang memahami pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan selama mendapatkan gaji	Melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait pentingnya terdaftar pada jaminan sosial ketenagakerjaan	Kepala Dinas	Dec-24
<b>II DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP</b>							
1	Kurangnya minat investor	RSP.23.16.07.20.01	Melakukan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Anggaran kegiatan Promosi kecil	Mengajukan anggaran promosi yang memadai pada perencanaan APBD tahun 2024	Koordinator Penanaman Modal	Triwulan IV
2	Kurangnya minat investor	RSP.23.16.07.20.02				Koordinator Penanaman Modal	Triwulan IV
3	Kurangnya minat investor	RSP.23.16.07.20.03	Melakukan Kegiatan Promosi dan koordinasi dengan pihak terkait	Anggaran kegiatan Promosi dan koordinasi kecil	Mengajukan anggaran promosi dan koordinasi yang memadai pada perencanaan APBD tahun 2024	Koordinator Penanaman Modal	Triwulan IV
4	Data kegiatan penanaman modal yang belum diperbaharui dan dilaporkan	RSP.23.16.07.20.04	Melakukan Sosialisasi dan Bimtek tentang tatacara pengisian LKPM serta mendampingi kepada pelaku usaha yang belum paham tentang cara pengisian LKPM.	Tidak semua Pelaku Usaha dapat diberikan bimtek serta memahami apa yang disosialisasikan terkait cara pengisian LKPM.	Sosialisasi dan Bimtek kepada Pelaku Usaha dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran yang ada.	Koordinator Penanaman Modal	Triwulan III
5	Data kegiatan penanaman modal yang belum diperbaharui dan dilaporkan	RSP.23.16.07.20.05	Melakukan Sosialisasi dan Bimtek tentang tatacara pengisian LKPM serta mendampingi kepada pelaku usaha yang belum paham tentang cara pengisian LKPM.	Tidak semua Pelaku Usaha dapat diberikan bimtek serta memahami apa yang disosialisasikan terkait cara pengisian LKPM.	Sosialisasi dan Bimtek kepada Pelaku Usaha dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran yang ada.	Koordinator Penanaman Modal	Triwulan III

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP</b>							
1	Menurunnya Jumlah investasi	RSP.23.27.07.19.01	belum ada pengendalian	belum tersedianya regulasi yang berpihak pada investasi	Membuat MOU dengan Pihak Perbankan kemudahan penyaluran permodalan Koperasi dan UMKM	Kepala Dinas	Tahun 2024
2	Menurunnya Jumlah investasi	RSP.23.27.07.19.02	belum ada pengendalian	Data dan Informasi investasi yang belum memadai	Menyusun Data terpadu Koperasi dan UMKM Kota Bima	Kepala Dinas	Tahun 2024
3	Menurunnya Jumlah investasi	RSP.23.27.07.19.03	belum ada pengendalian	Diklat dan Pelatihan yang masih kurang	Diklat/ Pelatihan Perkoperasian	Kepala Dinas	Tahun 2024
4	Menurunnya Jumlah investasi	RSP.23.27.07.19.04	Pembangunan Sarana distribusi Perdagangan	Pemanfaatan sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang ada	Pembangunan sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan bersumber dari Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan RI dan APBD	Kepala Dinas	Tahun 2024

## Daftar Rencana Tindak Pengendalian

<b>Nama Pemda : Kota Bima</b> <b>Tahun Penilaian : 2023</b> <b>Tujuan Strategis II : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan masyarakat</b> <b>Sasaran Strategis VIII : Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan</b> <b>Urusan Pemerintah :</b>							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>							
1	Angka partisipasi sekolah rendah	RSP.23.01.08.04.01	Melakukan sosialisasi kepada seluruh kepala sekolah terkait rentang usia peserta didik per jenjang	Kecenderung untuk tidak mengikuti regulasi batasan usia yang ditentukan oleh Kemendikbud	Melakukan Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi ke sekolah terkait pelaksanaan PPDB	Kadis	Triwulan II 2024
2	Angka partisipasi sekolah rendah	RSP.23.01.08.04.02	Melakukan Sosialisasi Perwali Wajar Dikdas	Sosialisasi Perwali Wajar Dikdas hanya diikuti oleh unsur sekolah	Mengundang Tokoh Masyarakat, Kelurahan dan RT/RW dalam sosialisasi perwali wajar dikdas	Kadis	Triwulan I 2024
<b>II DINAS KESEHATAN</b>							
1	Akses penjaminan kesehatan masyarakat belum maksimal		Telah dilaksanakan kegiatan rekonsiliasi terkait data kepesertaan dan iuran jaminan kesehatan per triwulan	Belum maksimal koordinasi dengan OPD teknis seperti Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, Camat dan Lurah	Pembentukan tim pengelola jaminan kesehatan masyarakat tingkat kota Bima	Kepala Dinas	Jan-24
				Data base kepesertaan belum benar-benar valid sesuai keadaan di setiap kelurahan dan kecamatan	Melakukan pertemuan koordinasi lintas OPD teknis terkait	Kepala Dinas	Mar-24

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III DINAS SOSIAL</b>							
1	Pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak maksimal	RSP.23.06.08.08.01	Koordinasi dengan instansi terkait secara beerkala setiap bulannya	Sebagian data pengguna jaminan kesehatan belum terupdate	Membuat database pengguna jaminan kesehatan kota Bima	Kepala Dinas	Tahun 2024
2	Pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak maksimal	RSP.23.06.08.08.02	Bimtek penguatan kapasitas SDM PSKS	Peserta Bimtek belum memiliki sertifikat yang terstandar	Melakukan pelatihan sertifikasi pada lembaga yang tersertifikasi	Kepala Dinas	Jun-24
3	Pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak maksimal	RSP.23.06.08.08.03	Telah dilakukan Koordinasi pada saat pemberian bantuan melalui korespondensi	Belum tersusun secara terintegrasi pola penanganan kemiskinan Kota Bima	Melakukan rapat koordinasi secara berkala tentang penanganan kemiskinan	Kepala Dinas	Maret dan Agustus 2024
4	Pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak maksimal	RSP.23.06.08.08.04	Basis data yang masih bersifat offline	Data yang tidak dapat diakses oleh massyarakat secara luas	akan dibuat data yang dapat diakses oleh masyarakat secara online	Kepala Dinas	Tahun 2024
5	Timbulnya kecemburuan sosial ditengah masyarakat	RSP.23.06.08.08.05	Sosialisasi dengan cakupan yang masih terbatas	Masyarakat belum terpapar informasi secara utuh	Menyusun kriteria penerima manfaat dengan jelas	Kepala Dinas	Feb-24
					Melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat	Kepala Dinas	Mar-24
<b>IV DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>							
1	meningkatnya rumah tidak layak	RSP.23.04.08.07.01	-	-	-	-	-
2	meningkatnya rumah tidak layak huni	RSP.23.04.08.07.02	Melakukan pendataan dan pemberian bantuan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan	Belum dilakukan analisis	Membuat analisis model intervensi penanganan bantuan pasca bencana	Kepala Dinas	TW II,III, dan IV Tahun 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
			Telah terdapat Perwali tentang Pemberian Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan Permen PUPR tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Belum seluruhnya warga terdampak bencana mendapat bantuan	Memberi bantuan terhadap warga terdampak	Kepala Dinas	
			Sudah terbangun koordinasi dengan lintas sektor	Masih adanya penolakan masyarakat untuk program relokasi	Melakukan sosialisasi tentang program relokasi	Kepala Dinas	
3	meningkatnya rumah tidak layak huni	RSP.23.04.08.07.03	Perwali tentang Pemberian Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan Permen PUPR tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Belum dilakukan monitoring terhadap penggunaan material	Melakukan monitoring terhadap penggunaan material	Kepala Dinas	TW III Tahun 2024
4	meningkatnya rumah tidak layak huni	RSP.23.04.08.07.04	Perwali tentang Pemberian Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan Permen PUPR tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Belum semua warga terdampak mendapatkan pengetahuan terhadap konstruksi	Sosialisasi tentang pengetahuan terhadap konstruksi	Kepala Dinas	TW I - II Tahun 2024
<b>V DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>							
1	Bencana Alam	RSP.23.03.08.06.01	Menempatkan bangunan air bersih maupun tangki septik pada daerah yang tidak rawan bencana	ketidapkahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan agar tidak menyebabkan bencana	Berkoordinasi dengan Dinas Terkait DLH, Pertanian untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar sumber air tetap terjaga	Kepala Dinas	Tw 1 Tahun 2024
2	Lahan untuk membangun Infrastruktur tidak tersedia	RSP.23.03.08.06.02	Sosialisasi langsung kepada masyarakat maupun kepada pemerintah setempat	Keengganan masyarakat untuk memberikan lahan	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Kepala Dinas	Tw 3 Tahun 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
3	lembaga pengelola Air Minum dan sanitasi belum efektif	RSP.23.03.08.06.03	Sosialisasi terhadap calon pengelola air minum dan sanitasi	kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana SPAM maupun Tangki Septik	Pelatihan, Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM maupun Tangki Septik agar dapat mengelola Sarana dan prasana agar tetap terawat	Kepala Dinas	Tw 3 Tahun 2024
4	Ketersediaan Baku Mutu Air yang belum menjangkau ke seluruh masyarakat	RSP.23.03.08.06.04	memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang ada di hulu agar dapat memberikan sebagian sumber airnya kepada masyarakat di hilir	anggapan bahwa kebutuhan tidak mencukupi jika sebagian sumber airnya di ambil oleh daerah lain	memberikan pemahaman melalui tokoh masyarakat dan aparat kelurahan serta penjelasan teknis kepada masyarakat terutama yaNg menolak	Kepala Dinas	Tw 1 Tahun 2024
5	Ketersediaan Baku Mutu Air yang belum menjangkau ke seluruh masyarakat	RSP.23.03.08.06.05	Melakukan usulan dengan anggaran DAK Tahun berikutnya	Belum ada dana pendukung selain dana DAK	mencari sumber anggaran selain DAK dan berkoordinasi dengan Bappeda Kota Bima	Kepala Dinas	Tw 3 Tahun 2024
6	Ketersediaan Baku Mutu Air yang belum menjangkau ke seluruh masyarakat	RSP.23.03.08.06.06	-	ketidapkahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan agar tidak menyebabkan kualitas sumber daya air menurun	Berkoordinasi dengan Dinas Terkait DLH, Pertanian untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar sumber air tetap terjaga	Kepala Dinas	Tw 3 Tahun 2024
7	Ketersediaan Baku Mutu Air yang belum menjangkau ke seluruh masyarakat	RSP.23.03.08.06.07	-	ketidapkahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan agar tidak menyebabkan penurunan debit air	Berkoordinasi dengan Dinas Terkait DLH, Pertanian untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar sumber air tetap terjaga	Kepala Dinas	Tw 3 Tahun 2024



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Perencanaan Kebutuhan Penanganan Air Minum dan Sanitasi belum terintegrasi	RSP.23.03.08.06.08	survey dan permintaan data pada kelurahan	anggaran yang besar	Penyusunan database dan pemuktahiran secara berkala	Kepala Dinas	Tw 1 Tahun 2024
9	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat masih Kurang	RSP.23.03.08.06.09	Sosialisasi terhadap calon pengelola air minum dan tangki septik	kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana SPAM maupun Tangki Septik	Koordinasi dengan dinas kesehatan dan pelatihan kepada KPP SPAM maupun KPP Tangki septik	Kepala Dinas	Tw 1 Tahun 2024
10	Tidak tersedianya Lahan	RSP.23.03.08.06.10	Survey dan Sosialisasi tentang kegiatan fisik tahun berjalan	Konflik masih muncul pada saat pelaksanaan pekerjaan fisik	Penyusunan Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan sebagai bahan pertimbangan untuk tahun berikutnya	Kepala Dinas	Tw 1 Tahun 2024
11	Umur Ekonomis Infrastruktur drainase tidak sesuai rencana	RSP.23.03.08.06.11	Pembuatan Bangunan Drainase Perkotaan	Membutuhkan anggaran yang besar	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan dan Berkoordinasi dengan BAPPEDA.	Kepala Dinas	Tw 1 Tahun 2024
12	Umur Ekonomis Infrastruktur drainase tidak sesuai rencana	RSP.23.03.08.06.12	Perencanaan dan pengawasan fisik	Pengawasan belum dilaksanakan secara rutin	Pemeliharaan Sarana Secara rutin dan Berkala, serta memberikan teguran tertulis kepada konsultan pengawas	Kepala Dinas	Tw 1 Tahun 2024
13	Umur Ekonomis Infrastruktur drainase tidak sesuai rencana	RSP.23.03.08.06.13	-	-	Melakukan Bimtek dan Sertifikasi pelaksana Teknis penyedia Jasa Perencana, Pengawas dan penyedia	Kepala Dinas	Tw 1 Tahun 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Umur Ekonomis Infrastruktur drainase tidak sesuai rencana	RSP.23.03.08.06.14	Rahabilitasi Sarana dan Prasarana Drainase	Mebutuhkan anggaran yang besar	Koordinasi dengan Bappeda dan BPKAD, Penyusunan Data dan Informasi Terkait Kondisi Drainase sebagai bahan pertimbangan untuk tahun berikutnya	Kepala Dinas	TW 2 Tahun 2024
15	Perencanaan Kebutuhan tidak tepat sasaran	RSP.23.03.08.06.15	Rahabilitasi Sarana dan Prasarana Drainase	Mebutuhkan anggaran yang besar	Penyusunan Data dan Informasi Terkait Kondisi Drainase sebagai bahan pengambilan keputusan, Koordinasi dengan Dinas Perhubungan	Kepala Dinas	TW 2 Tahun 2024
<b>VI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>							
1	Meningkatnya Kasus Kekerasan pada Perempuan	RSP.23.08.08.12.01	Pembagian alat kewirausahaan pada kelompok perempuan ekonomi kreatif	Pembagian alat kewirausahaan pada kelompok perempuan ekonomi kreatif masih sangat terbatas	Pengadaan alat kewirausahaan pada kelompok perempuan ekonomi kreatif	Kepala Dinas	TW II Tahun 2024
2	Meningkatnya Kasus Kekerasan pada Perempuan	RSP.23.08.08.12.02	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Masih kurangkannya pemahaman masyarakat terkait hak perlindungan terhadap perempuan	Meningkatkan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan	Kepala Dinas	TW II Tahun 2024
3	Meningkatnya Kasus Kekerasan pada Perempuan	RSP.23.08.08.12.03	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Masih kurangkannya pemahaman masyarakat terkait hak perlindungan terhadap perempuan	Meningkatkan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan	Kepala Dinas	TW II Tahun 2024
<b>VII KECAMATAN</b>							
1	pelayanan yang belum sesuai dengan waktu yang ditargetkan	RSP.23.32.08.31.01	Sudah dilakukan pengajuan kebutuhan sesuai standar kebutuhan	Ketersediaan sarana belum sesuai dengan kebutuhan	Menyusun rencana barang kebutuhan milik Daerah	Camat	Nov-23

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
			Penambahan sarpras		Melakukan pengadaan terhadap sarpras	Camat	Maret-april 2024
2	pelayanan yang belum sesuai dengan waktu yang ditargetkan	RSP.23.32.08.31.02	Telah tersusun SOP	Beberapa Mekanisme prosedur yang belum disosialisasikan dengan pihak internal dan eksternal	melakukan Pembahasan dan sosialisasi terkait SOP yang telah dibuat	Camat	Oct-23
					Membuat alur pelayanan yang dapat diakses oleh semua orang	camat	Nov-23
3	pelayanan yang belum sesuai dengan waktu yang ditargetkan	RSP.23.32.08.31.03	Pernah ditunjuk admin untuk e-lapor, e-monev dan pembimbingan renstra, dan saki	SDM pelayanan publik belum dilakukan peningkatan kompetensi	Pelatihan tata kelola pelayanan public	camat	May-24
<b>VIII KECAMATAN</b>							
1	Angka Kelahiran Meningkat	RSP.23.12.08.13.01	Pemberian layanan informasi kesehatan reproduksi kepada remaja	Kurang tersedianya layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif	Memberikan sosialisasi atau layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan ramah remaja secara intensif	Kepala Dinas (DPPKB)	Tahun 2024
2	Angka Kelahiran Meningkat	RSP.23.12.08.13.02	Pengelolaan alat dan obat kontrasepsi	Alat dan obat kontrasepsi yang kedaluwarsa	Update manajemen pengelolaan alat dan obat kontrasepsi secara berkala	Kepala Dinas (DPPKB)	Tahun 2024
3	Unmeet Need Yang Masih Tinggi	RSP.23.12.08.13.03	Sosialisasi tentang penggunaan alat kontrasepsi	Masih ada anggapan negatif dalam masyarakat tentang penggunaan alat kontrasepsi	Sosialisasi tentang Alat Kontrasepsi, Manfaat dan Kerugiannya serta kesehatan reproduksi	Kepala Dinas (DPPKB)	Tahun 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Adanya Dropout Aseptor KB	RSP.23.12.08.13.04	Pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang alat kontrasepsi dan manfaatnya	Belum seluruh masyarakat mendapatkan informasi layanan konseling kesehatan reproduksi	Pemberian layanan promosi dan konseling kesehatan reproduksi fasilitas kesehatan dan kelompok-kelompok kegiatan masyarakat	Kepala Dinas (DPPKB)	Tahun 2024
5	Ledakan Jumlah Urbanisasi	RSP.23.12.08.13.05	Advokasi Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kurangnya Keterlibatan Mitra Kerja khususnya Dinas Terkait dalam Penggarapan Kegiatan Kependudukan dan KB	Sinkronisasi kegiatan dilapangan antara Dinas terkait dengan Dinas DPPKB	Kepala Dinas (DPPKB)	Tahun 2024

## Daftar Rencana Tindak Pengendalian

<b>Nama Pemda : Kota Bima</b> <b>Tahun Penilaian : 2023</b> <b>Tujuan Strategis III : Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik</b> <b>Sasaran Strategis IX : Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik</b> <b>Urusan Pemerintah :</b>							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>							
1	Laporan yang di sajikan tidak sesuai dengan SAP	RSP.23.28.09.26.01	Permendagri No. 77 Tahun 2020	Kebijakan dan Prosedur Pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani resiko yang teridentifikasi	Melakukan Bimtek terkait Pengelolaan Keuangan	Walikota Bima	Triwulan IV Tahun 2024
2	Laporan yang di sajikan tidak sesuai dengan SAP	RSP.23.28.09.26.02	Selalu Mengupdate data terkait aturan yang baru dikeluarkan oleh Mendagri	Kebijakan dan Prosedur Pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani resiko yang teridentifikasi	Melakukan Bimtek terkait Pengelolaan Keuangan	Walikota Bima	Triwulan IV Tahun 2024
3	Laporan yang di sajikan tidak sesuai dengan SAP	RSP.23.28.09.26.03	Permendagri No. 77 Tahun 2020	Kebijakan dan Prosedur Pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani resiko yang teridentifikasi	Melakukan Bimtek terkait Pengelolaan Keuangan	Walikota Bima	Triwulan IV Tahun 2024
4	Laporan yang di sajikan tidak sesuai dengan SAP	RSP.23.28.09.26.04	Melakukan Rekonsiliasi dengan Lingkup Pemerintah kota Bima dan juga Rekonsiliasi dengan Provinsi serta Kemenkeu	Kebijakan dan Prosedur Pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani resiko yang teridentifikasi	Melakukan Study banding di suatu daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangann	Walikota Bima	Triwulan IV Tahun 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Laporan yang di sajikan tidak sesuai dengan SAP	RSP.23.28.09.26.05	Selalu Mengupdate data terkait aturan yang baru dikeluarkan oleh Mendagri	Kebijakan dan Prosedur Pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani resiko yang teridentifikasi	Melakukan Study banding di suatu daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangann	Walikota Bima	Triwulan IV Tahun 2024
6	pengelolaan PAD yang belum optimal	RSP.23.28.09.26.06	Melakukan ETPD (Elektonifikasi Transaksi Pemerintah Daerah)	Kebijakan dan Prosedur Pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani resiko yang teridentifikasi	Melakukan sosialisasi sistem pembayaran Non Tunai	Walikota Bima	Triwulan IV Tahun 2024
7	pengelolaan PAD yang belum optimal	RSP.23.28.09.26.07	Melakukan ETPD (Elektonifikasi Transaksi Pemerintah Daerah)	Kebijakan dan Prosedur Pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani resiko yang teridentifikasi	Melakukan sosialisasi sistem pembayaran Non Tunai	Walikota Bima	Triwulan IV Tahun 2024
8	pengelolaan PAD yang belum optimal	RSP.23.28.09.26.08	Melakukan ETPD (Elektonifikasi Transaksi Pemerintah Daerah)	Kebijakan dan Prosedur Pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani resiko yang teridentifikasi	Melakukan sosialisasi sistem pembayaran Non Tunai	Walikota Bima	Triwulan IV Tahun 2024
9	Penatausahaan perbendaharaan yang belum optimal	RSP.23.28.09.26.09	Sosialisasi kepada setiap PPKeu dan Bendahara OPD	Kebijakan dan Prosedur Pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani resiko yang teridentifikasi	Rekrutmen pegawai yang memahami sistem	Walikota Bima	Triwulan IV Tahun 2024
10	Penatausahaan perbendaharaan yang belum optimal	RSP.23.28.09.26.10	Sosialisasi kepada setiap PPKeu dan Bendahara OPD	Kebijakan dan Prosedur Pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani resiko yang teridentifikasi	Rekrutmen pegawai yang memahami sistem	Walikota Bima	Triwulan IV Tahun 2024
11	Pengelolaan aset yang belum optimal	RSP.23.28.09.26.11	Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bima	Terdapat perubahan pada Peraturan yang lebih tingg	Konsultasi dengan Kemendagri	Walikota Bima	Januari-Desember Tahun 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
			SOP-SOP Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bima	SOP-SOP belum disosialisasikan	dianggarkan Kegiatan Sosialisasi SOP	Walikota Bima	Januari-Desember Tahun 2024
12	Pengelolaan aset yang belum optimal	RSP.23.28.09.26.12	Peraturan-Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bima	Peraturan-peraturan belum disosialisasikan	dianggarkan Kegiatan Sosialisasi SOP	Walikota Bima	Januari-Desember Tahun 2024
13	terjadinya kesalahan penginputan pada sistem penganggaran	RSP.23.28.09.26.13	Sosialisasi Juknis Penginputan Penggunaan Aplikasi	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Evaluasi atas penggunaan dan penginputan di aplikasi	Walikota Bima	Triwulan I dan III Tahun 2024
14	terjadinya kesalahan penginputan pada sistem penganggaran	RSP.23.28.09.26.14	Koordinasi yang intensif dengan OPD	Kesalahan pemahanan	Peningkatan koordinasi dan komunikasi	Walikota Bima	Januari-Desember Tahun 2024
					Pelaksanaan pendampingan	Walikota Bima	Triwulan I dan III Tahun 2024
15	penyelesaian tindak lanjut yang masih belum optimal	RSP.23.28.09.26.15	Koordinasi yang intensif dengan OPD	Kesalahan pemahanan	Penjadwalan penginputan	Walikota Bima	Januari-Desember Tahun 2024
<b>II SEKRETARIAT DAERAH</b>							
<b>A BAGIAN OPA</b>							
1	Pelaporan kinerja yang belum maksimal	RSP.23.33.09.01.01	Memfasilitasi kegiatan konsultasi dengan batas waktu	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Koordinasi dan konsultasi secara berkala untuk memberikan pemahaman yang lebih memadai bagi perangkat daerah	Bagian Organisasi	3 Bulan
2	Pelaporan kinerja yang belum maksimal	RSP.23.33.09.01.02	Konsultasi dan koordinasi secara berkala untuk mendapatkan data yang valid	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Konsultasi dan koordinasi secara berkala untuk mendapatkan data yang valid	Bagian Organisasi	3 Bulan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Pelaporan kinerja yang belum maksimal	RSP.23.33.09.01.03	Memberikan batas waktu pengumpulan berkas dengan mengeluarkan surat resmi	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Memberikan batas waktu pengumpulan berkas dengan mengeluarkan surat resmi	Bagian Organisasi	2 Bulan
4	Pelaporan kinerja yang belum maksimal	RSP.23.33.09.01.04	Evaluasi berkala dengan himbauan untuk meningkatkan value program pada masing-masing bidang yang dinilai	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Penetapan target yang lebih realistis bagi organisasi perangkat daerah	Bagian Organisasi	2 Bulan
5	Pelaporan kinerja yang belum maksimal	RSP.23.33.09.01.05	Evaluasi dan penilaian secara berkala untuk penetapan target yang lebih realistis	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Evaluasi dan penilaian secara berkala untuk penetapan target yang lebih realistis	Bagian Organisasi	6 Bulan
6	Komitmen Perangkat daerah yang masih kurang	RSP.23.33.09.01.06	Konsultasi dan koordinasi secara berkala untuk memberikan pemahaman yang baik dan memadai bagi organisasi perangkat daerah	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Konsultasi dan koordinasi secara berkala untuk memberikan pemahaman yang baik dan memadai bagi organisasi perangkat daerah	Bagian Organisasi	2 Bulan
<b>III DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>							
1	Kebijakan Internal SPBE belum memadai	RSP.23.14.09.18.01	telah dilakukan identifikasi kebutuhan penyusunan arsitektur SPBE	data dukung arsitektur SPBE masih kurang	monev data dukung arsitektur SPBE	Kepala Dinas Kominfotik	Jan-24
2	Kebijakan Internal SPBE belum memadai	RSP.23.14.09.18.02	telah dilakukan identifikasi kebutuhan peta rencana SPBE daerah	data dukung peta rencana SPBE masih kurang	monev data dukung peta rencana SPBE	Kepala Dinas Kominfotik	Jan-24
3	Tata Kelola SPBE belum maksimal	RSP.23.14.09.18.03	telah disusun draft peraturan walikota tentang pedoman teknis pengelolaan aplikasi	masih kurangnya pemahaman tentang proses bisnis pengembangan aplikasi	meningkatkan kapasitas SDM terkait proses bisnis pengembangan aplikasi	Kepala Dinas Kominfotik	Mar-24



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Tata Kelola SPBE belum maksimal	RSP.23.14.09.18.04	telah dilakukan identifikasi topologi jaringan intranet	Topografi wilayah Kota Bima yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pembangunan infrastruktur jaringan intranet terintegrasi antar Perangkat Daerah	Melakukan kerjasama dalam bentuk MoU sewa jaringan internet dengan provider lokal	Kepala Dinas Kominfotik	Jan-24
5	Tata Kelola SPBE belum maksimal	RSP.23.14.09.18.05	telah dilakukan identifikasi aplikasi khusus pemerintah daerah dan aplikasi umum pemerintah pusat yang dapat diintegrasikan	terbatasnya akses yang diberikan oleh aplikasi umum pemerintah pusat	melakukan kerjasama sharing data antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat	Kepala Dinas Kominfotik	Mar-24
6	Tata Kelola SPBE belum maksimal	RSP.23.14.09.18.06	Pembentukan tim komite SPBE	Tim SPBE belum bekerja maksimal	Rapat koordinasi tim komite secara berkala untuk mereviu capaian indikator SPBE	Kepala Dinas Kominfotik	per triwulan tahun 2024
7	Manajemen SPBE belum berjalan sebagaimana mestinya	RSP.23.14.09.18.07			Menyusun manajemen risiko SPBE	Kepala Dinas Kominfotik	May-24
8	Manajemen SPBE belum berjalan sebagaimana mestinya	RSP.23.14.09.18.08			Menyusun Manual SMKI, pedoman manajemen aset TIK, pedoman manajemen layanan TIK dan pedoman manajemen SDM	Kepala Dinas Kominfotik	May-24
9	Manajemen SPBE belum berjalan sebagaimana mestinya	RSP.23.14.09.18.09			Akan dilaksanakan audit TIK	Kepala Dinas Kominfotik	Apr-24
10	Layanan SPBE belum maksimal	RSP.23.14.09.18.10	telah dilakukan identifikasi aplikasi khusus pemerintah daerah yang dapat diintegrasikan	Pengembangan aplikasi masih bersifat parsial	Pengelompokkan dan pengintegrasian aplikasi serupa	Kepala Dinas Kominfotik	Feb-24
11	Layanan SPBE belum maksimal	RSP.23.14.09.18.11	Telah tersedianya media penyampaian informasi publik	Peran aktif Perangkat Daerah dalam menyediakan informasi publik	Melakukan pelatihan bagi admin Perangkat Daerah	Kepala Dinas Kominfotik	Mar-24

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Layanan SPBE belum maksimal	RSP.23.14.09.18.12	Menyediakan platform publikasi yang memadai	keterbatasan fitur publiksi yang tersedia dalam platform publikasi yang tersedia	Meningkatkan kapasitas platform media publikasi	Kepala Dinas Kominfotik	Apr-24
13	Layanan SPBE belum maksimal	RSP.23.14.09.18.13	Perekrutan SDM	SDM yang tersedia belum sesuai kompetensi yang dibutuhkan	Pelatihan dan bimbingan teknis	Kepala Dinas Kominfotik	Jul-24
14	Layanan SPBE belum maksimal	RSP.23.14.09.18.14	Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia	Sarana dan prasarana yang tersedia belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan	Pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan	Kepala Dinas Kominfotik	Mar-24
<b>III BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>							
1	Capaian Sasaran RPD tidak sesuai target	RSP.23.28.09.25.01	Melakukan evaluasi awal dengan mempertimbangan semua sumber daya yang ada dalam penentuan target	Pada saat penentuan target tidak mempertimbangkan faktor eksternal yg mgkn bisa mempengaruhi kinerja	Melakukan evaluasi secara cermat dg mempertimbangkan faktor internal dan eksternal dlm penentuan target	Kepala Bappeda	Triwulan I Tahun 2024
					Identifikasi potensi resiko yang bisa menghambat pencapaian target dan mempersiapkan cara mengatasinya	Kepala Bappeda	Triwulan I Tahun 2024
					Melakukan monitoring dan evaluasi bekal agar dapat diambil langkah-langkah korektif	Kepala Bappeda	Triwulan IV Tahun 2024
2	Capaian Sasaran RPD tidak sesuai target	RSP.23.28.09.25.02	Melakukan evaluasi secara berkala	Kurangnya Kompetensi SDM perencana untuk melakukan analisis terhadap data dalam proses evaluasi	Meningkatkan kompetensi SDM	Kepala Bappeda	Triwulan I Tahun 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
				Belum dilakukan monitoring berkala terhadap kemajuan pelaksanaan program dan mengidentifikasi masalah yang muncul	Meningkatkan kompetensi SDM	Kepala Bappeda	Triwulan Tahun 2024
3	Capaian Sasaran RPD tidak sesuai target	RSP.23.28.09.25.03	Membuat laporan kinerja sesuai dengan kemajuan capaian program	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi, dilaksanakan,	Perencanaan alokasi anggaran secara rinci dengan memastikan setiap item anggaran memiliki hubungan dengan pencapaian sasaran	Kepala Bappeda	Triwulan Tahun 2024
				Kebijakan alokasi anggaran yang tidak didukung dengan analisis dan alasan yang kuat		Kepala Bappeda	Triwulan Tahun 2024
4	Monitoring dan Evaluasi secara berkala belum terlaksana secara optimal	RSP.23.28.09.25.04	Monitoring dan evaluasi berkala terhadap kemajuan pelaksanaan program	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi, dilaksanakan,	Membuat jadwal monitoring yang lengkap meliputi jadwal pemantauan, metode pengumpulan data dan laporan monev yang sesuai dengan kondisi aktual	Kepala Bappeda	Triwulan Tahun 2024
				Tidak adanya jadwal monitoring yang lengkap meliputi jadwal pemantauan, metode pengumpulan data dan laporan monev yang sesuai dengan kondisi aktual	Melakukan monitoring berkala terhadap kemajuan pelaksanaan program dan mengidentifikasi masalah yang muncul	Kepala Bappeda	Triwulan IV Tahun 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
				Belum ada upaya Peningkatan kapasitas SDM dan melakukan verifikasi terhadap data yang diperoleh	Melakukan koordinasi yang baik dg stakeholder	Kepala Bappeda	Triwulan I Tahun 2024
<b>IV</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>						
1	Layanan yang terhambat	RSP.23.11.09.16.01	SOP Prosedur pelayanan	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alur pelayanan dan syarat-syarat pengajuan permohonan pelayanan	Sosialisasi, edukasi, dan diskusi dengan pihak-pihak pemangku kepentingan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan	Kepala Dinas	TW II Tahun 2024
2	Layanan yang terhambat	RSP.23.11.09.16.02	Sarana dan Prasarana telah tersedia	Spesifikasi alat kerja pelayanan tidak support terhadap sistem informasi administrasi kependudukan yang selalu terupdate	Melaksanakan pengadaan sarana prasarana	Kepala Dinas	TW II Tahun 2024
3	Layanan yang terhambat	RSP.23.11.09.16.03	SOP Prosedur pelayanan	SDM pelayanan belum memenuhi syarat pada SOP	Pelatihan tentang tata cara pelayanan yang baik	Kepala Dinas	TW III Tahun 2024
4	Layanan yang terhambat	RSP.23.11.09.16.04	SOP Prosedur pelayanan	Tata letak ruang-ruang pelayanan yang tidak satu atap	Pembuatan tanda lokasi pelayanan	Kepala Dinas	TW I Tahun 2024
5	Penyelesaian pelayanan yang	RSP.23.11.09.16.05	eksternal	eksternal	eksternal	eksternal	eksternal
6	Penyelesaian pelayanan yang tidak tepat waktu	RSP.23.11.09.16.06	Belum dilakukan pengendalian		Melaksanakan pengadaan genset	Kepala Dinas	TW II Tahun 2024
7	Terjadi pungutan liar	RSP.23.11.09.16.07	SPK, SK Pembagian tugas	Pengawasan terhadap hasil pembagian tugas belum maksimal	Evaluasi secara berkala terkait beban kerja dan pelimpahan tugas	Kepala Dinas	TW I Tahun 2024
8	Terjadi pungutan liar	RSP.23.11.09.16.08	Maklumat Pelayanan, SOP Pelayanan	Masyarakat belum mengetahui dan memahami tentang maklumat pelayanan	Sosialisasi tatap muka dan melalui media sosial	Kepala Dinas	TW I Tahun 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>V DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP</b>							
1	Pelayanan yang tidak optimal	RSP.23.16.09.20.01	Mengoptimalkan pada aspek penilaian IKM	8 Terdapat aspek yang tidak mudah ditingkatkan guna memaksimalkan peningkatan kepuasan masyarakat	Mengidentifikasi aspek yang nilainya rendah dan mendiskusikan cara penanganannya dengan optimal	Kepala Dinas	Triwulan IV
2	Pelayanan yang tidak optimal	RSP.23.16.09.20.02	Mengoptimalkan pada aspek penilaian IKM	8 Terdapat aspek yang tidak mudah ditingkatkan guna memaksimalkan peningkatan kepuasan masyarakat	Melakukan diklat untuk peningkatan kompetensi SDM	Kepala Dinas	Triwulan IV
3	Pelayanan yang tidak optimal	RSP.23.16.09.20.03	Mengoptimalkan pada aspek penilaian IKM	8 Terdapat aspek yang tidak mudah ditingkatkan guna memaksimalkan peningkatan kepuasan masyarakat	Penganggaran untuk sarana dan prasarana	Kepala Dinas	Triwulan IV
4	WBS belum berjalan secara optimal	RSP.23.16.09.20.04	Pelaksanaan SKP(Survey Kepuasan Masyarakat) dilakukan secara online kepada Quisioner atas pelayanan pendampingan pembuatan izin di DPMPSTSP Kota Bima.	Masih ada Quisioner yang belum smart dengan mengisi angket survey berbasis online sehingga perlu di tuntun dari smartphone atau alat komunikasi lainnya.	Meningkatkan metode scan dengan menggunakan barcode yang dipajang dikantor yang harus dilakukan oleh penerima pelayanan pendamping pembuatan izin usaha.	Kepala Dinas	Triwulan IV
5	WBS belum berjalan secara optimal	RSP.23.16.09.20.05	Pelaksanaan SKP(Survey Kepuasan Masyarakat) dilakukan secara online kepada Quisioner atas pelayanan pendampingan pembuatan izin di DPMPSTSP Kota Bima.	Masih ada Quisioner yang belum smart dengan mengisi angket survey berbasis online sehingga perlu di tuntun dari smartphone atau alat komunikasi lainnya.	Meningkatkan metode scan dengan menggunakan barcode yang dipajang dikantor yang harus dilakukan oleh penerima pelayanan pendamping pembuatan izin usaha.	Kepala Dinas	Triwulan IV

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Pungutan liar	RSP.23.16.09.20.06	Memasang banner himbauan untuk tidak memberikan tips dan sejenisnya kepada petugas pelayanan pendampingan perizinan berusaha.	masih terdapat penerima layanan pembuatan izin berusaha menganggap tips sebagai bentuk balas jasa.	Meningkatkan penghasilan kepada petugas Loker (Front Office) dan menghimbau kepada Bidang PTSP untuk selalu mengawasi kegiatan di ruang pelayanan pendampingan pelayanan perizinan berusaha.	Kepala Dinas	Triwulan IV
7	Masyarakat belum menerima Informasi pelayanan publik secara optimal	RSP.23.16.09.20.07	Memasang informasi dan keterangan serta standar pelayanan di ruang pendampingan pelayanan perizinan seperti banner dan lain-lain.	Masyarakat sering tidak punya waktu untuk membaca keliling informasi yang dipasang dan juga ruangan pelayanan menjadi tidak rapi akibat banyaknya peraga informasi.	Memasang informasi melalui alat peraga elektronik yang smart dan menarik di ruang pelayanan perizinan dan juga informasi melalui website dinas yang komunikatif, mudah serta animatif	Kepala Dinas	Triwulan II
<b>VI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM</b>							
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai belum sesuai anjab dan ABK	RSP.23.31.09.27.01	Evaluasi Pengadaan ASN dan pengadaan ASN	Masih ada usulan formasi yang belum terakomodir	Menyusun Rencana Kebutuhan, jenis dan Jumlah jabatan ASN	Walikota Bima	TW II 2024
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai belum sesuai anjab dan ABK	RSP.23.31.09.27.02	Evaluasi Pemberhentian ASN	Masih ada Data ASN yang akan purna tugas yang belum terupdate	Penyampaian pemberitahuan tertulis Masa Purna Tugas ASN Lebih awal	Walikota Bima	TW II 2024
			Pengadaan aplikasi SIMASN kota Bima	Data pegawai belum terupdate oleh Admin	Updating Data Pegawai	Walikota Bima	TW II 2024
3	Formasi CPNS Belum sesuai perencanaan kebutuhan	RSP.23.31.09.27.03	Evaluasi Pengadaan ASN dan pengadaan ASN	Masih ada usulan formasi yang belum terakomodir	Menyusun Rencana Kebutuhan, jenis dan Jumlah jabatan ASN	Walikota Bima	TW I Tahun 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
			Evaluasi Pemberhentian ASN	Masih ada Data ASN yang akan purna tugas yang belum terupdate	melakukan Koordinasi dan Fasilitasi pengadaan ASN	Walikota Bima	TW I Tahun 2024
4	Formasi CPNS Belum sesuai perencanaan kebutuhan	RSP.23.31.09.27.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan pengadaan ASN	Masih ada usulan formasi yang belum terakomodir	Menyusun Rencana Kebutuhan, jenis dan Jumlah jabatan ASN	Walikota Bima	TW I Tahun 2024
5	Promosi Jabatan belum sesuai kompetensi	RSP.23.31.09.27.05	Pengelolaan Promosi ASN	masih ada mutasi dan promosi diluar ketentuan	Pelaksanaan evaluasi Data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	Walikota Bima	TW I 2024
			Pelaksanaan assesment terhadap calon Pejabat	Masih ada pejabat yang tidak berkompeten	Pengembangan Kompetensi teknis ASN	Walikota Bima	TW I 2024
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	Masih ada ASN yang belum melaksanakan diklat kompetensi	Melakukan Pemetaan kebutuhan diklat	Walikota Bima	TW III 2024
<b>VII KECAMATAN</b>							
1	Pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran	RSP.23.32.09.31.01	dokumen petunjuk sebagai acuan	belum memiliki data yang akurat	Bimtek pembekalan dan pembinaan petugas data	camat	Maret - April 2024
2	Pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran	RSP.23.32.09.31.02	Sosialisasi program bantuan pemerintah	Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang bantuan pemerintah	Sosialisasi ke Masyarakat Kecamatan RasanaE Timur	camat	Nopember 2023
3	Pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran	RSP.23.32.09.31.03	Sosialisasi program bantuan pemerintah	Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang bantuan pemerintah	Sosialisasi ke Masyarakat Kecamatan RasanaE Timur	camat	Nopember 2023
4	PMKS di Kec. Rasanae Timur yang belum tertangani secara maksimal	RSP.23.32.09.31.04	Pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dan Posyandu	Kurang Optimalnya pelayanan PMKS	Monev Kegiatan Posyandu dan Puskesmas	camat	Per Triwulan
5	PMKS di Kec. Rasanae Timur yang belum tertangani secara maksimal	RSP.23.32.09.31.05	Pemberian bantuan sosial	Kurangnya pemahaman pelaksana kegiatan pelayanan PMKS	Sosialisasi Tentang PMKS	camat	Desember 2023-April 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
6	PMKS di Kec. Rasanae Timur yang belum tertangani secara maksimal	RSP.23.32.09.31.06	Pemberian bantuan sosial	Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan	Rakor Terpadu lintas Sektor	camat	Desember 2023- Maret 2024
7	Peningkatan kapasitas usaha masyarakat yang belum optimal	RSP.23.32.09.31.07	Pembinaan dan Pelatihan pelaku usaha Mikro	Kurangnya peluang pasar usaha Masyarakat	Pelatihan UMKM Melalui Dankel	camat	Maret-Juli 2024
8	Peningkatan kapasitas usaha masyarakat yang belum optimal	RSP.23.32.09.31.08	Pemberian bantuan bahan baku dasar/Peralatan	Kurangnya bahan baku dan peralatan usaha	Pemberian bantuan bahan baku dasar/Peralatan	camat	Maret-Juli 2024
9	Masyarakat belum mendapatkan akses air bersih yang memadai	RSP.23.32.09.31.09	sosialisai dan Penghijauan sumber Mata Air dan sekitarnya	berkurangnya akses air bersih	Sosialisasi Lingkungan Lestari	camat	Triwulan II dan Triwulan III 2024
10	Masyarakat belum mendapatkan akses air bersih yang memadai	RSP.23.32.09.31.10	Lomba perlindungan mata air (PERMATA)	berkurangnya akses air bersih	Sosialisasi tentang perlindungan sumber air	camat	Oktober 2023-September 2024
11	Peningkatan luasan kawasan kumuh di kec. rasanae timur	RSP.23.32.09.31.11	Pembangunan drainase pada titik vital	Masih terdapatnya kawasan kumuh di kecamatan rasanae timur	Optimalisasi Saluran Drainase di Wilayah Kecamatan RasanaE Timur	camat	Oktober 2023-September 2024
12	Peningkatan luasan kawasan kumuh di kec. rasanae timur	RSP.23.32.09.31.12	Pemberian Bantuan MCK Dan Sejenisnya, sosialisasi PHBS	Kurangnya kesadaran masyarakat	Sosialisasi PHBS	camat	Nopember 2023-September 2024
13	Peningkatan luasan kawasan kumuh di kec. rasanae timur	RSP.23.32.09.31.13	Pemberian bantuan motor sampah dan bak sampah	Tidak adanya/Jauhnya TPA	Pengadaan Tempat sampah sementara (TPS) melalui Dankel	camat	Oktober 2023-September 2024
14	Peningkatan luasan kawasan kumuh di kec. rasanae timur	RSP.23.32.09.31.14	Monitoring Wilayah Kelurahan	Kurangnya kesadaran masyarakat	Penegakkan perda dan koordinasi Lintas sektor	camat	Oktober 2023-September 2024
<b>VIII INSPEKTORAT</b>							
1	Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia yang	RSP.23.29.09.03.01	Formulir Anjab dan ABK telah disusun	Penyusunan Anjab dan ABK belum dilakukan penyesuaian	Mengisi formulir Anjab dan ABK sesuai kondisi	Inspektur	Minggu Ke I s/d Minggu ke IV



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
	belum memadai dibandingkan dengan beban kerja		Permenpan RB No. 1 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Surat Ka.BPKP Nomor S711/K/JF/2019 tanggal 8 Agustus 2019 hal Evaluasi dan Validasi Usulan <u>Kebutuhan JFA</u> Perka BPKP tentang perhitungan JF Auditor SE mendagri JF PPUPD	sesuai ketentuan	dan peraturan yang berlaku		Septemeber 2023
2	Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia yang belum memadai dibandingkan dengan beban kerja	RSP.23.29.09.03.02	Anjab dan ABK Inspektorat	Belum adanya sosialisasi terhadap daftar kebutuhan jenjang jabatan tertentu yang masih tersedia, Recruitment ASN belum berdasarkan Anjab	Sosialisasi terhadap daftar kebutuhan jenjang jabatan yang masih tersedia Koordinasi dan pengusulan kebutuhan ASN berdasarkan Anjab ke PPK	Inspektur Inspektur	Minggu Ke I s/d Minggu ke IV November 2023
3	Kompetensi SDM pengawasan yang belum memadai	RSP.23.29.09.03.03	Telah disusun peta kompetensi Dokumen rencana pengembangan kompetensi telah tersusun	Pelaksanaan belum direalisasikan sepenuhnya Persentase realisasi pengembangan kompetensi masih rendah	Penyusunan rencana pengembangan kompetensi berdasarkan Penyusunan rencana pengembangan kompetensi berdasarkan	Inspektur Inspektur	Minggu Ke I s/d Minggu ke IV Septemeber 2023
4	Kompetensi SDM pengawasan yang belum memadai	RSP.23.29.09.03.04	Pelatihan di Kantor Sendiri	Tidak dijadwalkan secara rutin	Pertemuan/Diskusi rutin setiap 2 minggu sekali	Inspektur	Minggu Ke II dan Minggu ke IV Setiap Bulan di Tahun 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Kompetensi SDM pengawasan yang belum memadai	RSP.23.29.09.03.05	Perwali No. 20 Tahun 2021 Tentang TPP Permenpan RB No. 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN PP No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS Perwali No. 26 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima	Belum terdapat pedoman penghargaan yang diatur	Penetapan pedoman pemberian penghargaan kepada ASN/Tim yang berprestasi	Inspektur	Minggu I s/d Minggu ke IV Januari 2024
6	Pengawasan belum sepenuhnya berbasis risiko	RSP.23.29.09.03.06	PP No. 60 Tahun 2008 Tentang SPIP	Perangkat daerah belum memahami prosedur manajemen risiko	Menginisiasi dan memberikan bimbingan teknis penyusunan risk register untuk risiko strategis pemerintah daerah, risiko strategis OPD, dan risiko operasional OPD	Inspektur	Minggu I s/d Minggu ke IV Januari 2024
7	Pengawasan belum sepenuhnya berbasis risiko	RSP.23.29.09.03.07	Permendagri No. 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 Perwali tentang pedoman penyusunan PKPT	Perangkat daerah belum sepenuhnya melakukan penilaian risiko	Merencanakan dalam PKPT kegiatan konsultasi dalam porsi yang lebih banyak untuk perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian pada program strategis yang dilaksanakan pemerintah daerah	Inspektur	Bulan Januari s/d Maret 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Manajemen kepegawaian yang belum baik	RSP.23.29.09.03.08	Perwali No. 3 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat	Masih terdapat kegiatan pengawasan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tugas dan wewenangnya	Penyusunan MPPH	Inspektur	Minggu I s/d Minggu ke IV Januari 2024
9	Kinerja pemerintah daerah belum sepenuhnya diukur dengan ekonomis, efektivitas, dan efisiensi	RSP.23.29.09.03.09	SK Inspektur tentang Pedoman pelaksanaan audit kinerja	Belum pernah melakukan audit kinerja tematik	Melakukan audit kinerja secara lintas sektoral terhadap program strategis pemerintah daerah yang memiliki risiko tinggi serta Memberikan rekoendasi audit kinerja yang mengarah kepada keberhasilan tujuan program secara efektif, efisien, dan ekonomis	Inspektur	Bulan Januari s/d Maret 2024
			Pedoman pelaksanaan audit kinerja lintas sektoral (BPKP)				Bulan Januari s/d Maret 2024
10	Sinergitas pengawasan dengan pihak lain belum maksimal	RSP.23.29.09.03.10	PKS APIP dan APH	Pihak eksternal belum memahami pedoman pertukaran informasi	Sosialisasi pedoman	Inspektur	Bulan Juli dan Bulan Desember 2024
			Pakta integritas tentang pemantauan TL pengawasan	Rendahnya persentase tindak lanjut hasil pengawasan	Gelar pengawasan per semester		
11	Akses informasi untuk kebutuhan pengawasan masih terbatas	RSP.23.29.09.03.11	SK inspektur tentang pedoman pembatasan akses		Sosialisasi pedoman pembatasan akses informasi	Inspektur	Bulan Januari s/d Maret 2024
<b>IX BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH</b>							
1	Perangkat Daerah tidak merespon hasil riset	RSP.23.35.09.29.01	Sosialisasi dan Pendampingan terhadap Perangkat Daerah	Advokasi terhadap Pimpinan PD	Tingkatkan Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan	Kepala Badan	Triwulan II

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Rekomendasi hasil Riset tidak dimanfaatkan Perangkat Daerah dan Masyarakat	RSP.23.35.09.29.02	Sosialisasi dan Pendampingan terhadap Perangkat Daerah	Penekanan dengan membuat Regulasi	Tingkatkan Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan	Kepala Badan	Triwulan II
3	Pemahaman terkait Riset terbatas hanya pada Pemenuhan Penelitian	RSP.23.35.09.29.03	Dilakukan analisa kebutuhan jabatan sesuai kebutuhan PD	Koordinasi dengan PD terkait (BKPSDM)	Mengajukan formasi CPNS/PPPK	Kepala Badan	Triwulan II
4	Pengimplementasian inovasi tidak dimanfaatkan Perangkat Daerah atau Masyarakat	RSP.23.35.09.29.04	Belum ada	Kerjasama dengan pihak ketiga	Buat MoU	Kepala Badan	Triwulan III
		RSP.23.35.09.29.05	Sosialisasi dan Pendampingan terhadap Perangkat Daerah	Kerjasama dengan PD sasaran	Tingkatkan Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan	Kepala Badan	Triwulan II
5	Peluang implentasi inovasi yang telah dibuat oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat tidak dilaksanakan	RSP.23.35.09.29.06	Belum ada	Sosialisasi dan Pendampingan terhadap PD	Membuat Regulasi	Kepala Badan	Triwulan III
6	Peluang implentasi inovasi yang telah dibuat oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat tidak dilaksanakan	RSP.23.35.09.29.07	Belum ada	Sosialisasi dan Pendampingan terhadap PD	Membuat Regulasi	Kepala Badan	Triwulan III

## Daftar Rencana Tindak Pengendalian

<b>Nama Pemda : Kota Bima</b> <b>Tahun Penilaian : 2023</b> <b>Tujuan Strategis IV : Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman</b> <b>Sasaran Strategis X : Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman</b> <b>Urusan Pemerintah :</b>							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>							
1	Kebijakan Peruntukan lahan yang belum berpihak pada meningkatnya kualitas	RSP.23.10.10.15.01	Regulasi terkait KLHS RDTR wilayah di 4 Kecamatan	Belum adanya regulasi di wilayah Kec. Ras. Nae Timur	Regulasi terkait KLHS RDTR untuk wilayah Rasanae Timur	Kepala Dinas	Jan-24
2	Kebijakan Peruntukan lahan yang belum berpihak pada meningkatnya kualitas	RSP.23.10.10.15.02	Belum terdapat pengendalian	Belum adanya Regulasi terkait TAta guna Lahan	Regulasi Terkait TAta Guna LAhan, RTRW dan RPD	Kepala Dinas	Dec-24
3	Kebijakan Peruntukan lahan yang belum berpihak pada	RSP.23.10.10.15.03	Koordinasi dengan OPD terkait	Masih adanya ego sektoral	Membuat TIM terpadu	Kepala Dinas	Jan-24
4	Kualitas air dikota bima yang semakin menurun	RSP.23.10.10.15.04	Sosialisasi tentang kualitas air yang sehat	Masih kurang maksimalnya sosialisasi tentang air yang sehat	Sosialisasi kepada masyarakat terkait tentang air yang sehat	Kepala Dinas	Triwulan I 2024
			Memperkuat pengawasan terhadap perilaku hidup masyarakat dan pelaku usaha	Kurang adanya dukungan dari kelurahan terkait	Membentuk TIM terpadu	Kepala Dinas	Triwulan II 2024
5	Kualitas air dikota bima yang semakin menurun	RSP.23.10.10.15.05	Telah adanya pengawasan setiap triwulan terhadap pelaku usaha	Proses penindakan/pemberian sanksi yang panjang	Membuat Perwali tentang pelimpahan wewenang terkait pemberian sanksi kepada pelaku usaha	Kepala Dinas	Jan-24
			Telah dilakukannya teguran kepada pelaku usaha terkait	Tidak dipatuhi oleh pelaku usaha	Memberikan Sanksi dalam katagori berat seperti pencabutan izin dan lain sebagainya	Kepala Dinas	Triwulan I 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Kualitas air dikota bima yang semakin menurun	RSP.23.10.10.15.06	Telah dilakukannya koordinasi dengan dinas terkait	Minimnya koordinasi dengan dinas terkait	Melakukan koordinasi secara intensif dengan dinas terkait	Kepala Dinas	Mar-24
7	Kualitas air dikota bima yang semakin menurun	RSP.23.10.10.15.07	Melaksanakan Program Kampung Iklim	Hanya Terdapat 2 kelurahan yang melaksanakan program kampung iklim	Menambah jumlah kelurahan yang melaksanakan program kampung iklim	Kepala Dinas	Triwulan II 2024
8	Kualitas air dikota bima yang semakin menurun	RSP.23.10.10.15.08	Penanaman pohon pada lahan masyarakat dan lahan kosong	Kurang adanya pengawasan terhadap penanaman pohon	Melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang menanam pohon	Kepala Dinas	Mar-24
<b>II DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>							
1	Data Pemanfaatan Ruang tidak optimal	RSP.23.03.10.06.01	Melakukan Survey lapangan untuk melihat gambaran <u>Sebenarnya</u>	Mebutuhkan waktu yang lama dan SDM yang banyak	Pembelian/Pemutakhiran citra satelit oleh Pemerintah Kota	Walikota Bima	Tw 3 Tahun 2024
2	Data Pemanfaatan Ruang tidak optimal	RSP.23.03.10.06.02	Penyusunan Sistem dan Informasi Penataan Ruang	Mebutuhkan waktu yang lama dan SDM yang banyak untuk membangun Sistem dan Informasi yang menyeluruh	Pembelian/Pemutakhiran citra satelit oleh Pemerintah Kota	Walikota Bima	Tw 3 Tahun 2024
3	Izin Mendirikan Bangunan tidak sesuai dengan pemanfaatan Ruang	RSP.23.03.10.06.03	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang kepada Perangkat Kelurahan	Sosialisasi belum menyentuh langsung ke Masyarakat	Melaksanakan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat melalui pemberian sanksi tertulis, dan pengadaan Pamflet untuk sosialisasi aturan	Kapala Dinas	Tw 3 Tahun 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Pelaporan kinerja yang belum maksimal	RSP.23.03.10.06.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang kepada Perangkat Kelurahan	Sosialisasi belum menyentuh langsung ke Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang yaitu melakukan penegakkan sanksi dengan melibatkan personil POLPP	Kapala Dinas	Tw 3 Tahun 2024
5	Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan peruntukkan	RSP.23.03.10.06.05	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang kepada Perangkat Kelurahan	Sosialisasi belum menyentuh langsung ke Masyarakat	Melaksanakan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat pemilik lahan'	Kapala Dinas	Tw 3 Tahun 2024
<b>III KECAMATAN</b>							
1	Masyarakat belum mendapatkan akses air bersih yang memadai	RSP.23.32.10.31.01	sosialisai dan Penghijauan sumber Mata Air dan sekitarnya	berkurangnya akses air bersih	Sosialisasi Lingkungan Lestari	camat	Triwulan II dan Triwulan III 2024
2	Masyarakat belum mendapatkan akses air bersih yang memadai	RSP.23.32.10.31.02	Lomba perlindungan mata air (PERMATA)	berkurangnya akses air bersih	Sosialisasi tentang perlindungan sumber air	camat	Oktober 2023-September 2024
3	Peningkatan luasan kawasan kumuh di kec. rasanae timur	RSP.23.32.10.31.03	Pembangunan drainase pada titik vital	Masih terdapatnya kawasan kumuh di kecamatan rasanae timur	Optimalisasi Saluran Drainase di Wilayah Kecamatan RasanaE Timur	camat	Oktober 2023-September 2024
4	Peningkatan luasan kawasan kumuh di kec. rasanae timur	RSP.23.32.10.31.04	Pemberian Bantuan MCK Dan Sejenisnya, sosialisasi PHBS	Kurangnya kesadaran masyarakat	Sosialisasi PHBS	camat	Nopember 2023-September 2024
5	Peningkatan luasan kawasan kumuh di kec. rasanae timur	RSP.23.32.10.31.05	Pemberian bantuan motor sampah dan bak sampah	Tidak adanya/Jauhnya TPA	Pengadaan Tempat sampah sementara (TPS) melalui Dankel	camat	Oktober 2023-September 2024
6	Peningkatan luasan kawasan kumuh di kec. rasanae timur	RSP.23.32.10.31.06	Monitoring Wilayah Kelurahan	Kurangnya kesadaran masyarakat	Penegakkan perda dan koordinasi Lintas sektor	camat	Oktober 2023-September 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>IV DINAS KESEHATAN</b>							
1	Jumlah Kematian yang tinggi dibawah UHH yang ditetapkan	RSP.23.02.10.05.01	Adanya tim TGC di setiap PKM Adanya klaster kesehatan untuk kejadian bencana Adanya sistim deteksi cepat terhadap peningkatan kejadian penvakit Adanya laboratorium daerah yang dapat melakukan pemeriksaan terhadap spesimen KLB Tersedianya vaksin untuk beberapa penyakit terkait PD3I	Kompetensi petugas yang masih kurang Belum tersusunnya healt disaster plan lingkup Pemerintah Kota Bima Kesadaran masyarakat terkait vaksinasi masih kurang	Pelatihan HDP tingkat Kota Bima Menyusun dokumen HDP Simulasi HDP	Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas	Apr-24 Jun-24 Oct-24
2	Kondisi Lingkungan masyarakat buruk	RSP.23.02.10.05.02	Perwali tentang STBM Adanya pokja PKP tingkat kota Advokasi penguatan kapasitas kabupaten/Kota sehat Pengawasan kualitas media lingkungan Edukasi Lingkungan sehat di institusi pendidikan	Kurangnya kesadaran masyarakat Koordinasi lintas sektor yang masih kurang kurang tersedianya BMHP reagen sanitarian kit	Sosialisasi Sosialisasi dan advokasi Pengadaan reagen sanitarian kit	Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas	Apr-24 Mar-24 Januari sd desember 2024
<b>V DINASPERHUBUNGAN</b>							
1	Jalan yang tidak sesuai standar	RSP.23.13.10.17.01	Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait kepemilikan aset jalan yang ada	Kurangnya koordinasi terkait kepemilikan aset jalan yang ada	Melakukan koordinasi dengan pihak pusat dan provinsi secara intens	Kadis	Dec-25



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Area parkir yang tidak sesuai standar	RSP.23.13.10.17.02	Melakukan kontrak kerjasama dengan juru parkir	Adanya parkir liar dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait serta kurangnya fasilitas parkir yang tidak memenuhi standar	Sosialisasi secara berkala terhadap pengguna parkir, melakukan tindakan terhadap parkir liar, menyiapkan fasilitas ruang parkir sesuai standar, melengkapi sarana prasarana parkir	Kadis	Dec-24
			Menyiapkan fasilitas parkir yang sesuai standar	Tidak tersedianya ruang parkir yang sesuai standar	Melakukan sosialisasi Perda Parkir kepada pengguna dan juru parkir	Kadis	Dec-24

### Daftar Rencana Tindak Pengendalian

<b>Nama Pemda : Kota Bima</b> <b>Tahun Penilaian : 2023</b> <b>Tujuan Strategis IV : Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman</b> <b>Sasaran Strategis XI : Meningkatnya Kemantapan Infrastruktur</b> <b>Urusan Pemerintah :</b>							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I DINAS PERHUBUNGAN</b>							
1	Jalan yang tidak sesuai standar	RSP.23.13.11.17.01	Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait kepemilikan aset jalan yang ada	Kurangnya koordinasi terkait kepemilikan aset jalan yang ada	Melakukan koordinasi dengan pihak pusat dan provinsi secara intens	Kadis	Dec-25
2	Jalan yang tidak sesuai standar	RSP.23.13.11.17.02	Telah dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi	Tidak memiliki kewenangan untuk melakukan rehabilitasi	Melakukan koordinasi dengan pihak pusat dan provinsi	Kadis	Dec-25
3	Jalan yang tidak sesuai standar	RSP.23.13.11.17.03	Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana kelengkapan jalan	Kurangnya data sehingga tidak tersedianya anggaran	Menyiapkan data secara berkala terkait pengajuan anggaran kegiatan	Kadis	Dec-24
4	Peningkatan sarana infrastruktur jalan yang tidak tepat sasaran	RSP.23.13.11.17.04	Melakukan pengajuan terhadap perubahan anggaran ke Tim TAPD	Anggaran tidak tersedia	Mengajukan anggaran terkait penyusunan Dokumen Andalalin, Tatralok dan Mater Plan Transportasi	Kadis	Dec-24

5	Area parkir yang tidak sesuai standar	RSP.23.13.11.17.05	Melakukan kontrak kerjasama dengan juru parkir	Adanya parkir liar dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait serta kurangnya fasilitas parkir yang tidak memenuhi standar	Sosialisasi secara berkala terhadap pengguna parkir, melakukan tindakan terhadap parkir liar, menyiapkan fasilitas ruang parkir sesuai standar, melengkapi sarana prasarana parkir	Kadis	Dec-24
			Menyiapkan fasilitas parkir yang sesuai standar	Tidak tersedianya ruang parkir yang sesuai standar	Melakukan sosialisasi Perda Parkir kepada pengguna dan juru parkir	Kadis	Dec-24
<b>II DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>							
1	menurunnya kualitas	RSP.23.04.11.07.01					
2	menurunnya kualitas bangunan	RSP.23.04.11.07.02	Permen PUPR No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan Umum Perumahan Swadaya Bagi Masy. Bernenghasilan Rendah	Belum semua rumah dengan luasan standar dilakukan intervensi	Pendataan rumah dengan luas lahan yang tidak memenuhi standar	Kepala Dinas	TW II, III Tahun 2024 dan Tahun 2025
					Melakukan relokasi	Kepala Dinas	Tahun 2024 - Tahun 2026
3	Kerusakan bangunan dan gedung	RSP.23.04.11.07.03	Melakukan pendataan dan pemberian bantuan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan	Belum dilakukan analisis	Membuat analisis model intervensi penanganan bantuan pasca bencana	Kepala Dinas	TW II,III, dan IV Tahun 2024
			Telah terdapat Perwali tentang Pemberian Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan Permen PUPR tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Belum seluruhnya warga terdampak bencana mendapat bantuan	Memberi bantuan terhadap warga terdampak	Kepala Dinas	
			Sudah terbangun koordinasi dengan lintas sektor	Masih adanya penolakan masyarakat untuk program relokasi	Melakukan sosialisasi tentang program relokasi	Kepala Dinas	

4	menurunnya umur ekonomis bangunan	RSP.23.04.11.07.04	Perwali tentang Pemberian Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan Permen PUPR tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Belum dilakukan monitoring terhadap penggunaan material	Melakukan monitoring terhadap penggunaan material	Kepala Dinas	TW III Tahun 2024
5	Menurunnya kualitas bangunan	RSP.23.04.11.07.05	Perwali tentang Pemberian Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan Permen PUPR tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Belum semua warga terdampak mendapatkan pengetahuan terhadap konstruksi	Sosialisasi tentang pengetahuan terhadap konstruksi	Kepala Dinas	TW I - II Tahun 2024
6	Meningkatnya luas kawasan kumuh	RSP.23.04.11.07.06	Perwali No. 4 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Bima Tahun 2011-2031	Masih terdapat bangunan yang melanggar peruntukan lahan	Pendataan bangunan yang tidak memenuhi standar	Kepala Dinas	TW IV Tahun 2023
					Penyusunan Perwali Penyelesaian Tali Asih Akibat Relokasi Sempadan Sungai yang Bersumber Dari APBD Kota Bima	Kepala Dinas	
					Pelaksanaan intervensi	Kepala Dinas	Tahun 2024
7	Menurunnya kualitas hidup	RSP.23.04.11.07.07	Telah dilakukan sosialisasi terhadap beberapa kawasan yang terdapat bangunan diluar peruntukannya	Belum semua kawasan telah dilakukan sosialisasi	Sosialisasi tentang bangunan yang tidak sesuai peruntukan	Kepala Dinas	TW IV Tahun 2023 dan Tahun 2024
8	Terhambatnya pencapaian penurunan kawasan kumuh	RSP.23.04.11.07.08	Sudah terbentuk Pokja PKP Tingkat Provinsi dan Kota	Telah dilakukan koordinasi tapi belum menyentuh pada substansi persoalan seperti penetapan lokasi, penetapan langkah-langkah strategis, pembagian tugas dll	Melakukan pertemuan koordinasi secara berkala yang membahas persoalan persoalan substantif	Kepala Dinas	TW II dan TW IV Tahun 2024
<b>III</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						
1	Tidak tersedianya Lahan	RSP.23.03.11.06.01	Survey dan Sosialisasi tentang kegiatan fisik tahun berjalan	Konflik masih muncul pada saat pelaksanaan pekerjaan fisik	Penyusunan Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan sebagai bahan pertimbangan untuk tahun berikutnya	Kepala Dinas	Tw 3 Tahun 2024

2	Umur Ekonomis Jalan tidak sesuai rencana	RSP.23.03.11.06.02	Pembuatan Talud Jalan	Membutuhkan anggaran yang besar	Berkoordinasi dengan Dinas Terkait DLH, Pertanian untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan Berkoordinasi dengan Bappeda untuk perencanaan penganggaran	Kepala Dinas	TW 1 Tahun 2024
3	Umur Ekonomis Jalan tidak sesuai rencana	RSP.23.03.11.06.03	Perencanaan dan pengawasan fisik	Pengawasan belum dilaksanakan secara rutin	Pemeliharaan Jalan Secara rutin dan Berkala, serta memberikan teguran tertulis kepada konsultan pengawas	Kepala Dinas	TW 2 Tahun 2024
4	Umur Ekonomis Jalan tidak sesuai rencana	RSP.23.03.11.06.04	-	-	Melakukan Bimtek dan Sertifikasi pelaksana Teknis penyedia Jasa Perencana, Pengawas dan penyedia	Kepala Dinas	TW 2 Tahun 2024
5	Umur Ekonomis Jalan tidak sesuai rencana	RSP.23.03.11.06.05	Pemeliharaan Jalan	Membutuhkan anggaran yang besar	Koordinasi dengan Bappeda dan BPKAD, Penyusunan Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan sebagai bahan pertimbangan untuk tahun berikutnya	Kepala Dinas	TW 2 Tahun 2024
6	Umur Ekonomis Jalan tidak sesuai rencana	RSP.23.03.11.06.06	Pemeliharaan Jalan	Membutuhkan anggaran yang besar	Penyusunan Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan sebagai bahan pengambilan keputusan, Koordinasi dengan Dinas Perhubungan	Kepala Dinas	TW 1 Tahun 2024
7	Perencanaan Kebutuhan tidak tepat sasaran	RSP.23.03.11.06.07	Survey jalan	Survey dilakukan setelah anggaran tersedia, sehingga penanganan tidak sesuai kondisi lapangan	Penyusunan Database dan Informasi Jalan	Kepala Dinas	TW 1 Tahun 2024

8	Tidak tersedianya Lahan	RSP.23.03.11.06.08	Survey tentang kegiatan fisik tahun berjalan	Konflik masih muncul pada saat pelaksanaan pekerjaan fisik	Penyusunan Data dan Informasi Terkait Kondisi sarana dan Prasarana SDA sebagai bahan pertimbangan untuk tahun berikutnya	Kepala Dinas	TW 1 Tahun 2024
9	Umur Ekonomis Infrastruktur SDA tidak sesuai rencana	RSP.23.03.11.06.09	Pembuatan Bangunan Perkuatan Tebing	Membutuhkan anggaran yang besar	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir. dan Berkoordinasi dengan BAPPEDA.	Kepala Dinas	TW 1 Tahun 2024
10	Umur Ekonomis Infrastruktur SDA tidak sesuai rencana	RSP.23.03.11.06.10	Perencanaan dan pengawasan fisik	Pengawasan belum dilaksanakan secara rutin	Pemeliharaan Sarana Secara rutin dan Berkala, serta memberikan teguran tertulis kepada konsultan pengawas	Kepala Dinas	TW 1 Tahun 2024
11	Umur Ekonomis Infrastruktur SDA tidak sesuai rencana	RSP.23.03.11.06.11	-	-	Melakukan Bimtek dan Sertifikasi pelaksana Teknis penyedia Jasa Perencana, Pengawas dan penyedia	Kepala Dinas	TW 1 Tahun 2024
12	Umur Ekonomis Infrastruktur SDA tidak sesuai rencana	RSP.23.03.11.06.12	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Membutuhkan anggaran yang besar	Koordinasi dengan Bappeda dan BPKAD, Penyusunan Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan sebagai bahan pertimbangan untuk tahun berikutnya	Kepala Dinas	TW 2 Tahun 2024
13	Perencanaan Kebutuhan tidak tepat sasaran	RSP.23.03.11.06.13	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Membutuhkan anggaran yang besar	Penyusunan Data dan Informasi Terkait Kondisi Saran dan Prasarana SDA sebagai bahan pengambilan keputusan, Koordinasi dengan Dinas Perhubungan	Kepala Dinas	TW 2 Tahun 2024

			Survey Sarana dan Prasarana SDA	Survey dilakukan setelah anggaran tersedia, sehingga penanganan tidak sesuai kondisi lapangan	Penyusunan Database dan Informasi Sumber Daya Air	Kepala Dinas	TW 2 Tahun 2024
--	--	--	---------------------------------	---	---	--------------	-----------------

## Daftar Rencana Tindak Pengendalian

<b>Nama Pemda</b> : Kota Bima <b>Tahun Penilaian</b> : 2023 <b>Tujuan Strategis IV</b> : Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman <b>Sasaran Strategis XII</b> : Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim <b>Urusan Pemerintah</b> :							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>							
1	Kebijakan penanganan kebencanaan belum memiliki landasan hukum yang memadai	RSP.23.05.12.30.01	Telah ada SOP penanganan Darurat bencana	Jika terjadi bencana yang tidak sampai mengeluarkan pernyataan darurat bencana, atau dampaknya tidak masif, maka BPBD tidak boleh menyalurkan bantuan logistik atau bantuan lainnya	Perlu menyusun aturan terkait penanganan bencana saat keadaan tertentu	Kalak BPBD	Dec-23
			Telah Perwali tentang Rencana Penanggulangan Bencana namun telah kadaluwarsa	Dokumen telah kadaluwarsa	Menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sebagai salah satu upaya untuk diintegrasikan dalam pembangunan daerah dan Dilegalisasi dengan Perwali	Kalak BPBD	Dec-23
					Perlu adanya evaluasi berkala oleh Tim sejauh mana tingkat keterpaduan dan keselarasan dokumen perencanaan PB		Tahun 2025



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
2	lambatnya pemulihan paasca bencana	RSP.23.05.12.30.02	Telah menyusun Dokumen Rencana aksi Rehab dan Rekon setiap tahun	Para pihak terkait tidak melaksanakan sesuai rencana aksi	Perlu adanya evaluasi berkala terhadap dokumen rencana aksi	Kalak BPBD	Setiap Bulan Januari dan bulan Juli setiap tahun
					Hasil Evaluasi dikirim kepada Walikota dan TAPD sebagai bahan Pertimbangan selanjutnya		Setiap Bulan Januari dan bulan Juli setiap tahun
3	Masyarakat tidak siap menghadapi bencana	RSP.23.05.12.30.03	telah membentuk Kelurahan tangguh bencana sebanyak 38 Kelurahan se kota Bima dan masih berada pada level pratama dan madya	masih tersisa 3 Kelurahan yang belum dibentuk kelurahan tangguh dan semua kelurahan se Kota Bima belum mandiri (level Utama)	Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana untuk 3 Kelurahan (1 Kelurahan per tahun)	Kalak BPBD	2024, 2025, 2026
					FGD Penilaian Ketangguhan Desa/Kelurahan (PKD)		Dec-23
					Penguatan Kelurahan Tangguh pada Level Madia sampai Level Utama/ Mandiri (3 Kelurahan Per tahun)		RPJMD Berikutnya
4	Penanganan bencana yang terlambat	RSP.23.05.12.30.04	Melatih TRC dan Tim Terkait lainnya	Belum Semua TRC dan Tim Penanggulangan Bencana lainnya dilatih dan belum memiliki sertifikasi keahlian	Pelatihan sertifikasi keahlian bagi TRC petugas PB lainnya	Kalak BPBD	Tahun 2024, 2025, 2026
					Penambahan Personil BPBD melalui Pengadaan /Perekturan PNS/PPPK		Tahun 2024,2025,2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
				Belum ada Dokumen Rencana Kontingensi per bencana sebagai pedoman dalam penanganan darurat Bencana	Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi per bencana (Untuk bencana Prioritas) 2 Dokumen per tahun		Tahun 2024,2025,2026
					Pengaktifan Sistim Komando Penanganan Bencana yang telah dibuatkan dokumen Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi		Jika terjadi Darurat Bencana
5	Penanganan bencana yang terlambat disebabkan Kapasitas dan kapabilitas tim penanggulangan bencana belum memadai	RSP.23.05.12.30.05	Telah memiliki sarana mobilisasi yang cukup memadai	Belum Semua Sarana prasarana darurat bencana tersedia	Pengadaan sarana prasarana kesiapsiagaan dan peralatan perlindungan masyarakat	Kalak BPBD	Tahun 2024,2025,2026
6	Korbn bencana tidak memperoleh haknya dalam penangulangan kebencanaan disebabkan sarana dan prasarana penanggulanagn bencana belum memdai	RSP.23.05.12.30.06	Pemberian bantuan darurat bencana sesuai kemampuan yang ada	Belum memiliki SOP tentang Standar pemberian Bantuan bencana	Penyusunan Kajian Standar pemberian bantuan per jenis bencana dan Legalitas hukumnya	Kalak BPBD	Tahun 2024
<b>II DINAS SOSIAL</b>							
1	Distribusi bantuan yang terhambat	RSP.23.06.12.08.01	Telah ditetapkan sebanyak tiga lumbung Sosial di kota bima	Masih ada beberapa Kecamatan yang belum terbentuk lumbung sosial	Membentuk lumbung sosial pada tiap kecamatan di Kota Bima	Kepala Dinas	Tahun 2024-2025
2	Tidak tertanganinya korban bencana secara maksimal	RSP.23.06.12.08.02	Telah dilakukan pengadaan untuk persediaan logistik bencana	Tidak tercukupinya kebutuhan logistik	Membuat rencana kkebutuhan berdasarkan analisis jumlah korban terdampak	Kepala Dinas	Nov-23

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
					Melakukan pengadaan sesuai dengan rencana kebutuhan	Kepala Dinas	Mar-24
3	Tidak tertanganinya korban bencana secara maksimal	RSP.23.06.12.08.03	Sudah terbangunnya tim reaksi cepat, TAGANA dan TSBK di kota bima	Sinergisitas penanganan bencana yan belum sesuai dengan dokumen-dokumen kebencanaan	Melakukan pertemuan berkala	Kepala Dinas	Tahun 2024
4	Luas Wilayah operasi yang tersebar dengan kontur yang tidak sama		Telah dilakukan pengusulan logistik pada kementerian sosial				
5	Pelayanan kebakaran tidak						
<b>III SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>							
1	Kejadian yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	RSP.23.05.12.10.01	Adanya pendataan anggota Satlinmas yang ada pada Wilayah Kelurahan	Perlu dilakukan pendataan anggota Satlinmas yang ada pada Wilayah Keluraha	MPenegakan PERDA/PERKADA	Bidang Perlindungan Masyarakat, SDM dan Sarana Prasarana / Kabid SDM	3 Bulan
2	Kejadian yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	RSP.23.05.12.10.02	Pelaksanaan tugas yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum belum maksimal	Dilakukan penambahan Sarana dan Prasarana yang memadai	Penambahan Sarana dan Prasarana	Bidang Perlindungan Masyarakat, SDM dan Sarana Prasarana / Kabid SDM	3 Bulan
<b>IV DINAS PEMADAM KEBAKARAN</b>							
1	Luas Wilayah operasi yang tersebar dengan kontur yang tidak sama	RSP.23.05.12.11.01	Penetapan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dan Non WMK	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi, dilaksanakan,	Pengadaan Sarana Prasarana untuk Pelayanan Daerah diluar WMK	Kepala Daerah	Triwulan III Tahun 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Pelayanan kebakaran tidak maksimal	RSP.23.05.12.11.02	Pembentukan Relawan Kebakaran (Redkar) dan SOP Kegiatan Pembentukan Redkar	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi, dilaksanakan,	Peningkatan Intensitas Pembinaan Relawan Kebakaran yang telah dibentuk	Kepala Daerah	Triwulan IV Tahun 2023
3	Keterlibatan masyarakat dalam penanganan kebakaran dan non kebakaran masih kurang	RSP.23.05.12.11.03	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran dan SOP Kegiatan Sosialisasi	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi, dilaksanakan,	Peningkatan kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan kepada Masyarakat mengenai pencegahan dan penanggulangan Kebakaran	Kepala Daerah	Triwulan I Tahun 2024
4	Inspeksi dan proteksi pencegahan kebakaran belum maksimal	RSP.23.05.12.11.04	SOP tentang Inspeksi Bangunan Gedung Pencegahan Kebakaran	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi, dilaksanakan,	Penyusunan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota tentang Pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Kepala Daerah	Triwulan IV Tahun 2024
<b>V KECAMATAN</b>							
1	Pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran	RSP.23.32.12.31.01	Sosialisasi program bantuan pemerintah	Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang bantuan pemerintah	Sosialisasi ke Masyarakat Kecamatan RasanaE Timur	camat	Nopember 2023
2	Masyarakat belum mendapatkan akses air bersih yang memadai	RSP.23.32.12.31.02	sosialisai dan Penghijauan sumber Mata Air dan sekitarnya	berkurangnya akses air bersih	Sosialisasi Lingkungan Lestari	camat	Triwulan II dan Triwulan III 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Inspeksi dan proteksi pencegahan kebakaran belum maksimal	RSP.23.05.13.11.09	SOP tentang Inspeksi Bangunan Gedung Pencegahan Kebakaran	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi, dilaksanakan	Penyusunan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota tentang Pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Kepala Daerah	Triwulan IV Tahun 2024
10	Kecelakaan kerja SDM pemadam sering terjadi	RSP.23.05.13.11.10	Kegiatan Standarisasi sarana Prasarana Pemadaman Kebakaran dan Penambahan Pengadaan Sarana	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat	Pengadaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Kebutuhan dan standar pelayanan Pemadam Kebakaran	Kepala Daerah	Triwulan III Tahun 2024


  
**PJ. WALIKOTA BIMA**  
**MOHAMMAD RUM**